

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU
2019-2024

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN
2020

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I **PENDAHULUAN** 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

2.1 Tugas, Fungsi dan Sususan Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau 9

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Riau 9

2.1.2 Susunan Organisiasi 9

2.1.3 Tugas dan Fungsi Sesuai Susunan Organisasi 9

2.1.4 Standar Opersional Prosedur (SOP) 16

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 18

2.2.1 Sumber daya Manusia 18

2.2.2 Sumber Daya Aset 25

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 27

2.3.1 Kinerja Pendidikan Terhadap Indikator RPJMD 27

2.3.2 Indikator Kinerja Terhadap Perubahan Renstra 2014-2019 36

2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Layanan 63

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Pendidikan 63

BAB III **ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI** .....

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pendidikan 65

3.2 Telaah Visi, Misi Program Kepala Daerah 67

3.3 Telaah Rencana Strategis KL dan Renstra Kabupaten/Kota 70

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 80

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 80

BAB IV **TUJUAN DAN SASARANA DINAS PENDIDIKAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 81

BAB V **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan..... 84

BAB VI **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 89**

BAB VII **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 97**

BAB VIII **PENUTUP..... 99**

DAFTAR GAMBAR

Halaman

GAMBAR 1.1 : Tahapan dan Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2

GAMBAR 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau..... 15

GAMBAR 2.2 : Keadaan PNS Dinas Pendidikan Menurut Jabatan 19

GAMBAR 2.3 : Keadaan PNS Dinas Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan 20

GAMBAR 2.4 : Keadaan PNS Dinas Pendidikan Menurut Golongan 20

GAMBAR 2.4 : Keadaan Guru Berdasarkan Status Kepegawaian 22

GAMBAR 2.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Perencanaan strategis SKPD mutlak diperlukan sejalan pendekatan perencanaan pembangunan sebagaimana Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dengan ditetapkannya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun rencana pembangunan Daerah secara sistimatis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.

Fungsi Renstra adalah Menjadi Pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD; Sebagai Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Urusan.

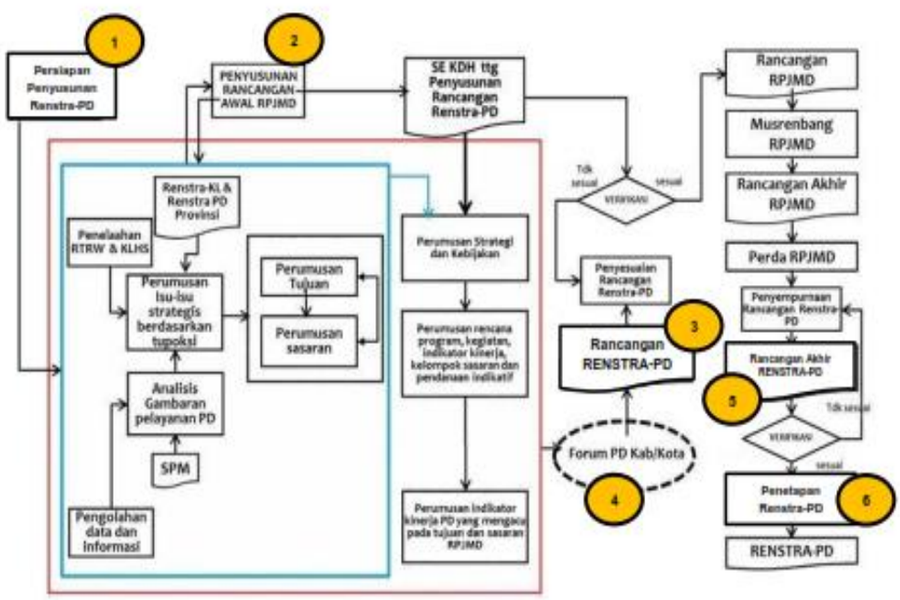
Berdasarkan Pasal 15 ayat(2) dan Pasal 19 ayat(4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 89 ayat(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencan apembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, disebutkan bahwa setiap OPD wajib menyusun Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Disamping itu, sesuai dengan Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah.

Dalam menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangka Daerah (Renstra OPD) maka terdapat empat tahapan penyusunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari :

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir; dan
6. Penetapan.

Terkait alur tahapan dan tatacara penyusunan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:



Gambar 1.1
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah atau lebih dikenal dengan Renstra-OPD adalah Rencana pembangunan 5 tahunan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan mengacu pada RPJMD Provinsi Riau dan Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Renstra seluruh OPD diPemerintah Provinsi Riau nantinya dijadikan acuan untuk masing-masing OPD diKabupaten/Kota se Provinsi Riau. Renstra Dinas Pendidikan ini selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan.

Renja Dinas Pendidikan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Renja Dinas Pendidikan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-Dinas Pendidikan. RKA inilahy ang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA-OPD ini akan menjadi dasar ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran yaitu DPA.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor xxx);
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024
20. Peraturan Gubernur Riau No. 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2020.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra PD adalah :

1) Menentukan arah strategis Jangka Menengah PD dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan secara holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial yang berdasarkan capaian kinerja perangkat Daerah, Permasalahan dan isu strategis PD guna mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Tujuan Penyusunan Renstra PD :

1) Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat daerah ;
2) Merumuskan strategi & arah kebijakan Jangka Menengah PD guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD ;
3) Merumuskan Rencana Program,kegiatan,indikator kinerja,kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif selama 5 (lima) Tahun;
4) Merumuskan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan PD;

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ini di susun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian Renstra PD, Fungsi Renstra PD dalam Penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses Penyusunan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/ kabupaten/ kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

3.2.Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII. PENUTUP

Tabel T-C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan
Provinsi Riau

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)
1	Meningkatnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah		8.89 Tahun		8.47	8.49	8.59	8.61	8.79	8.47	8.49	8.59	8.69	n/a	100.00%	100.00%	100.00%	100.93%	n/a
2	Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah		13.22 Tahun		12.45	12.74	12.86	12.98	13.1	12.45	12.74	12.86	13.43	n/a	100.00%	100.00%	100.00%	103.47%	n/a
3	APK Sekolah Menengah Sederajat		82.58%		91.35%	91.85%	92.37%	78.30%	80.47%	68.89%	71.69%	74.92%	81.39%	82.58%	75.41%	78.05%	81.11%	103.95%	102.62%
4	APM Sekolah Menengah Sederajat		63.24%		68.34%	68.86%	69.38%	62.92%	63.08%	54.01%	54.59%	56.71%	60.22%	63.24%	79.03%	79.28%	81.74%	95.71%	100.25%
5	Persentase Guru SMA/SMK Berkualifikasi S1/D IV		95.00%		62%	93.58%	94.05%	94.52%	95.00%	92.64%	92.29%	94.06%	95.29%	95.33%	149.42%	98.62%	100.01%	100.81%	100.35%
6	Persentase SMA Terakreditasi Minimal B		95.00%		n/a	93.43%	54.60%	64.74%	74.88%	n/a	85.85%	26.60%	69.36%	81.49%	n/a	91.89%	48.72%	107.14%	108.83%
7	Persentase Program Keahlian SMK Terakreditasi Minimal B		45.40%		n/a	93.43%	54.60%	64.74%	74.88%	n/a	51.35%	34%	99.87%	54.19%	n/a	54.96%	62.27%	154.26%	72.37%

Tabel T-C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Terhadap RPJMD Tahun 2014-2019
Provinsi Riau

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)
1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah																		
	a. SD/MI (Sekolah/Penduduk 7 - 12 Tahun)				204.00	223.00	224.00	225.00	226.00				25.17		0.00%	0.00%	0.00%	11.19%	0.00%
	b. SMP/MTS (Sekolah/Penduduk 13 - 15 Tahun)				238.00	228.00	229.00	230.00	231.00				38.09		0.00%	0.00%	0.00%	16.56%	0.00%
	c. SMA/SMK/MA(Sekolah/Penduduk 16 - 18 Tahun)				44.74	44.59	42.44	41.62	39.92				40.62		0.00%	0.00%	0.00%	97.60%	0.00%
2	Rasio murid terhadap Guru																		
	a. SD/MI (Murid/Guru)				16.00	15.00	14.40	13.97	13.58	15.00	15.00	15.00	15.00		93.75%	100.00%	104.17%	107.37%	0.00%
	b. SMP/MTS (Murid/Guru)				14.00	11.00	15.01	15.38	15.72	13.00	14.00	13.00	15.00		92.86%	127.27%	86.61%	97.53%	0.00%
	c. SMA/SMK/MA (Murid/Guru)				14.00	12.00	14.16	14.16	14.15	11.00	14.00	14.00	14.00		78.57%	116.67%	98.87%	98.87%	0.00%
3	Rasio murid Terhadap kelas																		
	a. SD/MI (Jumlah Murid/Kelas)				22.00	24.00	22.67	22.17	21.67			24.00	24.00		0.00%	0.00%	105.87%	108.25%	0.00%
	b. SMP/MTS (Jumlah Murid/Kelas)				28.00	28.00	26.67	25.67	24.44			28.00	30.00		0.00%	0.00%	104.99%	116.87%	0.00%
	c. SMA/SMK/MA (Jumlah Murid/Kelas)				28.00	30.00	29.33	29.33	29.33			27.00	28.00		0.00%	0.00%	92.06%	95.47%	0.00%
4	Tingkat kelulusan menurut jenjang pendidikan (%)																		
	a. SD				99.84	99.84	99.94	99.95	99.96	99.73	99.82	99.94	100.00		99.89%	99.98%	100.00%	100.05%	0.00%
	b. SLTP				99.29	99.19	99.42	99.53	99.64	99.38	99.19	99.42	100.00		100.09%	100.00%	100.00%	100.47%	0.00%
	C. SLTA				98.25	98.92	99.45	98.87	99.25	99.8	98.92	98.45	99.96		101.58%	100.00%	98.99%	101.10%	0.00%

Tabel T-C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan
Provinsi Riau

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Meningkatnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah		8.61 Tahun		8.38	8.47	8.49	8.59	8.61	8.38	8.47	8.49	8.59	8.69	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.93%
	Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah				12.27	12.45	12.74	12.86	13.19	12.27	12.45	12.74	12.86	13.43	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	101.82%
2	Meningkatnya Angka Melek Huruf		98.57%				98.51%	98.54%	98.54%			98.77%	99.03%	99.17%			100.26%	100.50%	100.64%
3	APK SMA/SMK		93.41%		72%	91.35%	91.85%	92.37%	78.30%	76.98%	68.89%	71.69%	74.92%	81.39%	106.92%	75.41%	78.05%	81.11%	103.95%
4	APM SMA/SMK		70.43%		75%	68.34%	68.86%	69.38%	62.92%	74.88%	54.01%	54.59%	56.71%	60.22%	99.84%	79.03%	79.28%	81.74%	95.71%
5	Persentase Kelulusan Peserta didik SMA/SMK/MA		99.71%		n/a	n/a	99.33%	99.68%	99.71%	n/a	n/a	100%	98.45%	99.96%			100.67%	98.77%	100.25%
6	Rata-rata nilai UN SMA/MA jurusan IPA		7.71		n/a	n/a	70.64	70.68	70.71	n/a	n/a	70.88	57.92	49.05			100.34%	81.95%	69.37%
7	Rata-rata nilai UN SMA/MA jurusan IPS		7.71		n/a	n/a	70.64	70.68	70.71	n/a	n/a	59.02	53.2	45.88			83.55%	75.27%	64.88%
8	Persentase capaian rata-rata keseluruhan IP SMp SMA/MA sederajat				n/a	n/a	36%	54%	72%	n/a	n/a	78.88%	91.12%	91.69%			219.11%	168.74%	127.35%
9	Persentase Guru SMA/SMK Berkualifikasi S1/D IV		94.52%		n/a	62%	93.58%	94.05%	94.52%	n/a	92.64%	92.29%	94.06%	95.29%		149.42%	98.62%	100.01%	100.81%
10	Persentase Guru SMA bersertifikat Pendidik		39,70%		n/a	n/a	n/a	36%	45.90%	n/a	n/a	46.15%	39.70%	44.23%				110.28%	96.36%
11	Persentase Guru SMK bersertifikat Pendidik		30,59%		n/a	n/a	n/a	23%	30.59%	n/a	n/a	30.70%	30.57%	38.41%				132.91%	125.56%
12	Persentase SMA Terakreditasi		95.00%		n/a	n/a	93.43%	54.60%	64.74%	n/a	n/a	85.85%	26.60%	69.36%			91.89%	48.72%	107.14%
13	Persentase SMK Terakreditasi		45.40%				93.43%	54.60%	64.74%			51.35%	34%	99.87%			54.96%	62.27%	154.26%

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan
Provinsi Riau

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	2	3	4	5	5	2	3	4	5	5	1	2	1	2	3	1	2
Belanja Tidak Langsung	**59.080.178.212,00**	**68.797.530.512,00**	**62.371.055.186,00**	**1.185.136.496.588,00**	**1.185.136.496.588,00**	**46.463.395.250,00**	**48.742.987.061,00**	**56.691.821.407,00**	**943.821.670.605,00**	**943.821.670.605,00**	0,8	0,7	0,9	0,8	0,8		
Belanja Langsung	**377.449.205.650,00**	**425.597.666.190,00**	**555.003.354.182,71**	**842.493.565.992,00**	**920.569.586.826,67**	**198.681.910.087,00**	**252.079.790.041,00**	**435.254.613.865,00**	**751.158.897.453,00**	**758.120.438.543,00**	0,5	0,6	0,8	0,9	0,8		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.074.873.500,00	10.538.432.200,00	19.029.907.403,21	8.966.736.580,00	10.662.043.900,00	4.723.318.678,00	7.564.451.128,00	1.407.457.134,00	7.093.081.976,00	7.869.134.617,00	0,8	0,7	0,1	0,8	0,7	-75,51%	66,60%
Program Pendidiakan Anak usia Dini		17.670.655.200	18.264.866.292,00	-	-	-	10.143.343.800	16.398.779.110	-	-		0,6	0,9			-100,00%	
Program Pendidikan Tinggi		93.786.374.550	84.901.603.472,00	-	-	-	44.655.208.680	70.448.484.118	-	-		0,5	0,8			-100,00%	
Program Pendidikan Dasar		50.334.799.340	40.894.803.118,00	-	-	-	30.422.908.661	33.102.059.700	-	-		0,6	0,8			-100,00%	
Progran Pendidikan Non Formal dan Informal	21.230.000.000,00	52.492.728.850	59.833.224.624,00			12.436.084.900,00	36.365.552.020	48.664.096.753	-	-	0,6	0,7	0,8			-100,00%	-100,00%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.706.500.000,00	4.517.000.000	15.809.172.446,00	1.051.550.000,00	2.008.538.100,00	3.314.334.116,00	354.710.023	9.575.170.935	916.953.179,00	1.006.799.850,00	0,5	0,1	0,6	0,9	0,5	-55,53%	-69,62%
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1.362.500.000,00	1.875.000.000	2.222.495.000,00	892.576.000,00	496.702.400,00	625.701.350,00	1.040.860.650,00	1.057.493.707	696.143.200,00	389.112.200,00	0,5	0,6	0,5	0,8	0,8	-73,51%	-37,81%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	321.300.000,00	720.000.000	350.596.000,00			-	457.288.425,00	332.864.500			0,0	0,6				-100,00%	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.125.000.000,00	492.670.000	500.000.000,00	442.250.000,00	-	722.164.800,00	346.378.650,00	420.605.000	373.537.700,00		0,6	0,7		0,8		-100,00%	-100,00%
Program Wajib Belajar Pendidikan dasar sembilan tahun	69.861.665.250,00					23.513.815.030,00					0,3						-100,00%
Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan	25.291.222.400,00					18.240.519.525,00											-100,00%
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan																	
Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan																	
Program Peningkatan Mutu Kurikulum	1.500.000.000,00					7.385.700,00											-100,00%
Program Pemerataan dan Perluasan Akses, Mutu, Relevansi dan daya saing	37.200.000.000,00					19.364.200.059,00											-100,00%
Program Pembinaan dan Pengembangan Perguruan Tinggi	81.814.144.500,00					46.102.364.159,00											-100,00%
Program Penataan Kelembagaan			210.550.000,00														
Program Penataan Tatalaksana			173.000.000,00														
Program Pembangunan Sekolah Terpadu		54.000.000.000					-									-100,00%	
Program Pendidikan Menengah	124.462.000.000,00	113.061.876.700	166.546.444.333,00	547.041.238.533,00	549.213.600.566,67	69.233.716.870,00	84.752.026.741	136.804.186.236	490.653.684.504,00	400.376.135.996,00	0,6	0,7	0,8	0,9	0,7	385,76%	478,30%
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		23.301.394.150	26.298.213.584,50	211.110.748.207,00	71.663.802.630,00		5.867.739.011	20.573.616.063	188.740.654.992,00	48.190.093.505,00			0,8	0,9	0,7	207,55%	
Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus		34.815.955.200	70.165.428.000,00	72.838.466.672,00	43.890.299.230,00		19.497.163.577	59.829.492.631	62.541.591.902,00	37.519.038.717,00			0,9	0,9	0,9	26,06%	
Program Pendidikan Luar Biasa																	
Program Pengembangan dan Pelestarian Budaya	500.000.000,00	21.590.780.000	49.679.849.910,00			398.304.900,00	10.487.388.675	36.519.880.978				0,5	0,7			-100,00%	-100,00%
Program Pengembangan Pendidikan Karakter dan Budaya																	
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)					242.634.600.000,00					262.770.123.658,00					1,1		
Program Pengembangan Data/Informasi			123.200.000,00	150.000.000,00	-			120.427.000	143.250.000,00	-				1,0			

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Orgnisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

2.1. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau

2.1.1 Tugas Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Dinas Pendidikan bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) Dinas Pendidikan menyeleggarakan fungsi:
   a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, sidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;
   b. Pelaksanaan kebijakan pada sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;
   c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;
   d. Pelaksanaan administrasi pada sekretariat, Bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan dan;
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan,terdiri atas:
   a. Kepala Dinas
   b. Sekretariat, terdiri atas:
      1. Subbagian Perencanaan Program
      2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang milik Daerah;
      3. Subbagian Kepegawaian Umum
   c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas.
   d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
   e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan layanan Khusus.
   f. Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan.
   g. Cabang Dinas.
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
3. Bidang dibantu oleh Pelaksana/Pejabat Fungsional.
4. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Kepala Dinas Pendidikan merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a)
6. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
7. Kepala Subbagian merupakan Penjabat Pengawas (eselon lV.a).

2.1.3. Tugas dan Fungsi sesuai susunan organisasi

1. Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pcmerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepala Daerah pada bidang pendidikan**.**
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan.
3. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencaaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.

4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

   a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat

   b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat

   c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan

   d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

5. Kepala Subbagian Perencanaan Program Mempunyai Tugas :

   a. merencanakan program / kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program

   b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program

   c. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program / kegiatan dari masing-masing bidang

   d. melaksanakan penyusunan rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja

   e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur

   f. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis

   g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program dan

   h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas :

   a. merecanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

   b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan PengeloLaan Barang MiLik Daerah

   c. melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset

   d. mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai

e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset.

f. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah.

g. melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Pendidikan.

h. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan.

i. melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi.

j. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran.

k. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan pencatatan aset.

l. melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja.

m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaa tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Mempunyai Tugas :

a. merencanakan program / kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum.

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum.

c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat.

d. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian.

e. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pengawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan.

f. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai.

g. membuat laporan perkembangan kepegawaian.

h. menyelenggarakan urusan kehumasan.

i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.

j. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanaan dinas.

k. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

l. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat.

m. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.

n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas

a. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/ Kota se Provinsi Riau.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas menyeleggarakan fungsi :

- penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;

- penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;

- menyusun bahan perumusan koordinasi pencapaian kurikulum, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kurikulum dan pembangunan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas;

- menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Atas;

- penyelenggaraan pemantaun, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan,

- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

9. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

a. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan fungsi.

- penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- penyelenggaraan koordisi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- menyusun bahan perumusan koordinasi, pembinaan, serta kelembagaan dan sarana prasarana, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan pembangunan karakter peserta didik, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
- menyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Kejuruan;
- penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan peLaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan;
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

10. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

a. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus mempunyai tugas melakukan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/kota se Provinsi Riau.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan layanan Khusus menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan layanan Khusus;
- penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- menyusun bahan perumusan koordinasi, pembinaan, serta kelembagaan dan sarana prasarana, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan pembangunan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- menyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan
- pelaksanaan tugas kedinasan Iain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

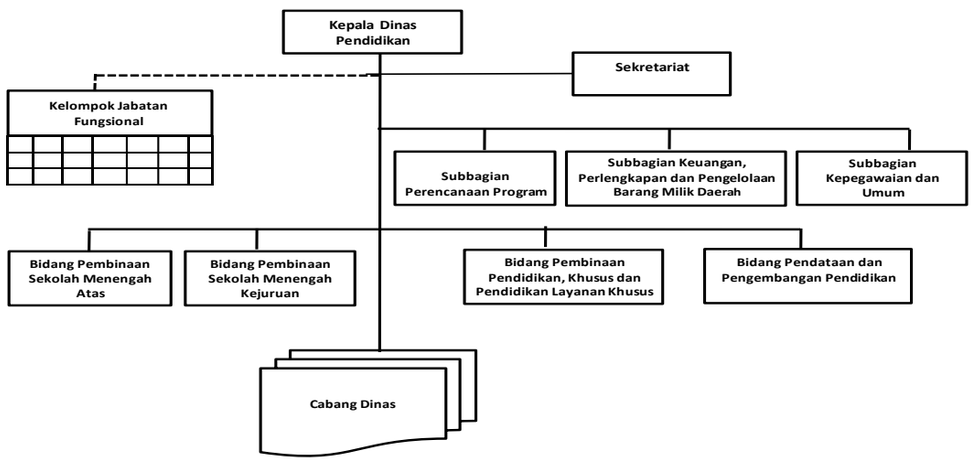
11. Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan

a. Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/kota se Provinsi Riau

b. Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (l) Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pendataan dan pengembangarr Pendidikan;
- penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pendataan dan Pengembangan pendidikan;
- menyusun bahan perumusan koordinasi, analisis, sinkronisasi dan neraca pendidikan daerah pelaksanaan kebijakan pengelola data pendidikan, Pengembangan Kebijakan pendidikan dan fugas pembantuan, fasilitasi dan kerjasama pendidikan;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, pembangunan dan kebijakan perencanaan, pembangunan dan pengembangan pendidikan, serta pelaksanaan tugas pembantuan, fasilitasi dan kerjasama pendidikan;
- melakukan penyebarluasan informasi dan pokok pendidikan dan profil pendidikan Provinsi Riau;
- menyusun kelender pendidikan;
- penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau



2.1.4 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DINAS PENDIDIKAN

Dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau memiliki panduan yang memastikan kegiatan operasional di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau berjalan dengan lancar dan sesuai dengan koridor yang ada. Standar Operasional Prodesur (SOP) ini diatur dalam Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 804/IX/2017.

Berikut adalah nama dan kode nomor Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Dinas Pendidikan Provins Riau :

NO.	NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	NOMOR KODE SOP
	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU	4.1
1	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	4.1.1.1.1
2	Penyusunan Rencana Anggaran Kas (RAK) SKPD	4.1.1.1.2
3	Pembuatan Perjanjian Kinerja (PK) Lingkup Dinas	4.1.1.1.3
4	Pembuatan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Lingkup Dinas	4.1.1.1.4
5	Pembuatan Laporan Kinerja Dinas	4.1.1.1.5
6	Pembuatan Daftar Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)	4.1.1.1.6
7	Pembuatan Rekomendasi Bantuan Hibah Dana Pendidikan Untuk Sekolah Swasta	4.1.1.1.7
8	Pembuatan Rekapitulasi Laporan Bantuan Keuangan Untuk Sekolah Negeri Jenjang TK, SD dan SMP Lingkup Dinas	4.1.1.1.8
9	Pembuatan Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Negara	4.1.1.1.9
10	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi	4.1.1/2/3/4/5.1-2-3.10
11	Penyusunan Profil Pendidikan	4.1.1.1.11
12	Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Dinas	4.1.1.1.12
13	Pembuatan Surat Usulan Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dana APBD dan APBN	4.1.1.1.13
14	Pembuatan Surat Keputusan Tim dan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Lingkup Dinas	4.1.1.1.14
15	Pembuatan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Gaji/Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	4.1.1.2.1
16	Pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) APBD	4.1.1.2.2
17	Pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) APBN	4.1.1.2.3
18	Pembuatan Berita Acara Serah Terima Barang	4.1.1.2.4
19	Pembuatan Kartu Inventarisasi Barang (KIB) Dinas	4.1.1.2.5
20	Pembuatan Surat dan Daftar Usulan Penghapusan Barang Dinas	4.1.1.2.6
21	Pembuatan Berita Acara Serah Terima Blangko Ijazah Sekolah	4.1.1.2.7
22	Inventarisasi Barang Milik Daerah Lingkup Dinas	4.1.1.2.8
23	Pembuatan Daftar Rencana Kebutuhan Barang	4.1.1.2.9

24	Pembuatan Surat Permohonan Pemakaian Kekayaan Daerah Lingkup Dinas	4.1.1.2.10
25	Pendistribusian Naskah Ujian Nasional	4.1.1/2/3/4.2.11
26	Administrasi Surat Masuk	4.1.1.3.1
27	Administrasi Surat Keluar	4.1.1.3.2
28	Penerimaan Tamu Kepala Dinas	4.1.1.3.3
29	Pembuatan Surat Perintah Tugas Dinas Pendidikan	4.1.1/2/3/4/5.1-2-3.4
30	Pembuatan Draf Peraturan Gubernur Bidang Pendidikan Lingkup Dinas	4.1.1/2/3/4/5.1-2-3.5
31	Pembuatan Draft Surat Keputusan (SK) Gubernur Terkait Bidang Pendidikan	4.1.1/2/3/4/5.1-2-3.6
32	Pembuatan Draft Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Terkait Bidang Pendidikan	4.1.1/2/3/4/5.1-2-3.7
33	Pembuatan Daftar Urutan Kepangkatan Pegawai Lingkup Dinas	4.1.1.3.8
34	Pembuatan Rekapitulasi Absensi Pegawai Lingkup Dinas	4.1.1.3.9
35	Pembuatan Surat Mutasi Pegawai Lingkup Dinas	4.1.1.3.10
36	Pembuatan Surat Pengantar Izin Atau Tugas Belajar Pegawai Lingkup Dinas	4.1.1.3.11
37	Pembuatan Surat Teguran Pegawai Lingkup Dinas	4.1.1.3.12
38	Pembuatan Surat Usulan Cuti Pegawai Dinas	4.1.1.3.13
39	Pembuatan Surat Usulan Izin Perceraian Pegawai Lingkup Dinas	4.1.1.3.14
40	Pembuatan Surat Usulan Kartu Pegawai Lingkup Dinas	4.1.1.3.15
41	Pembuatan Surat Usulan Kartu Suami/ Kartu Istri Lingkup Dinas	4.1.1.3.16
42	Pembuatan Surat Usulan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Lingkup Dinas	4.1.1.3.17
43	Pembuatan Surat Usulan Taspen Pegawai Lingkup Dinas	4.1.1.3.18
44	Pembuatan Surat Keterangan Pegawai	4.1.1.3.19
45	Pembuatan Surat Rekomendasi Pindah Sekolah Ke Luar Negeri	4.1.1.3.20
46	Pembuatan Usul Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu	4.1.1.3.21
47	Pembuatan Usul Kenaikan Pangkat Struktural/Fungsional Umum	4.1.1.3.22
48	Penyusunan Laporan Triwulan Absen Pegawai Lingkup Dinas	4.1.1.3.23
49	Pelaksanaan Legalisir Surat Pindah Rayon SD dan SMP Antar Provinsi	4.1.1.3.24
50	Pelaksanaan Legalisir Surat Pindah Rayon SLB, SMK, SMA Antar Provinsi	4.1.1/2/3/4.3-3.25
51	Penyelenggaraan Workshop/Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Training Of Trainer (TOT)/Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pendidikan	4.1.1/2/3/4/5.1-2-3.26
52	Inventarisasi Data Pegawai Lingkup Dinas	4.1.1/2/3/4/5.1-2-3.27
53	Inventarisasi Data Kenaikan Pangkat Pegawai Lingkup Dinas	4.1.1.3.28
54	Inventarisasi Rekapitulasi Data Pembagian Tambahan Penghasilan Pegawai Lingkup Dinas	4.1.1.3.29

55	Pelaksanaan Sertifikasi Lingkup Dinas	4.1.1.3.30
56	Pelaksanaan Perlombaan Bidang Seni, Olahraga, Sains dan Teknologi	4.1.2/3/4/5.1-2-3.1
57	Pembuatan Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional(DKHUN) SMP,SMPLB,SMA,SMALB dan SMK	4.1.2/3/4.1-2-3.2
58	Pembentukan Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Negeri	4.1.2/3/4.3.1
59	Pembuatan Rekomendasi Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Sekolah Menengah, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Swasta	4.1.2/3/4.3.2
60	Pelaksanaan Pembayaran Beasiswa Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi	4.1.3.3.1
61	Pembuatan SK Penetapan Hasil Seleksi Beasiswa Pendidikan Strata 2 Tugas Belajar Bagi Tenaga Pendidik SMA/SMK	4.1.3.3.2
62	Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN Plus	4.1.4.1.1
63	Usulan Bantuan Rehabilitasi Sekolah Luar Biasa (SLB)	4.1.4.3.1
64	Pembuatan Surat Keterangan/Pengentrian Penambahan PTK Baru	4.1.5.1.1
65	Pembuatan Surat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) Untuk Sekolah Baru SLB, SMA Dan SMK di Lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Riau	4.1.5.1.2
66	Pembuatan Surat Keterangan Melaksanakan Penambahan Jam Mengajar Guru SMA/SMK/SLB	4.1.5/2/3/4.2.1

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

2.2.1.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia merupakan modal yang paling berharga serta merupakan asset yang paling penting dan sangat diperhatikan dalam organisasi. Hal ini karena kinerja suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang ada. Sumber daya manusia/personil di Dinas Pendidikan terdiri dari 6.983 pegawai termasuk guru dapat dilihat pada tabel berikut:

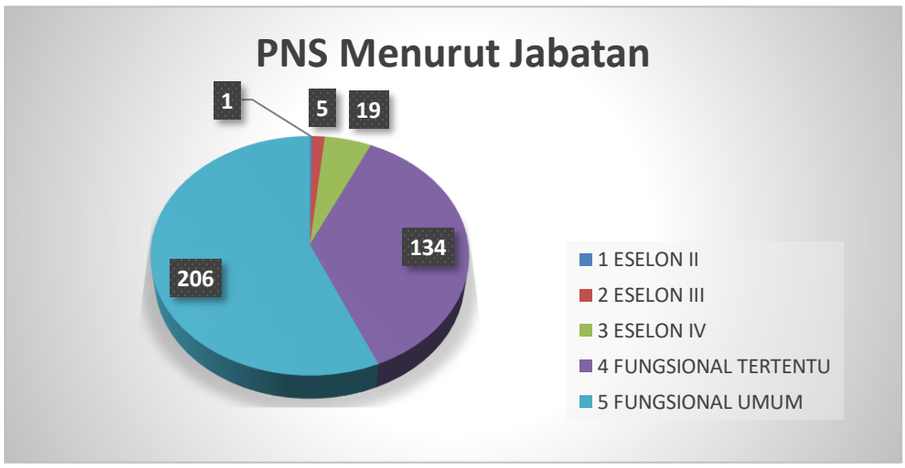
Tabel 2.1
Kondisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH	%
1	ESSELON II	**1**	**0,27**
2	ESSELON III	**5**	**1,37**
3	ESSELON IV	**19**	**5,21**
4	FUNGSIONAL TERTENTU	**134**	**36,71**
5	FUNGSIONAL UMUM	**206**	**56,44**
JUMLAH		**365**	**100**

(sumber data :Dinas Pendidikan Provinsi Riau)

Secara sederhana gambaran Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Provinsi Riau Menurut Jabatan/Eselon dapat dilihat gambar berikut ini :

Gambar 2.1
Keadaan PNS Dinas Pendidikan Menurut Jabatan



Tabel2.2
Klasifikasi Pegawai menurut Pendidikan

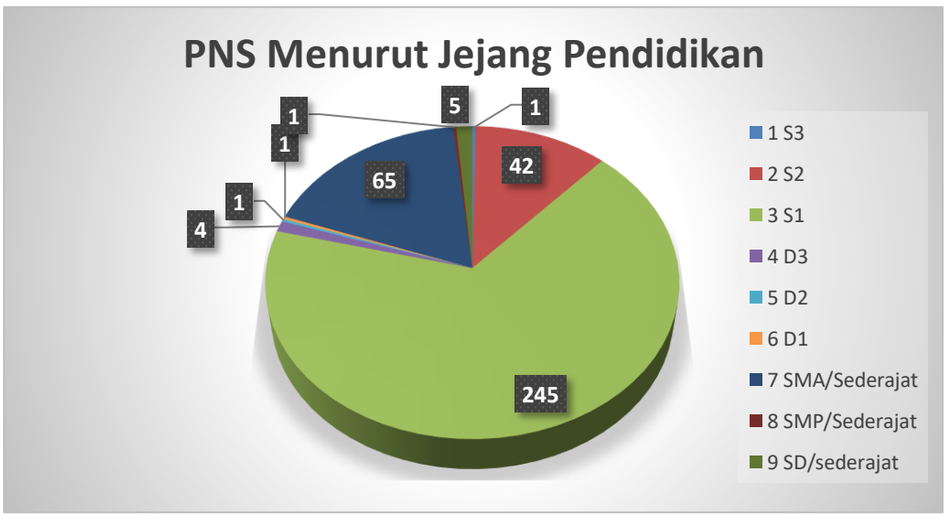
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	S3	1	0.27
2	S2	42	11.51
3	S1	245	67.12
4	D3	4	1.10
5	D2	1	0.27
6	D1	1	0.27
7	SMA/Sederajat	65	17.81
8	SMP/Sederajat	1	0.27
9	SD/sederajat	5	1.37
JUMLAH		365	100

(sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau)

Dari data pada tabel 2.2 diketahui bahwa pendidikan PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata 1 (S.1) yang berjumlah 245 orang atau 67,12% dan SMA/Sederajat berjumlah 65 orang atau 17,81 %. Jika dilihat dari PNS yang memiliki tingkat pendidikan S1, S2, dan S3 adalah sebanyak 288 orang atau 78,9% dari seluruh PNS Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Hal ini menggambarkan tingkat pendidikan pegawai negeri sipil Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah cukup baik. Secara sederhana dapat lihat gambar berikut ini:

Gambar 2.2

Keadaan PNS Dinas Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan



Tabel 2.3
Klasifikasi Pegawai menurut Golongan

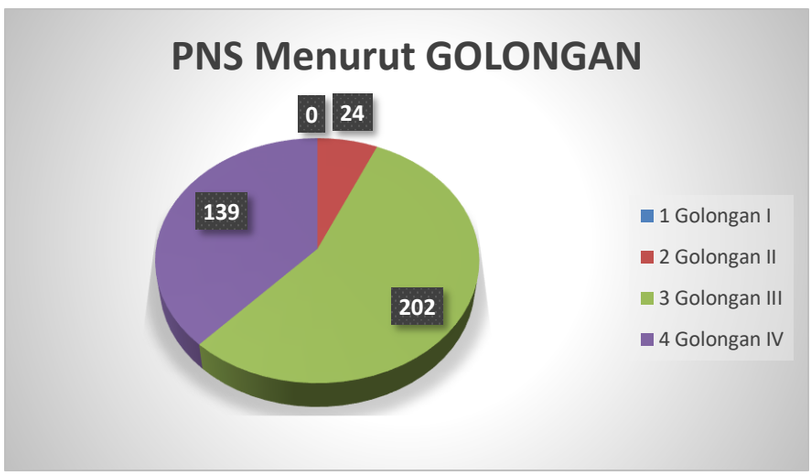
NO	GOLONGAN	JUMLAH	%
1	Golongan I	0	-
2	Golongan II	24	6,58
3	Golongan III	202	55,34
4	Golongan IV	139	38,08

(sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau)

Berdasarkan data pada tabel 2.3 diketahui bahwa PNS pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau didominasi oleh golongan III, yang berjumlah 202 atau 55,34% sedang golongan terkecil adalah golongan II yang berjumlah 24 orang atau 6,58%. Secara sederhana kondisi pegawai negeri sipil menurut golongan dapat dilihat gambar berikut ini:

Gambar 2.3

Keadaan PNS Dinas Pendidikan Menurut Golongan



2.2.1.2 Sumber Daya Guru

Berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang mulai berlaku tahun 2016, pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah yaitu SMA dan SMK dari kabupaten atau kota ke provinsi, resmi diberlakukan. Pengalihan kewenangan SMA dan SMK ini memerlukan koordinasi yang intensif antara pemerintah kabupaten atau kota dengan pemerintah provinsi. Adapun jumlah guru dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau adalah Sebagai berikut :

Tabel 2.4
Kondisi Guru SMA/SMK Lingkungan Dinas Pendidikan Bersadarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	KAB/KOTA	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	TOTAL
1	KAB. BENGKALIS	20	2	4	53	1.758	56	1	1.894
2	KAB. INDRAGIRI HILIR	34	1	6	31	1.131	41	1	1.245
3	KAB. INDRAGIRI HULU	6	1	3	14	1.033	83	-	1.140
4	KAB. KAMPAR	11	3	2	44	1.847	153	-	2.060
5	KAB. KEPULAUAN MERANTI	12	5	3	29	485	19	1	554
6	KAB. KUANTAN SINGINGI	1	-	-	17	1.070	70	1	1.159
7	KAB. PELALAWAN	10	-	-	7	868	79	-	964
8	KAB. ROKAN HILIR	14	2	4	67	1.550	31	-	1.668
9	KAB. ROKAN HULU	17	4	1	36	1.359	61	1	1.479
10	KAB. SIAK	8	3	1	27	1.290	71	2	1.402
11	KOTA DUMAI	8	2	1	33	735	41	-	820
12	KOTA PEKANBARU	29	2	5	79	3.203	394	2	3.714
T O T A L		170	25	30	437	16.329	1.099	9	18.099

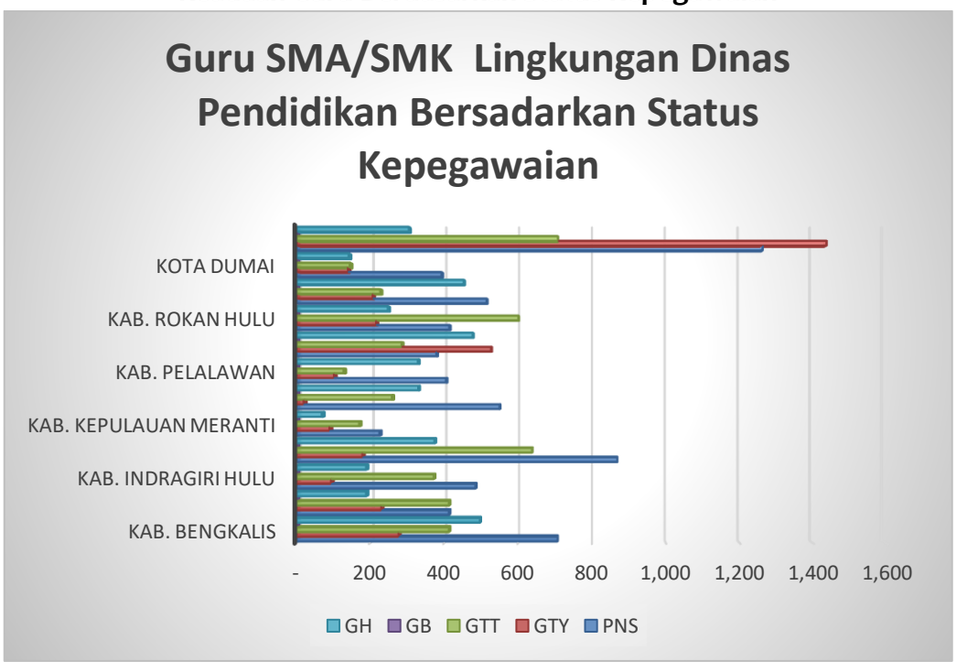
Dari data pada tabel 2.4 diketahui bahwa pendidikan Guru SMA/SMK Negeri dan Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata 1 (S.1) yang berjumlah 9.807 orang Sarjana Strata 2 (S.2) berjumlah 645 orang. Jika dilihat dari Guru yang memiliki tingkat pendidikan S1, S2, dan S3 adalah sebanyak 12.213 orang dari seluruh Guru SMA di Provinsi Riau. Hal ini menggambarkan tingkat pendidikan Guru SMA/SMK Provinsi Riau sudah cukup baik. Secara sederhana dapat lihat gambar berikut ini:

Tabel 2.5
Kondisi Guru SMA/SMK Lingkungan Dinas Pendidikan
Bersadarkan Statu Kepegawaian

NO	KAB/KOTA	PNS	GTY	GTT	GB	GH	TOTAL
1	KAB. BENGKALIS	707	277	413	-	497	1.894
2	KAB. INDRAGIRI HILIR	413	230	413	-	189	1.245
3	KAB. INDRAGIRI HULU	485	94	372	-	189	1.140
4	KAB. KAMPAR	869	179	638	-	374	2.060
5	KAB. KEPULAUAN MERANTI	225	90	170	-	69	554
6	KAB. KUANTAN SINGINGI	550	20	259	-	330	1.159
7	KAB. PELALAWAN	405	102	128	-	329	964
8	KAB. ROKAN HILIR	379	527	285	-	477	1.668
9	KAB. ROKAN HULU	414	216	601	-	248	1.479
10	KAB. SIAK	515	207	227	-	453	1.402
11	KOTA DUMAI	393	140	145	-	142	820
12	KOTA PEKANBARU	1.263	1.438	708	-	305	3.714
JUMLAH		6.618	3.520	4.359	-	3.602	18.099

Berdasarkan data pada tabel 2.5 diketahui bahwa Guru PNS di SMA/SMK negeri dan swasta pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau terbesar berada di Kota Pekanbaru berjumlah 1.263 orang dan Kab Kampar sejumlah 869 Orang. Guru Honor terbanyak berada di Kab Bengkalis dengan jumlah 497 dan Kab Rokan Hilir dengan jumlah 477 Orang. Berdasarkan data pada tabel 2.5 jumlah guru terbanyak berada di Kota Pekanbaru dan Kab Kampar.

Gambar 2.5
Keadaan Guru Berdasarkan Status Kepegawaian



Tabel 2.6
Kondisi Guru SMA Dinas Pendidikan Bersadarkan Status Mata Pelajaran

KUALIFIKASI GURU SMA (Mata Pelajaran)	JUMLAH
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	322
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	291
Bahasa Indonesia	437
Matematika	516
Sejarah Indonesia	35
Bahasa Inggris + Lintas Minat B. Inggris	425
Seni Budaya	125
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	190
Prakarya dan Kewirausahaan	18
Biologi	389
Fisika	340
Kimia + Lintas Minat Kimia	347
Geografi	184
Sejarah	217
Sosiologi	176
Ekonomi + Lintas Minat Ekonomi	448
Bahasa Asing lain	44
Bimbingan dan Konseling	151

Dapat dilihat dari Tabel 2.6 bahwa jumlah guru terbanyak adalah pada mata pelajaran Matematika yaitu sejumlah 516 orang diikuti dengan Guru Ekonomi dan Lintas Minat Ekonomi sejumlah 448 Orang dan Guru Bahasa Indonesia sebanyak 437 Orang.

Tabel 2.7
Kondisi Guru SMK Dinas Pendidikan Bersadarkan Status Mata Pelajaran

KUALIFIKASI GURU (Mata Pelajaran)	JUMLAH
NORMATIF	
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	89
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	102
Bahasa Indonesia	151
Seni Budaya	27
Sejarah Indonesia	24
Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	56
ADAPTIF	
Matematika	167
Bahasa inggris	143
Ekonomi	5
Bimbingan Konseling	54
Prakarya dan Kewirausahaan	33

PRODUKTIF	
A. Administrasi Perkantoran	42
B. Jurusan Akuntansi	99
C. Jurusan Pemasaran	21
D. Jurusan Usaha Perjalanan Wisata	6
E. Jurusan Teknik Komputer Jaringan	75
F. Jurusan Geomatika	2
G. Jurusan Kimia Industri	7
H. Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak	10
I. Jurusan Audio Video	41
J. Jurusan Teknik Elektronika Industri	4
K. Jurusan Teknik Gambar Bangunan	49
L. Jurusan Teknik Kendaraan Ringan	57
M. Jurusan Teknik Kontruksi Batu dan Beton	5
N. Jurusan Teknik Pemesinan	26
O. Jurusan Teknik Pengelasan	13
P. Jurusan Teknik Sepeda Motor	21
Q. Jurusan Teknik Perbaikan Bodi Otomotif	-
R. Jurusan Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	36
S. Jurusan Akomodasi Perhotelan	11
T. Jurusan Tata Busana	14
V. Jurusan Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	3
W. Jurusan Teknik Konstruksi Kayu	7
X. Jurusan Desain komunikasi Visual	3
Y. Jurusan Geologi Pertambangan	3
Z. Jurusan Agribisnis Tanaman Perkebunan	52
A1. Jurusan Teknik Pengolahan Hasil Pertanian	18
A2. Jurusan Budidaya Perikanan	12
A3. Jurusan Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman	15
A4. Jurusan Kriya Kayu	12
A5. Jurusan Teknik Mesin	10
A6. Jurusan Kriya Tekstil	9
A7. Jurusan Agrobisnis Perikanan	18
A8. Paket Keahlian	795

Tabel 2.8

Kondisi Guru SLB Lingkungan Dinas Pendidikan Bersadarkan Status Kepegawaian

NO	KAB/KOTA	PNS	GTY	GTT	GB	GH	TOTAL
1	KAB. BENGKALIS	12	39	5	0	5	61
2	KAB. INDRAGIRI HILIR	4	1	1	0	11	17
3	KAB. INDRAGIRI HULU	7	0	2	0	6	15
4	KAB. KAMPAR	9	0	11	0	7	27
5	KAB. KEPULAUAN MERANTI	5	6	11	0	8	30
6	KAB. KUANTAN SINGINGI	0	0	0	0	0	0
7	KAB. PELALAWAN	8	0	2	0	3	13
8	KAB. ROKAN HILIR	2	0	5	0	0	7
9	KAB. ROKAN HULU	3	10	14	0	5	32
10	KAB. SIAK	2	27	3	0	2	34
11	KOTA DUMAI	7	28	8	0	12	55
12	KOTA PEKANBARU	46	62	11	0	13	132
JUMLAH		105	173	73	0	72	423

2.2.2 Sumber daya Aset

Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan publik sektor pendidikan selain didukung oleh personil Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diuraikan di atas, didukung juga oleh fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional (yang merupakan aset daerah), sebagaimana daftar dibawah ini :

Tabel 2.9

Rekapitulasi Aset/Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Provinsi Riau

2.2.2.1 Aset Tanah

NO	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Penggunaan
1	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	2.732	1982	JL. Hangtuah Kel. Suka Mulya Kec. Sail Pekanbaru	-
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	600	2009	Jl. Cemara Pekanbaru	-
3	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1.174	1982	Jl. Sultan Syarif Qasim Pekanbaru	-
4	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	21.680	1964	Jl. Cendrawasih Dumai	SMKN Perikanan Provinsi Riau
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.550	1982	Jl. Suka TERUS	Gedung Graha / Mes Wisma Handayani
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8.360	1999	Jl. Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru	Dinas Pendidikan
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.021	1999	Jl. Dr. Sutomo Pekanbaru	BPG
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.740	2009	Jl. Sukaterus No. 3 Pekanbaru	BTP dan BPKB
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6.305	1995	Jl. Jend. Sudirman Simpang Tiga Pekanbaru	Gedung Guru
10	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	-	1963	JL. KUBANG RAYA	SMAN Plus
11	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	14.345	1963	JL. SEGAR REJOSARI KEC. TENAYAN RAYA	SLB
12	Tanah Lapangan Tenis	2.730	1982	Jl. Suka Terus Kec. Jadirejo Sukajadi Pekanbaru	SMA Handayani
13	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	-	2007	Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru	Gedung Autis
14	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	3.385	2004	Kec. Marpoyan Damai Kel. Wonorejo Pekanbaru	Gedung Sekolah SMP
15	Tanah Lapangan Tenis	1.480	1963	JL. DR. SUTOMO	Lapangan Tenis
16	Tanah Kosong Lainnya	2.370	1977	JL. DR. SUTOMO	

2.2.2.2 Aset Barang

No	Nama Barang	Jumlah	No	Nama Barang	Jumlah
1	Mobil Operasional Avanza	5	45	Mesin Obras	176
2	Mobil Operasional Mini Bus	2	46	Mesin FAX	6
3	Mobil Operasional Nissan / Double cabin	7	47	Mesin Bor	33
4	Mobil Operasional L 300	1	48	Mesin Kompresor	42
5	AC	558	49	Pompa Air	125
6	Alat labor	238	50	Mixer Sound	24
7	Alat Labor SMA	3.957	51	Racun Api	115
8	Amplifire	51	52	Pena Pintar	24
9	Alat Peraga SLB	75	53	Meat Grinder	8
10	Alat Peraga SMK	654	54	Meat Slicer	7
11	CCTV	64	55	Meja Guru	417
12	Fotocopy	21	56	Meja siswa	2.658
13	Freezer	5	57	Kursi Guru	445
14	Genset	41	58	Kursi Siswa	2.433
15	External Hardisk	45	59	Kursi Staf	278
16	Dispenser	106	60	Meja Staf	156
17	DVR CCTV	12	61	Kursi Kepala Sekolah	26
18	Finger Print	77	62	Kursi Wakil Kepala Sekolah	1
19	Infokus /Proyektor	926	63	Meja Kepala Sekolah	18
20	Kamera	97	64	Meja Wakil Kepala Sekolah	8
21	Kipas Angin	450	65	Filling Kabinet	216
22	Komputer Server	308	66	Brankas	18
23	P.C Unit	2.094	67	Sofa	75
24	UPS	740	68	Lemari	489
25	Stabilizer	569	69	Lemari Arsip	297
26	Printer	1.712	70	Rak Buku	108
27	HUB	64	71	Sensor Cahaya	7
28	Kulkas	30	72	Sensor For GreenHouse	6
29	Laptop	932	73	sensor kelembapan	6
30	Note Book	814	74	Sensor Konduktivitas	6
31	Scanner	52	75	Sensor Pendeteksi Gas	9
32	Router	195	76	Sensor PH	9
33	Modem	15	77	Sensor Temperatur	10
34	Monitor	155	78	Sensor UltraViolet	6
35	Handycam	15	79	Sensor warna	3
36	GPS	7	80	Soil Hardness Meter	18
37	Mesin Potong Kertas	30	81	Soil Nutrient Analyzer	18
38	Mesin potong rumput	79	82	Soil Tensiometer	18
39	Switch Jaringan	209	83	Soil Water Potential Locator	17
40	Vacum Cleaner	43	84	Fortigate	1
41	Vacum Packing Machine	7	85	greenhouse with fogging and	6
42	Radio HT	43	86	Drone	2
43	Mesin Bordir	275	87	Plant Nutrition Analyzer	20
44	Mesin Jahit	307	88	Portable Leaf Area Meter	4

Jumlah Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau

NO	KABUPATEN	SMA			SMK			SLB		
		N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML
1	BENGKALIS	34	11	45	15	11	26	2	7	9
2	INDRAGIRI HILIR	23	21	44	8	11	19	1	1	2
3	INDRAGIRI HULU	21	6	27	11	5	16	1	0	1
4	KAMPAR	42	8	50	11	18	29	4	0	4
5	KEPULAUAN MERANTI	16	7	23	2	5	7	1	3	4
6	KUANTANSINGINGI	21	0	21	12	1	13	1	0	1
7	KAB. PELALAWAN	19	4	23	8	9	17	2	0	2
8	KAB. ROKAN HILIR	37	27	64	6	20	26	1	2	3
9	KAB. ROKAN HULU	29	6	35	21	17	38	1	0	1
10	KAB. SIAK	31	4	35	12	14	26	1	2	3
11	KOTA DUMAI	7	8	15	7	10	17	1	2	3
12	KOTA PEKANBARU	18	42	60	10	51	61	1	13	14
JUMLAH		298	144	442	123	172	295	17	30	47

Sumber :DAPODIK (dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id)

Dari data di Tabel 2.7 jumlah Sekolah SMA Terbanyak ada di Kabupaten Rokan Hilir sejumlah 64 Sekolah diikuti Kota Pekanbaru sejumlah 60 Sekolah. Jumlah SMK terbanyak ada di Kota Pekanbaru sejumlah 61 Sekolah di ikuti oleh Kabupaten Rokan Hulu 38 Sekolah.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pendidikan memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan untuk mencapai Misi Gubernur dibidang pendidikan yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang beriman,berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya. Karena melihat pentingnya dalam pembangunan Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah melakukan berbagai upaya untuk terus menerus meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Berikut adalah Capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau sampai dengan tahun 2018 :

2.3.1 Kinerja Pendidikan Terhadap Indikator RPJMD

a. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah tahun 2013-2017 Provinsi Riau memiliki trend meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,12% per tahun. Pencapaian angka rata-rata lama sekolah Provinsi Riau hingga tahun 2017 yaitu 8,76 tahun masih dibawah wajib belajar 9 tahun. Namun demikian, pencapaian angka rata-rata lama sekolah Provinsi Riau lebih baik dibandingkan Nasional 8,10 tahun. Oleh karena itu, upaya peningkatan angka rata-rata lama sekolah minimal 9 tahun menjadi prioritas pembangunan sumberdaya manusia di Provinsi Riau kedepannya melalui program peningkatan wajib belajar 15 tahun dan didukung pendidikan

universal. Terdapat 7 kabupaten yang perlu mendapatkan prioritas utama dalam peningkatan RLS karena berada dibawah rata-rata RLS Provinsi yaituKabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti, lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Gambar 2.3

Tabel 2.3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Riau Tahun 2013-2017

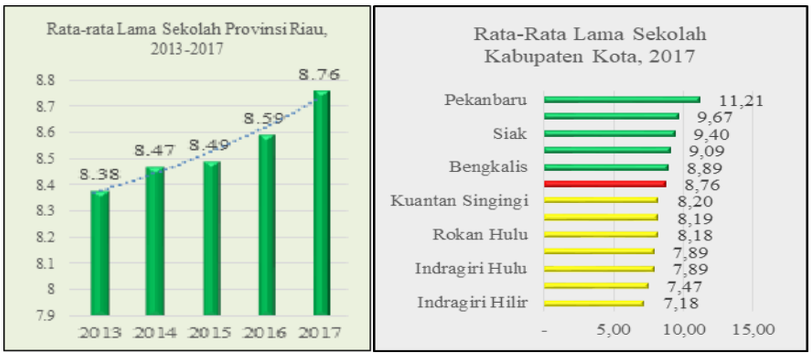
No	Provinsi	Angka Rata-Rata Lama Sekolah					Pertumbuhan/ Tahun(%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Kuantan Singingi	7,70	8,17	8,18	8,19	8,20	1,62
2	Indragiri Hulu	7,46	7,55	7,82	7,83	7,89	1,42
3	Indragiri Hilir	6,74	6,81	6,82	6,94	7,18	1,60
4	Pelalawan	7,74	7,82	8,17	8,18	8,19	1,44
5	Siak	8,81	9,05	9,20	9,21	9,40	1,64
6	Kampar	8,62	8,62	8,84	8,85	9,09	1,34
7	Rokan Hulu	7,38	7,83	7,84	7,97	8,18	2,63
8	Bengkalis	8,76	8,80	8,82	8,83	8,89	0,37
9	Rokan Hilir	7,42	7,62	7,62	7,88	7,89	1,56
10	Kepulauan Meranti	7,33	7,44	7,45	7,46	7,47	0,48
11	Pekanbaru	10,93	10,95	10,97	11,20	11,21	0,64
12	Dumai	9,54	9,56	9,57	9,58	9,67	0,34
13	Riau	8,38	8,47	8,49	8,59	8,76	1,12

Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2018

Pada tahun 2017 capaian rata-rata lama sekolah Provinsi Riau adalah sebesar 8,76. Ini berarti bahwa rata-rata penduduk usia 15 tahun hanya mampu sekolah sampai kelas 9 semester I atau tidak tamat SMP. Keadaan ini menunjukkan bahwa program wajib belajar 9 tahun belum sepenuhnya dapat dicapai.Peningkatan rata-rata lama sekolah yang dicapai Provinsi Riau ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan baik kebijakan nasional, kebijakan pemerintahan provinsi dan kebijakan pemerintahan Kabupaten/Kota. Namun demikian kebijakan itu perlu dioptimalkan sehingga dapat mencapai target kebijakan wajib belajar 9 tahun.

Gambar 2.3 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2017



Berdasarkan keadaan tersebut diatas, menunjukkan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Indragiri Hilir adalah terendah di Provinsi Riau. Namun demikian kebijakan wajib belajar 9 tahun tetap harus didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau walaupun pendidikan dasar merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota terutama pada kabupaten/kota yang rata-rata lama sekolahnya masih dibawah provinsi kedepannya haruslah menjadi prioritas.

b. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Perkembangan angka harapan lama sekolah tahun 2013-2017 Provinsi Riau memiliki trend meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,52% per tahun. Pencapaian angka rata-rata harapan lama sekolah Provinsi Riau hingga tahun 2017 yaitu 13,03 tahun sudah di atas wajib belajar 9 tahun. Berdasarkan Gambar 2.51 menunjukkan bahwa terdapat tiga wilayah yang AHL nya lebih tinggi dari rata-rata AHL provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Kuansing dan Kabupaten Kampar masing-masing 14,93 tahun, 13,26 tahun dan 13,20 tahun. Halnya ini sejalan dengan jumlah penduduk yang berumur 19-24 tahun yang melanjutkan ke perguruan tinggi dimana Kota Pekanbaru, Kuansing dan Kampar menjadi urutan tertinggi dari jumlah penduduknya yang masuk perguruan tinggi yang dijelaskan pada Tabel 2.4 dan Gambar 2.4.

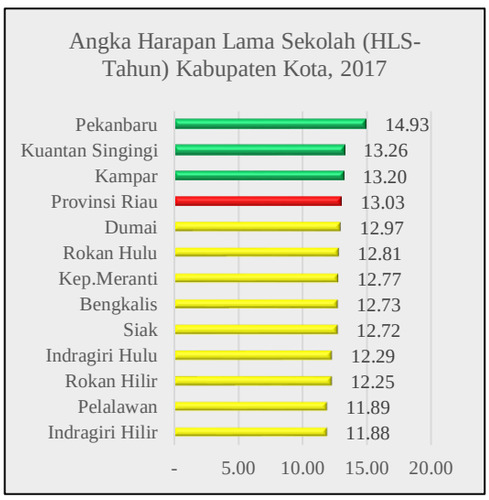
Tabel 2.4. Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Riau Tahun 2013-2017

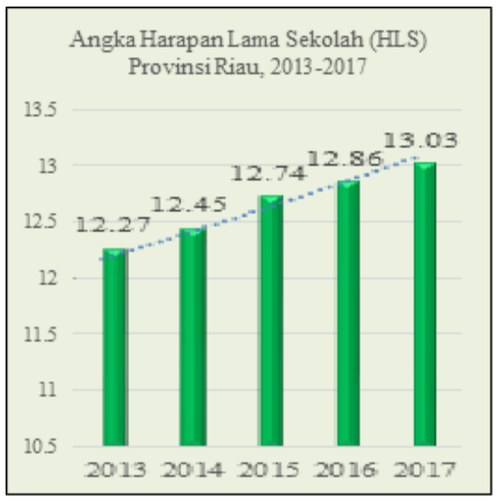
No	Provinsi	Angka Harapan Lama Sekolah					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Kuantan Singingi	11,79	11,96	12,64	12,81	13,26	3,00
2	Indragiri Hulu	11,29	11,51	11,92	12,24	12,29	2,15
3	Indragiri Hilir	10,5	10,67	11,38	11,58	11,88	3,16
4	Pelalawan	10,84	11,02	11,56	11,68	11,89	2,35

No	Provinsi	Angka Harapan Lama Sekolah					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
5	Siak	11,64	11,81	12,26	12,56	12,72	2,25
6	Kampar	12,51	12,72	12,86	12,87	13,20	1,36
7	Rokan Hulu	12,09	12,36	12,39	12,59	12,81	1,46
8	Bengkalis	12,22	12,35	12,39	12,72	12,73	1,03
9	Rokan Hilir	11,06	11,42	11,75	12,06	12,25	2,59
10	Kepulauan Meranti	12,23	12,34	12,41	12,74	12,77	1,09
11	Pekanbaru	13,93	14,07	14,86	14,87	14,93	1,77
12	Dumai	12,27	12,4	12,46	12,75	12,97	1,40
13	Riau	12,27	12,45	12,74	12,86	13,03	1,52

Sumber: BPS Provinis Riau Tahun 2018

Selanjutnya bila dilihat sebaran capaian angka haparan lama sekolah pada tahun 2017 seperti terlihat pada Gambar 2.4, terdapat 8 Kabupaten yang capaiannya di bawah rata-rata Provinsi yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir Kepulauan Meranti dan Kota Dumai.





Gambar 2.4. Harapan Lama Sekolah (Thn) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2017

C. Rasio Ketersediaan Sekolah dengan Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan sekolah pada dasarnya adalah sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan. Ketersediaan sekolah ditunjukkan dengan banyaknya ruang kelas yang tersedia untuk menampung penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan dengan rasio sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan.

Data memperlihat bahwa di Provinsi Riau rasio ketersediaan sekolah untuk tingkat SD/MI pada tahun 2017 adalah 25,17 sementara standar pelayanan minimum berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 untuk SD/MI paling banyak 28 orang dan paling sedikit 20 orang. Ini berarti bahwa pada tingkat Provinsi Riau rasio ketersediaan sekolah sudah baik karena masih di bawah standar pelayanan minimum yang ditetapkan. Namun demikian dilihat sebarannya pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, terdapat Kabupaten yang belum mencapai standar pelayanan minimum yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Hal ini disebabkan tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk dengan pertambahan ruangan kelas untuk SD. Oleh sebab itu dalam upaya untuk mensuksekan wajib belajar 9 tahun kebijakan terhadap kedua kota tersebut adalah penambahan ruangan kelas atau menambah sekolah baru untuk memenuhi SPM yang telah ditetapkan.Adapun rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah di Provinsi Riau pada tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.5. Rasio Ketersediaan Sekolah dengan Penduduk Usia SekolahTahun 2017

Kabupaten	Penduduk Usia (7-12)	Jumlah Ruangan Kelas	Rasio	Penduduk Usia (13-15)	Jumlah Ruangan Kelas	Rasio	Penduduk Usia (16-18)	Jumlah Ruangan Kelas	Rasio
Kuantan Singingi	38.589	1.925	20,05	18.990	618	30,73	15.847	485	32,67
Indragiri Hulu	54.326	3.555	15,28	25.029	824	30,38	21.722	573	37,91
Indragiri Hilir	93.663	2.498	37,50	37.369	675	55,36	41.380	496	83,43
Pelaawan	48.306	1.981	24,38	20.351	516	39,44	18.151	484	37,50
Siak	57.567	2.305	24,97	28.527	871	32,75	24.547	728	33,72
Kampar	96.278	3.944	24,41	45.560	1.124	40,53	44.895	926	48,48
Rokan Hulu	71.138	3.032	23,46	31.446	869	36,19	25.560	705	36,26
Bengkalis	72.102	2.987	24,14	36.882	1.046	35,26	35.879	921	38,96
Rokan Hilir	84.961	3.462	24,54	40.058	964	41,55	41.500	892	46,52
Kep. Meranti	24.403	1.209	20,18	11.777	277	42,52	10.586	273	38,78
Pekanbaru	112.817	3.305	34,14	53.764	1.389	38,71	58.286	1.779	32,76
Dumai	35.250	1.157	30,47	15.947	428	37,26	14.747	430	34,30
Riau	789.400	31.360	25,17	365.700	9.601	38,09	353.100	8.692	40,62

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2018

Selanjutnya ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah SLTP di Provinsi Riau tahun 2017 sebesar 38,09.Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 ditetapkan SPM paling sedikit 20 dan paling banyak32. Keadaan ini

memperlihatkan bahwa rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah belum memenuhi SPM yang sudah ditetapkan.

Bila dilihat sebarannya pada Kabupaten/Kota yang belum memenuhi SPM SMP/MTs adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan,Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kab. Kep. Meranti, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Untuk memenuhi SPM berdasarkan Permendikbud tersebut kebijakan yang harus dilakukan adalah menambah ruangan kelas dalam rangka untuk mencapai target wajib belajar 9 tahun.

Kemudian pada tingkat SLTA, ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah SLTA di Provinsi Riau pada tahun 2017 sebesar 40,62 sedangkan SPM SMA/MA/SMK yang ditetapkan berdasarkan Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 adalah sebesar 15 orang paling sedikit dan 36 orang paling banyak. Keadaan ini menggambarkan ketersediaan sekolah SLTA di Provinsi Riau saat ini masih jauh dari SPM yang sudah ditetapkan. Dilihat dari sebarannya pada Kabupaten/Kota yang belum mencapai mencapai standar adalah Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kep. Meranti. Melihat rasio ketersediaan sekolah di atas, jika Pemerintah Provinsi Riau melakukan kebijakan wajib belajar 12 tahun dengan asumsi pendudukan usia sekolah 16-18 semuanya sekolah maka untuk mencapai SPM diperlukan penambahan ruang kelas sebanyak 59,38 persen lagi.

D. Rasio Guru Dengan Murid

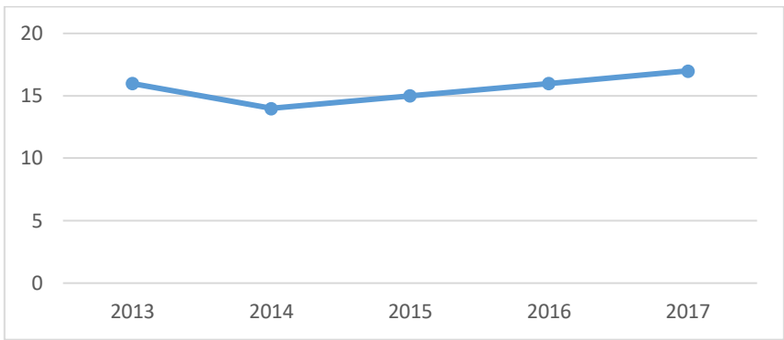
Perbaikan mutu pendidikan dan perluasan akses terhadap pendidikan menengah akan memerlukan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik. Salah satu faktor yang menentukan mutu pendidikan adalah ketersediaan guru yang cukup untuk melayani siswa pada berbagai tingkatan pendidikan. Oleh sebab itu rasio antara guru dan murid haruslah berada dalam jumlah yang ideal. Pada tingkat pendidikan dasar di Provinsi Riau rasio antara jumlah guru dan murid dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan Gambar 2.5.

Tabel 2.6 Rasio Guru dengan Murid Sekolah Pendidikan Dasar di Provinsi Riau Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan /Tahun (%)
1	Pendidikan Dasar						
1.1.	Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs).	60.800	72.315	70.205	67.598	47.295	-4,43
1.2.	Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs)	942.972	1.037.232	1.054.808	1.060.115	798.229	-3,13

1.3.	Rasio Guru dan Murid Pendidikan Dasar	16	14	15	16	17	1,89

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2017



Gambar 2.5. Rasio Guru dengan Murid Pendidikan Dasar di Provinsi Riau Tahun 2013-2017

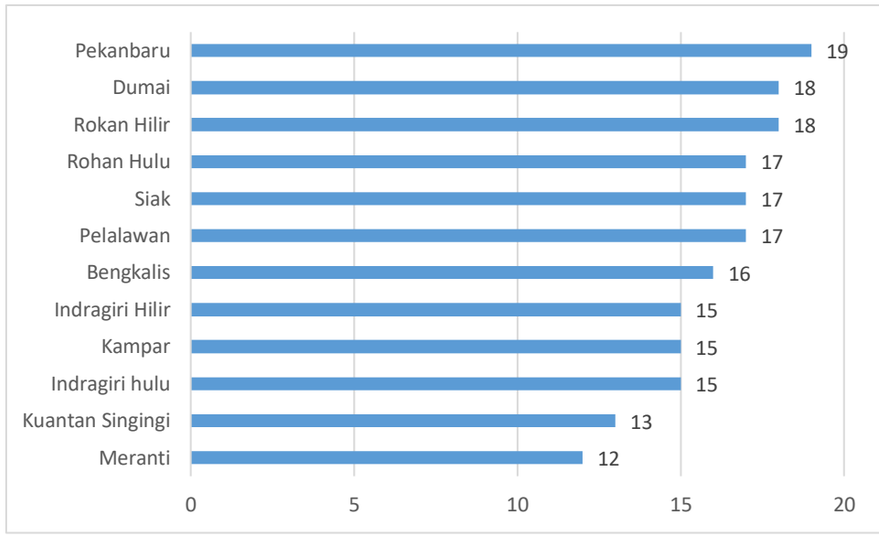
Selama kurun tahun 2013-2017 jumlah guru SD/MI+SMP/MTs menunjukkan kecendrungan menurun pada masa 3 tahun terakhir. Seiring dengan itu, jumlah murid selama kurun tahun yang sama juga cenderung menurun. Sedangkan rasio antara guru dengan murid cenderung meningkat pada masa 4 tahun terakhir. Namun demikian secara umum rasio antara guru dengan murid pendidikan dasar masih telah melampaui standar pelayanan minimum menurut Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 yakni 1:32. Hal ini menunjukkan bahwa rasio antara guru dan murid pendidikan dasar di Provinsi Riau sudah memadai.

Kemudian dilihat dari sebarannya pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Riau seperti Tabel 2.7 dan Gambar 2.6.

Tabel 2.7. Rasio Guru dengan Murid Sekolah Pendidikan Dasar Menurut kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Pendidikan Dasar		
		Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs)	Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs)	Rasio Guru dan Murid Pendidikan Dasar
1	Kuantan Singingi	4.167	52.592	12,62
2	Indragiri Hulu	6.443	97.074	15,07
3	Indragiri Hilir	4.965	76.591	15,43
4	Pelalawan	3.981	67.729	17,01
5	Siak	4.749	81.091	17,08
6	Kampar	8.772	132.919	15,15
7	Rokan Hulu	5.772	98.976	17,15
8	Bengkalis	6.466	102.991	15,93
9	Rokan Hilir	6.208	110.311	17,77
10	Kep. Meranti	2.342	27.765	11,86
11	Pekanbaru	8.442	161.819	19,17
12	Dumai	2.887	51.365	17,79
Jumlah		**65.194**	**1.061.223**	**16,28**

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2017



Gambar 2.6. Sebaran Rasio Guru dengan Murid Pendidikan Dasar pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2017

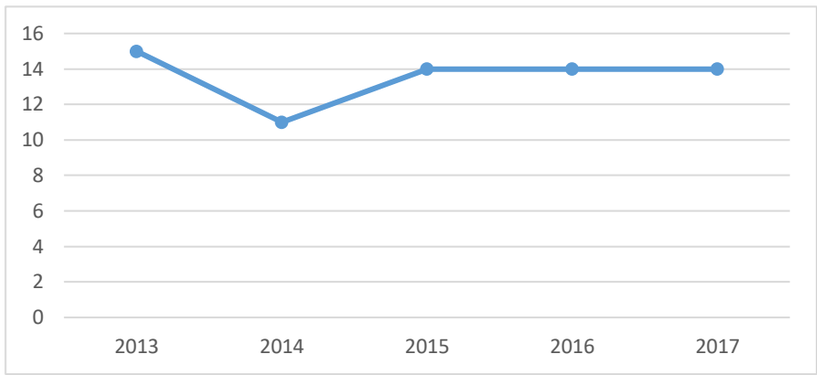
Grafik di atas memperlihatkan bahwa sebaran rasio guru dengan murid pendidikan dasar pada Kabupaten/Kota sedikit bervariasi. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah yang rasio guru dan murid paling rendah sementara Kota Pekanbaru dengan rasio guru dan murid paling tinggi. Secara keseluruhan semua Kabupaten/Kota di Provinsi Riau rasionya masih belum melampaui standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Permendikbud 23 Tahun 2013. Namun demikian rasio guru dan murid yang terlalu rendah juga akan dapat menganggu efesiensi.

Sama halnya dengan rasio guru dengan murid pendidikan dasar pada pendidikan menengah selama kurun tahun 2013-2017 juga berfluktuasi, dengan kecenderungan meningkat pada 3 tahun terakhir. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Gambar 2.7.

Tabel 2.8Rasio Guru dengan Murid SMA/SMK/MA
di Provinsi Riau Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan /Tahun (%)
1	Pendidikan Menengah						
1.1.	Jumlah Guru (SMA/SMK/MA).	13.020	18.703	16.045	16.809	17.451	9,50
1.2.	Jumlah Murid (SMA/SMK/MA)	198.677	212.945	217.031	233.206	244.122	5,31
1.3.	Rasio Guru dan Murid Pendidikan Menengah	15	11	14	14	14	0,15

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Riau



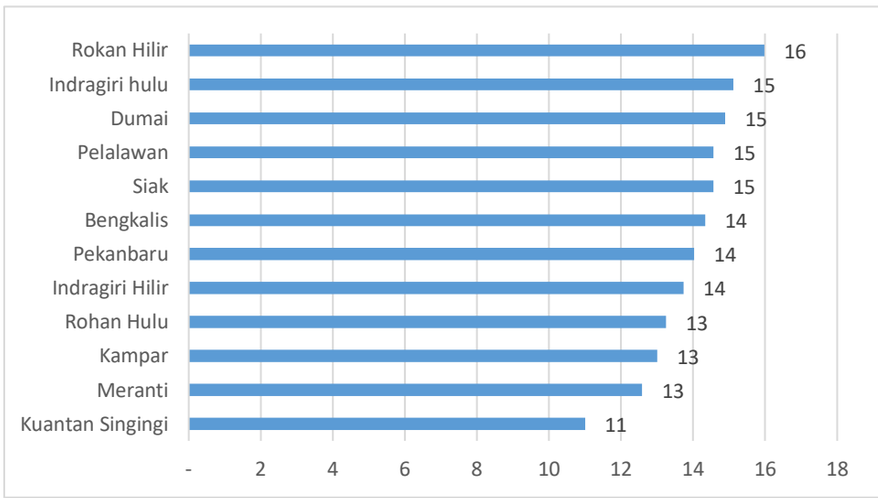
Gambar 2.7 Rasio Guru dengan Murid Pendidikan Menengahdi Provinsi Riau Tahun 2013-2017

Data di atas memperlihatkan bahwa jumlah murid sekolah menengah selama kurun tahun 2013-2017 menunjukkan kecenderung yang meningkat rata-rata 5,31 persen per tahun. Sementara itu jumlah guru selama kurun tahun yang sama menunjukkan trend yang berfluktuasi. Kondisi yang demikian diikuti dengan capaian rasio antara guru dengan murid yang juga berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada masa 3 tahun terakhir. Walaupun demikian rasio yang dicapai selama kurun tahun yang sama tidak ada yang melampaui standar pelayanan minimum.

Tabel 2.9. Rasio Guru dengan Murid Sekolah Menengah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Sekolah Menengah		
		Jumlah Guru (SMA/SMK/MA)	Jumlah Murid (SMA/SMK/MA)	Rasio Guru dan Murid Pendidikan Menengah
1	Kuantan Singingi	1.149	12.639	11
2	Indragiri Hulu	1.180	17.838	15
3	Indragiri Hilir	1.062	14.588	14
4	Pelalawan	936	13.638	15
5	Siak	1.355	19.730	15
6	Kampar	1.949	25.345	13
7	Rokan Hulu	1.418	18.789	13
8	Bengkalis	1.797	25.758	14
9	Rokan Hilir	1.640	26.199	16
10	Kep. Meranti	551	6.937	13
11	Pekanbaru	3.574	50.153	14
12	Dumai	840	12.508	15
Jumlah		**17.451**	**244.122**	**14**

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2018



Gambar 2.8. Rasio Guru dengan Murid Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2017

Mencermati data di atas terlihat bahwa tidak terdapat variasi yang tajam pada rasio guru dengan murid tingkat sekolah menengah diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah yang rasio guru dan murid sekolah menengah tertinggi sementara Kabupaten Kuantan Singgi terendah. Secara keseluruhan rasio guru dengan murid sekolah menengah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sudah memenuhi standar pelayanan minimun.

2.3.2Indikator Kinerja Terhadap Perubahan Renstra 2014-2019 Dinas Pendidikan Provinsi Riau

2.3.2.1 Peningkatan Akses Pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Sederajat

Indikator APK SMA/MA Sederajat digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran pemerataan dan akses pendidikan menengah, dicapai melalui program pendidikan menengah, dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\frac{\text{Jumlah siswa SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 } - \text{ 18 Tahun}} X\ 100\%$$

Tabel 2.10
Capaian Kinerja APK Sekolah Menengah Sederajat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	6	7	8	6	7	8
Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	APK SMA / SMK/MA/Paket C	78.30%	81.39%	103.95%	93,41%	82,54%	88,36%

Meningkatnya Aksesibilitas dan mutu pendidikan menengah merupakan sasaran strategis untuk mendukung tercapaiannya tujuan tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah. Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui IKU "APK Provinsi SMA/MA/SMK/SMLB/Paket C".

Kinerja tahun 2017 sebesar 103,69%, jika dibanding dengan capaian tahun 2018 yaitu 88,36% terjadi penurunan sebesar 15,59%, begitu juga dengan realisasi APK Sekolah Menengah sederajat mengalami kenaikan dari 81.39% di tahun 2017 meningkat menjadi 82,54% di tahun 2018.

Sesuai dengan target perubahan rencana strategis 2015-2019, pada tahun 2018 atau tahun ketiga periode perubahan rencana strategis 2017-2019 APK SMA/MA/SMK/SMLB/Paket C ditargetkan mencapai 93,41%. Dari target yang ditetapkan pada tahun 2018 berhasil mencapai 82,54%. Dengan data capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis meningkatnya akses layanan pendidikan menengah pada tahun 2018 berhasil dicapai.

APK Nasional Sekolah Menengah sederajat Tahun 2018 sebesar 88,55%. Jika dibandingkan dengan capaian APK Nasional tersebut, maka dengan realisasi sebagaimana data tersebut dibawah sebesar 6,01%, APK Sekolah Menegah Provinsi Riau masih berada dibawah angka rata-rata Nasional.

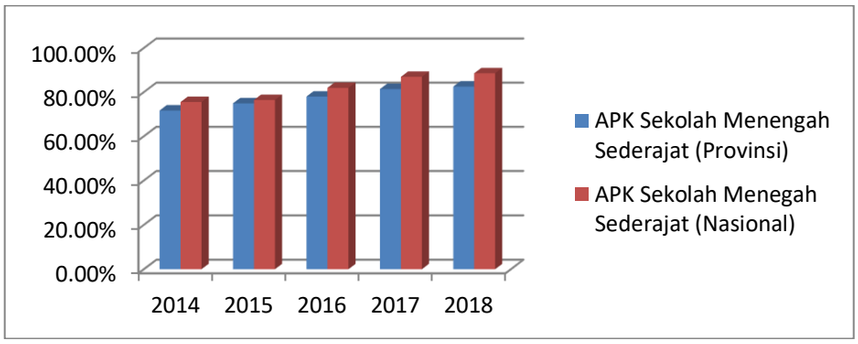
Berikut tren pencapaian angka partisipasi kasar APK SMA/SMK/SMLB/Paket C Provinsi Riau dan nasional lima tahun terakhir terlihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2.11
Perbandingan Perkembangan APK Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2014 – 2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
APK Sekolah Menengah Sederajat (Provinsi)	71,69%	74,92%	77,97%	81,39%	82,54%
APK Sekolah Menegah Sederajat (Nasional)	75,53%	76,45%	81,95%	86,94%	88,55%

Sumber : Data Referensi Kemendikbud (updating bulan Maret 2018)

Grafik 2.9
Perbandingan Perkembangan APK Sekolah Menengah Sederajat
Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2014 – 2018



Sumber : Data Referensi Kemendikbud (updating bulan Maret 2018)

Dari tabel dan grafik tersebut diatas terlihat bahwa baik APK provinsi maupun APK nasional mengalami kenaikan tiap tahunnya tetapi APK SM Sederajat Provinsi masih dibawah rata-rata Nasional. Di tahun 2014 APK Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau lebih rendah 3,84% dari rata-rata APK Sekolah Menengah Sederajat Nasional. Tahun 2015 APK Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau lebih rendah 1,53% dari rata-rata APK Sekolah Menengah Sederajat Nasional. Tahun 2016 APK Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau lebih rendah 3,96% dari rata-rata APK Sekolah Menengah Sederajat Nasional. Tahun 2017 APK Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau lebih rendah 5,55% dari rata-rata APK Sekolah Menengah Sederajat Nasional. Tahun 2018 APK Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau lebih rendah 6,01% dari rata-rata APK Sekolah Menengah Sederajat Nasional.

Tabel dan grafik berikut menggambarkan kondisi capaian APK Sekolah Menegah Sederajat di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau tahun 2018.

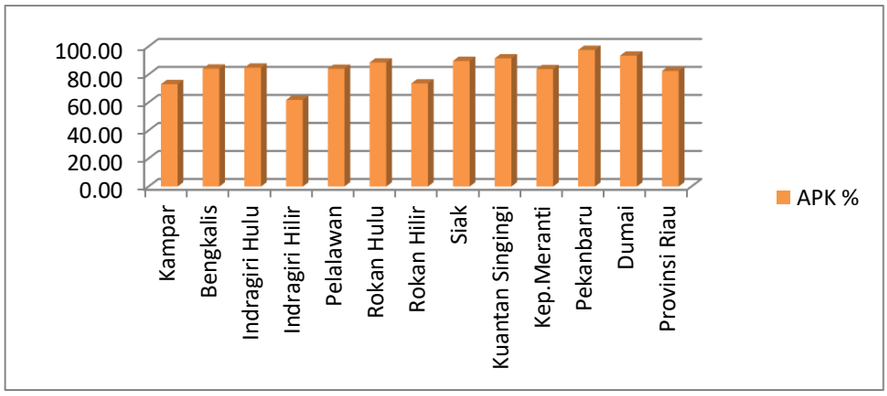
Tabel 2.11
APK Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten Kota
se Provinsi Riau Tahun 2018

NO	Kab/Kota	Jumlah Penduduk 16-18	Jumlah Siswa	APK %
1	2	3	4	6
1	Kampar	45,506	33,255	73,08
2	Bengkalis	36,369	30,62	84,19
3	Indragiri Hulu	22,018	18,688	84,88
4	Indragiri Hilir	41,934	25,921	61,81
5	Pelalawan	18,397	15,466	84,07
6	Rokan Hulu	25,907	22,933	88,52

7	Rokan Hilir	42,068	30,964	73,6
8	Siak	24,880	22,307	89,66
9	Kuantan Singingi	16,062	14,697	91,5
10	Kep.Meranti	10,730	8,996	83,84
11	Pekanbaru	59,080	57,614	97,52
12	Dumai	14,949	13,967	93,43
Provinsi Riau		**357,900**	**295,428**	**82,54**

Sumber : Data Referensi Kemdikbud

Grafik 2.10
APK Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten Kota se Provinsi Riau Tahun 2018



Tabel 2.11 dan grafik 2.10 tersebut menunjukkan ada 4 (empat) Kabupaten/Kota yang capaian APK berada dibawah rata-rata APK Provinsi, yaitu Kabupaten Pelalawan (80,80%), Kabupaten Rokan Hilir (74,03%), Kabupaten Kampar (71,61%), dan Kabupaten Indragiri Hilir (62,63%), dengan capaian terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan demikian intervensi pembangunan pendidikan dalam rangka mencapai sasaran strategis pemerataan dan akses layanan pendidikan menengah Kabupaten Indragiri Hilir mendapat prioritas utama.

b. Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Sederajat.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia

sekolah dapat bersekolah tepat waktu. APM dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah siswa SMA/MA/SMK/Paket C Usia 16 – 18 Th}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 – 18 Tahun}} \text{ X } 100\%$$

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Sederajat digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran pemerataan dan akses pendidikan menengah, dicapai melalui program pendidikan menengah dan program pembangunan sekolah terpadu, dengan kegiatan antara lain pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan unit sekolah baru.

Untuk mengukur ketercapaian indikator ini diperlukan data Jumlah siswa Sekolah Menengah Sederajat Usia 16-18 Tahun dan jumlah penduduk usia 16 – 18 Tahun. Indikator APK SM Sederajat diperoleh dengan cara membagi Jumlah siswa SM Sederajat Usia 16-18 Tahun dengan jumlah penduduk usia 16 – 18 Tahun dikalikan 100%.

Berdasarkan data dari Data Referensi Pendidikan Kemendikbud RI, Tahun 2018 siswa SM Sederajat Usia 16-18 Tahun di Provinsi Riau berjumlah 228,384 dan jumlah penduduk berusia 16–18 Tahun berjumlah 357.900 jiwa, dengan demikian APM SM sederajat Provinsi Riau adalah 63,81%. Dan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12
APM Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten Kota
se Provinsi Riau Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	6	7	8	6	7	8
Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	APM SM Sederajat	62,92%	60,22%	95,71%	70,43%	63,81%	90,60%

Data Capaian kinerja tersebut diatas menggambarkan bahwa realisasi indikator APM SM Sederajat mengalami kenaikan sebesar 3,59%, dari 60,22% di Tahun 2017 menjadi 63,81% di Tahun 2018, sedangkan capaian kinerja Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 5,11%. Target APM SM Sederajat yang ditetapkan sebesar 70,43% belum tercapai, masih terdapat selisih yang cukup tinggi yaitu sebesar 6,62%. Belum tercapainya target APM yang ditetapkan, bisa terjadi karena kegiatan yang direncanakan untuk meningkatkan capaian angka partisipasi murni tidak terlaksana dan target yang ditetapkan tidak didasarkan pada realisasi tahun sebelumnya.

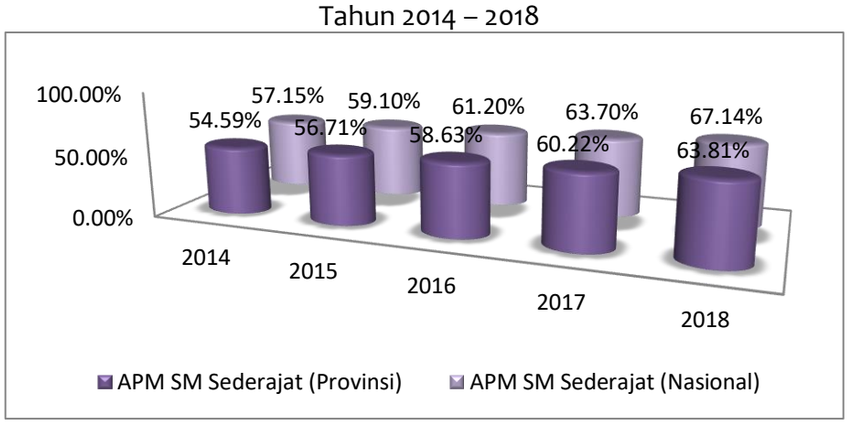
Tabel dan grafik dibawah ini menggambarkan tren pencapaian angka partisipasi Murni SM Sederajat Provinsi Riau dan nasional lima tahun terakhir:

Tabel 2.13
Perbandingan Perkembangan APM Sekolah Menegah Sederajat
Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2014 – 2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
APM SM Sederajat (Provinsi)	54,59%	56,71%	58,63%	60,22%	63,81%
APM SM Sederajat (Nasional)	57,15%	59,10%	61,20%	63,70%	67,14%

Sumber : Data Referensi Kemendikbud (updating data bulan Maret 2019)

Grafik 2.11
Perbandingan Perkembangan APM SM Sederajat Provinsi Riau dan Nasional
Tahun 2014 – 2018



Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Tabel dan grafik tersebut diatas menggambarkan hal-hal sebagai berikut:

a) APM provinsi maupun APM nasional mengalami kenaikan tiap tahunnya tetapi APM SM Sederajat Provinsi masih dibawah rata-rata Nasional.
b) Tahun 2014 APM Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau lebih rendah 2,56% dari rata-rata APM Sekolah Menengah Sederajat Nasional. Tahun 2015 APK Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau lebih rendah 2,39% dari rata-rata APM Sekolah Menengah Sederajat Nasional.
c) Tahun 2016 APM Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau lebih rendah 2,39% dari rata-rata APM Sekolah Menengah Sederajat Nasional.
d) Tahun 2017 APM Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau lebih rendah 3,48% dari rata-rata APM Sekolah Menengah Sederajat Nasional.
e) Tahun 2018 APM Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau lebih rendah 3,33% dari rata-rata APM Sekolah Menengah Sederajat Nasional.

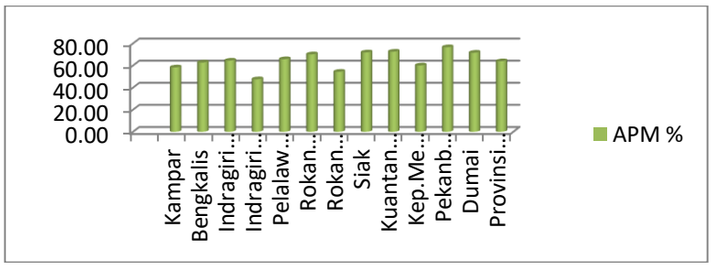
Untuk mengetahui realisasi atau capaian APM SM Sederajat di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2.14
APM Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten Kota se Provinsi Riau Tahun 2018

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk 16-18	Jumlah Siswa	APM %
1	Kampar	45,506	26,516	58,27
2	Bengkalis	36,369	22,796	62,68
3	Indragiri Hulu	22,018	14,183	64,42
4	Indragiri Hilir	41,934	19,934	47,54
5	Pelalawan	18,397	12,082	65,67
6	Rokan Hulu	25,907	18,16	70,10
7	Rokan Hilir	42,068	22,852	54,32
8	Siak	24,880	17,87	71,82
9	Kuantan Singingi	16,062	11,643	72,49
10	Kep.Meranti	10,730	6,446	60,07
11	Pekanbaru	59,080	45,204	76,51
12	Dumai	14,949	10,698	71,56
	Provinsi Riau	**357,900**	**228,384**	**63,81**

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Grafik 2.12
APM Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten Kota
se Provinsi Riau Tahun 2018



Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel dan grafik tersebut diatas terdapat 4 (empat) kabupaten/kota yang realisasi/capaian APM SM Sederajat berada jauh di bawah rata-rata APM Provinsi yaitu Kabupaten Indragiri Hilir 47,54% (paling terendah), Kabupaten Rokan Hilir dengan capaian APM sebesar 54,32%, Kabupaten Kampar dengan capaian APM sebesar 58,27% dan Kabupaten Kep. Meranti sebesar dengan capaian APM sebesar 60,07%. Realisasi capaian APM SM Sederajat tertinggi adalah Kota Pekanbaru sebesar 76,51%.

Untuk pemerataan akses pendidikan dan pelaksanaa pendidikan menengah universal di Provinsi Riau, yang sudah menjadi kewenangan dan urusan Pemerintah provinsi, maka intervensi pembangunan ruang kelas, unit sekolah baru dan pendidikan layanan khusus hendaknya diprioritaskan ke kabupaten yang masih rendah APMnya.

Pada tahun 2018, **perluasan akses pendidikan menengah** juga terlihat dari dari Dana Alokasi Khusus pendidikan menengah yaitu kegiatan penyelenggaraan SMA dan SMK pada11 kabupaten/kota, melalui :

a. Pembangunan 38 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA;
b. Rehabilitasi 128 Ruang Kelas SMA ;
c. Pengadaan Meubiler 38 ruang kelas SMA;
d. Pembangunan 42 Ruang Praktek Sekolah (RPS) SMK.

Upaya dalam meningkatkan akses pendidikan menengah melalui program pendidikan menengah pada beberapa kegiatanRevitalisasi SMA 3 sekolah, Revitalisasi SMK 4 sekolah, Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK 3 sekolah, Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK 4 sekolah, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA 12 sekolah.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Indikator APK dan APM Sekolah Menengah sederajat, antara lain :

a. Tingkat ekonomi masyarakat yang belum merata menyebabkan belum semua keluarga mampu mendukung peningkatan APK pendidikan menengah. Hal ini khususnya sangat berkaitan dengan biaya personal yang harus disediakan oleh orang tua terhadap pendidikan anaknya, dan pada sisi lain pemerintah belum mampu mencover keseluruhan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan menengah.
b. Masih rendahnya kesadaran orang tua terhadap penuntasan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh nilai ke-ekonomian anak yang diharapkan telah mampu mendukung ekonomi keluarga.
c. Masih terbatasnya satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) pada daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau, sehingga lulusan SMP sederajat harus mengalokasikan biaya khusus untuk biaya personal guna memperoleh layanan pendidikan menengah di luar daerah.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala:

a. Meningkatkan Pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan optimalisasi sekolah ramah social (sekolah gratis dan diasramakan bagi lulusan SMP sederajat kurang mampu dan berprestasi).
b. Mendekatkan layanan pendidikan (pendirian unit sekolah baru) kepada masyarakat pada wilayah geografis yang sulit dijangkau untuk menekan pembiayaan personal yang harus dikeluarkan oleh peserta didik, termasuk kebijakan satu kecamatan satu SMA/SMK.
c. Peningkatan pemahaman bagi orang tua mengenai pentingnya pendidikan masa depan anak dengan tidak mengesampingkan faktor ke ekonomian dalam membantu ekonomi keluarga melalui pendekatan yang terintegrasi dengan pola kegiatan yang bernilai ekonomi.
d. Melalui pelaksanaan sekolah marginal dan sekolah jarak jauh.

c. Kondisi Ruang Kelas jenjang pendidikan SMA/SMK dan SLB

Ruang Kelas merupakan salah satu prasarana pendidikan yang mempunyai peran penting untuk kelancaran proses pendidikan. Ruang Kelas dalam kondisi baik akan memberikan kontribusi bagi semangat belajar, karena memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik. Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada masyarakat diperlukan sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Sebaran kondisi Ruang Kelas SMA/SMK dan SLB Per Kab/Kota Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.15.
Kondisi Ruang Kelas SMA Negeri Per Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2018

NO	KAB/KOTA	KONDISI RUANG KELAS					TTL
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	RUSAK TOTAL	
1	KAB. BENGKALIS	1	234	12	16	0	263
2	KAB. INDRAGIRI HILIR	124	114	21	38	0	297
3	KAB. INDRAGIRI HULU	133	117	2	2	0	254
4	KAB. KAMPAR	418	178	23	12	0	631
5	KAB. KEPULAUAN MERANTI	48	102	13	2	0	165
6	KAB. KUANTAN SINGINGI	164	108	6	15	0	293
7	KAB. PELALAWAN	53	169	13	17	0	252
8	KAB. ROKAN HILIR	200	202	37	18	0	457
9	KAB. ROKAN HULU	149	187	11	6	0	353

10	KAB. SIAK	179	195	31	17	0	422
11	KOTA DUMAI	40	80	10	1	0	131
12	KOTA PEKANBARU	255	169	6	21	0	451
JUMLAH		**1764**	**1855**	**185**	**165**	**0**	**3969**

Sumber Data : Dapodik tahun 2018

Mencermati data pada tabel di atas, jumlah Ruang Kelas SMA Negeri di Provinsi Riau dalam kondisi baik 1.764 kelas, jumlah ruang kelas Rusak Ringan 1.855 Kelas, Jumlah Ruang kelas Rusak Sedang 185 Kelas, Jumlah Ruang Kelas Rusak Berat 165 Kelas, sedangkan Jumlah Ruang Kelas Rusak Total Tidak Ada. Jika dilihat dari tabel tersebut kabupaten yang memiliki ruang kelas dalam kondisi ruang berat adalah Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 38 Kelas sedangkan Kabupaten yang memiliki Rusak berat adalah Kota Dumai haya 1 kelas saja. Kondisi Ruang kelas dalam keadaan rusak berat tidak dapat digunakan untuk proses belajar mengajar dan perlu mendapat perhatian agar pemerintah provinsi riau merehabilitasi ruang kelas dalam kondisi rusak tersebut.

Tabel 2.16.
Kondisi Ruang Kelas SMA Swasta Per Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2018

NO	KAB/KOTA	KONDISI RUANG KELAS					TTL
		BAIK	RUSAK RIANGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	RUSAK TOTAL	
1	KAB. BENGKALIS	60	20	5	0	0	85
2	KAB. INDRAGIRI HILIR	27	42	3	2	0	74
3	KAB. INDRAGIRI HULU	17	16	0	0	0	33
4	KAB. KAMPAR	12	29	1	0	0	42
5	KAB. KEPULAUAN MERANTI	20	9	5	6	0	40
6	KAB. KUANTAN SINGINGI	0	0	0	0	0	0
7	KAB. PELALAWAN	14	6	0	0	0	20
8	KAB. ROKAN HILIR	79	74	12	0	0	165
9	KAB. ROKAN HULU	12	10	0	0	0	22
10	KAB. SIAK	12	8	2	0	0	22
11	KOTA DUMAI	60	9	2	1	0	72
12	KOTA PEKANBARU	268	138	0	0	0	406
	JUMLAH	**581**	**361**	**30**	**9**	**0**	**981**

Sumber Data : Dapodik tahun 2018

Mencermati data pada tabel di atas, jumlah Ruang Kelas SMA Swasta di Provinsi Riau dalam kondisi baik 581 kelas, jumlah ruang kelas Rusak Ringan 361 Kelas, Jumlah Ruang kelas Rusak Sedang 30 Kelas, Jumlah Ruang Kelas Rusak Berat 9 Kelas, sedangkan Jumlah Ruang Kelas Rusak Total Tidak Ada. Jika dilihat dari tabel tersebut kabupaten yang memiliki ruang kelas dalam kondisi ruang berat adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 6 Kelas, kabupaten Indragiri Hilir 2 Kelas dan Kota Dumai 1 Kelas. Kondisi Ruang kelas dalam keadaan rusak berat tidak dapat digunakan untuk proses belajar mengajar dan perlu mendapat perhatian agar pemerintah provinsi riau merehabilitasi ruang kelas dalam kondisi rusak tersebut.

Tabel 2.17
Kondisi Ruang Kelas SMK Negeri Per Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2018

NO	KAB/KOTA	KONDISI RUANG KELAS					TTL
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	RUSAK TOTAL	
1	KAB. BENGKALIS	63	120	0	1	0	184
2	KAB. INDRAGIRI HILIR	118	29	2	0	0	149
3	KAB. INDRAGIRI HULU	96	89	1	2	0	188
4	KAB. KAMPAR	75	65	0	0	0	140
5	KAB. KEPULAUAN MERANTI	38	10	0	0	0	48
6	KAB. KUANTAN SINGINGI	49	121	4	8	0	182
7	KAB. PELALAWAN	81	73	0	1	0	155
8	KAB. ROKAN HILIR	6	41	2	0	0	49
9	KAB. ROKAN HULU	83	116	0	9	0	208
10	KAB. SIAK	130	65	2	0	0	197
11	KOTA DUMAI	62	66	1	0	0	129
12	KOTA PEKANBARU	210	113	0	0	0	323
	JUMLAH	**1011**	**908**	**12**	**21**	**0**	**1952**

Mencermati data pada tabel di atas, jumlah Ruang Kelas SMKNegeri di Provinsi Riau dalam kondisi baik 1.011 kelas, jumlah ruang kelas Rusak Ringan 908 Kelas, Jumlah Ruang kelas Rusak Sedang 12 Kelas, Jumlah Ruang Kelas Rusak Berat 21 Kelas, sedangkan Jumlah Ruang Kelas Rusak Total Tidak Ada. Jika dilihat dari tabel tersebut kabupaten yang memiliki ruang kelas dalam kondisi ruang Rusak berat adalah Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 9 Kelas, kabupaten Kuantan Singingi 8 Kelas, Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 2 Kelas, kabupaten bengkalis dan kabupaten pelalawan masing masing sebanyak 1 kelas. Kondisi Ruang kelas dalam keadaan rusak berat tidak dapat digunakan untuk proses belajar mengajar dan perlu

mendapat perhatian agar pemerintah provinsi riau merehabilitasi ruang kelas dalam kondisi rusak tersebut.

Tabel 2.18.
Kondisi Ruang Kelas SMK Negeri Per Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2018

NO	KAB/KOTA	KONDISI RUANG KELAS					TTL
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	RUSAK TOTAL	
1	KAB. BENGKALIS	17	76	3	0	0	96
2	KAB. INDRAGIRI HILIR	28	25	1	1	0	55
3	KAB. INDRAGIRI HULU	29	14	0	0	0	43
4	KAB. KAMPAR	81	42	12	0	0	135
5	KAB. KEPULAUAN MERANTI	20	15	0	0	0	35
6	KAB. KUANTAN SINGINGI	0	11	0	0	0	11
7	KAB. PELALAWAN	30	28	0	0	0	58
8	KAB. ROKAN HILIR	53	140	13	12	0	218
9	KAB. ROKAN HULU	74	41	7	12	0	134
10	KAB. SIAK	31	89	0	1	0	121
11	KOTA DUMAI	51	33	2	5	0	91
12	KOTA PEKANBARU	365	238	22	12	0	637
	JUMLAH	**779**	**752**	**60**	**43**	**0**	**1634**

Mencermati data pada tabel di atas, jumlah Ruang Kelas SMKSwasta di Provinsi Riau dalam kondisi baik 779 kelas, jumlah ruang kelas Rusak Ringan 752 Kelas, Jumlah Ruang kelas Rusak Sedang 60 Kelas, Jumlah Ruang Kelas Rusak Berat 43 Kelas, sedangkan Jumlah Ruang Kelas Rusak Total Tidak Ada. Jika dilihat dari tabel tersebut kabupaten yang memiliki ruang kelas dalam kondisi ruang Rusak berat adalah Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 12 Kelas, kabupaten Rokan Hilir 12 Kelas, Kota Pekanbaru sebanyak 12 Kelas, Kota Dumai sebanyak 5 Kelas, Kabupaten siak sebanyak 1 kelas dan kabupaten Indragiri Hilir 1 Kelas. Kondisi Ruang kelas dalam keadaan rusak berat tidak dapat digunakan untuk proses belajar mengajar dan perlu mendapat perhatian agar pemerintah provinsi riau merehabilitasi ruang kelas dalam kondisi rusak tersebut.

2.3.2.2 Angka Putus Sekolah

Menurunnya Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA

Yang dimaksud dengan Angka Putus Sekolah (APTS) adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun

kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun.

Indikator APTS digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun).

Hasil dapat diinterpretasikan bahwa Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Angka Putus Sekolah untuk masing-masing kelompok usia dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Seluruh Peserta Didik SMA/MA/SMK Sederajat Putus Sekolah}}{\text{Jumlah Seluruh Peserta Didik SMA/MA/SMK Sederajat}} \text{ X } 100\%$$

Indikator menurunnya angka putus sekolah SM Sederajat digunakan untuk mengukur keterjangkauan dan pemerataan pendidikan jenjang sekolah menengah (SMA dan SMK), dicapai melalui program pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, pembangunan sekolah terpadu dan pendidikan non formal informal.

Realisasi dihitung dengan menggunakan rumus jumlah seluruh siswa sekolah menengah sederajat yang pustus sekolah dibagi dengan jumlah seluruh siswa sekolah menengah dikali dengan 100%

Tabel 2.16
Perkembangan Angka Putus Sekolah SMA Provinsi Riau dan Nasional
Tahun 2014 – 2018

INDIKATOR	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
APTS SMA (Provinsi)					
Jumlah Siswa Putus Sekolah	1.384	1.978	794	66	1249
Angka Putus Sekolah (%)	1,71%	1,50%	0,59%	0,04%	0,4%
APTS SMA Sederajat (Nasional)					
Jumlah Siswa Putus Sekolah	42.008	68.319	40.454	31.123	72.637
Angka Putus Sekolah (%)	0,98%	1,59%	0,96%	0,67%	1,4%

Sumber : Statistik SMA, PDSP Kemendikbud RI

Tabel 2.17
Perkembangan Angka Putus Sekolah SMK Provinsi Riau dan Nasional
Tahun 2014 – 2018

INDIKATOR	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
APTS SMK (Provinsi)					
Jumlah Siswa Putus Sekolah	1.745	1.522	1.293	50	2125
Angka Putus Sekolah (%)	2,20%	1,92%	1,60%	0,05%	0,8%
APTS SMK Sederajat (Nasional)					
Jumlah Siswa Putus Sekolah	129.037	86.282	77.899	73.388	152.638
Angka Putus Sekolah (%)	3,08%	2,05%	1,85%	1,57%	3,02%

Sumber : Statistik SMP, PDSP Kemendikbud RI

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

1) Angka putus sekolah Siswa SMA Provinsi Riau dari Tahun 2015 sampai dengan 2018 selalu berada dibawah angka putus sekolah nasional, namun di tahun 2014 berada diatas angka nasional.
2) Angka putus sekolah siswa SMA Provinsi Riau tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami penurunan dan turun signifikan pada tahun 2017 dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2018.
3) Seperti halnya angka putus sekolah siswa SMA Provinsi, angka putus sekolah nasional tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami kondisi yang fluktuatif, dan di tahun 2018 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.
4) Angka putus sekolah siswa SMK Provinsi, sejak 2014 sampai dengan 2017 menurun secara signifikan dari 2,20% di tahun 2012 menjadi 0,05% ditahun 2017 dan mengalami kenaikan kembali ditahun 2018.

Kondisi angka putus sekolah SMA dan SMK Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2018 tergambar dalam tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 2.13
APTS Sekolah Menengah Atas Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2018

NO	Kab/Kota	Sekolah Menengah Atas (SMA)		
		Jumlah siswa	Siswa Putus Sekolah	% Putus Sekolah
1	2	3	4	5
1	Kab. Bengkalis	19.950	59	0,30%
2	Kab. Indragiri Hilir	12.963	153	1,18%
3	Kab. Indragiri Hulu	8.317	62	0,75%
4	Kab. Kampar	20.084	181	0,90%
5	Kab. Kep.Meranti	5.141	71	1,38%
6	Kab. Kuantan Singingi	7.891	74	0,94%
7	Kab. Pelalawan	8.661	62	0,72%
8	Kab. Rokan Hilir	19.549	278	1,42%

NO	Kab/Kota	Sekolah Menengah Atas (SMA)		
		Jumlah siswa	Siswa Putus Sekolah	% Putus Sekolah
1	2	3	4	5
9	Kab. Rokan Hulu	10.533	121	1,15%
10	Kab. Siak	12.832	92	0,72%
11	Kota Dumai	5.860	27	0,46%
12	Kota Pekan Baru	23.353	69	0,30%
	Provinsi Riau	155.134	1.249	0,81%

Sumber : Buku Saku Pendidikan

Tabel 2.14
Angka Putus Sekolah SMK Kabupaten/Kota se Provinsi Riau
Tahun 2018

NO	Kab/Kota	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)		
		Jumlah siswa	Siswa Putus Sekolah	% Putus Sekolah
1	2	3	4	5
1	Kab. Bengkalis	6.791	116	1,71
2	Kab. Indragiri Hilir	5.317	49	0,92
3	Kab. Indragiri Hulu	7.383	103	1,40
4	Kab. Kampar	6.364	181	2,84
5	Kab. Kep.Meranti	1.756	71	4,04
6	Kab. Kuantan Singingi	5.121	169	3,30
7	Kab. Pelalawan	5.656	61	1,08
8	Kab. Rokan Hilir	6.991	525	7,51
9	Kab. Rokan Hulu	9.214	143	1,55
10	Kab. Siak	7.385	155	2,10
11	Kota Dumai	6.965	109	1,56
12	Kota Pekan Baru	28.440	443	1,56
	Provinsi Riau	97.383	2.125	2,18

Sumber : Buku Saku Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2018

Penyebab terjadinya putus sekolah antara lain adalah karena faktor ekonomi, minat peserta didik untuk bersekolah yang rendah, perhatian orang tua yang kurang, fasilitas belajar yang kurang mendikung serta faktor budaya dan lokasi atau letak sekolah.

1) **Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi merupakan faktor pertama penyebab anak putus sekolah. Ketidakmampuan keluarga anak untuk membiayai segala proses yang dibutuhkan selama menempuh pendidikan atau sekolah dalam satu jenjang tertentu. Pencanangan dan pelaksanaan program pendidikan menengah universar belum berimplikasi secara maksimal terhadap penurunan jumlah anak putus sekolah.

2) **Kurang perhatian orang tua**

Kurangnya perhatian orang trua merupakan faktor kedua penyebab anak putus sekolah. Rendahnya perhatian orang tua terhadap anak dapat disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga atau rendahnya pendapatan orang tua anak, sehingga perhatian orang tua lebih banyak tercurah pada upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

3) **Fasilitas pembelajaran yang kurang memadai**

Fasilitas pembelajaran di sekolah yang kurang memadai seperti fasilitas yang tersedia (alat, bahan dan media), buku pelajaran dan sebagainya merupakan faktor ketiga penyebab anak putus sekolah. Kebututuhan dan fasilitas belajar yang dibutuhkan siswa tidak dapat dipenuhi dapat menyebabkan turunnya minat anak yang pada akhirnya menyebabkan putus sekolah.

4) **Minat anak**

Rendahnya minat anak dapat disebabkan oleh perhatian orang tua yang kurang, jarak antara tempat tinggal anak dengan sekolah yang jauh,fasilitas belajar yang kurang dan pengaruh lingkungan sekitarnya. Tingkat pendidikan masyarakat rendah yang diikuti oleh rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan, ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam menopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap masalah psikologi anak sehingga anak tidak bisa bersosialisasi dengan baik dalam pergaulan dengan teman sekolahnya selain itu peranan lingkungan sangat berpengaruh terhadap minat anak bersekolah.

5) **Budaya**

Budaya adalah hal-hal yang terkait dengan kebiasaan masyarakat sekitarnya. Rendahnya kesadaran orang tua dan atau masyarakat akan pentingnya arti pendidikan. Perilaku masyarakat pedesaan dalam menyekolahkan anaknya lebih banyak dipengaruhi faktor lingkungan. Mereka beranggapan tanpa sekolahpun anak-anak mereka dapat hidup layak seperti anak lainnya yang bersekolah, oleh karena di desa jumlah anak yang tidak berskolah lebih banyak dan mereka dapat hidup layak, maka kondisi seperti itu dijadikan landasan dalam menentukan masa depan anaknya.

Pandangan banyak anak banyak rejeki membuat masyarakat di pedesaan lebih banyak mengarahkan anaknya yang masih usia sekolah untuk membantu orang tua dalam mencari nafkah.

6) Lokasi Sekolah

Lokasi atau letak sekolah merupakan faktor keenam yang mampu menyebabkan anak putus sekolah. Jarak yang jauh dengan akses yang sulit merupakan hal hal yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya. Alat transportasi yang kurang serta jarak antara rumah dengan sekolah yang cukup jauh, akses yang sangat sulit dan keselamat pun dianggap perlu dipertimbangkan.

Dalam rangka menekan angka putus sekolah terutama yang disebabkan karena faktor ekonomi, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya diantaranya adalah melaksanakan kebijakan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Paket C, Bantuan Siswa Miskin (BSM), Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).

Penyebab dari peserta didik putus sekolah tidak hanya karena faktor ekonomi, untuk itu program menurunkan angka putus sekolah yang dilaksanakan kedepan harus juga yang dapat mengatasi permasalahan yang menyebabkannya seperti putus sekolah yang disebabkan karena kurangnya minat anak dan kurangnya fasilitas pembelajaran dapat diatasi dengan menumbuhkan minat anak melalui pemenuhan fasilitas pembelajaran. Selain itu melalui program PKPLK layanan pendidikan akan lebih terjangkau bagi siswa yang karena faktor geografis dan ekonomi tidak dapat melanjutkan pendidikan. Melalui SMA terbuka, SMP/SMA satu atap dan pemanfaatan teknologi serta memfasilitasi peserta didik putus sekolah untuk mengikuti pendidikan Nonformal dan informal.

Angka Putus Sekolah Menengah Provinsi Riau dari Tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami naik turun, di tahun 2016 peserta didik SMA/MA/SMK/SMALB putus sekolah adalah sebesar 0,34%, mengalami peningkatan di Tahun 2016 dan Tahun 2017 masing-masing menjadi 0,96% dan 1,59% dan di Tahun 2017mengalami penurunan menjadi 0,63%.

2.3.1.3Akreditasi Sekolah Menengah

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikann Nasional Bab XVI Bagian Kedua pasal 60 tentang Akreditasi, berbunyi sebagai berikut: I) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; 2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk

akuntabilitas publik; dan 3) Akreditasi di lakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

Sejalan dengan hal di atas, dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 86 dinyatakan hal-hal sebagai berikut: 1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/satuan pendidikan; 2) Kewenangan akreditasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang di beri kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi; 3) Akreditasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Sesuai dengan target Perubahan Renstra, capaian kinerja persentase SMA/SMK terakreditasi Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15
Tabel Capaian Persentase SMA/SMK Terakreditasi Minimal B

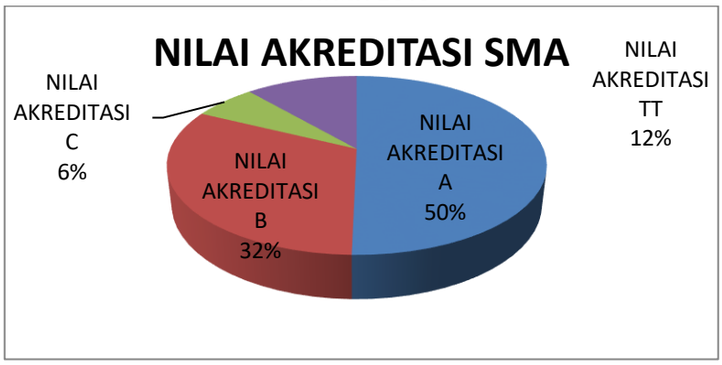
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	6	7	8	6	7	8
Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	Persentase SMA Terakreditasi Minimal B	64,74%	72,70%	112,30%	95,00%	81,49%	86,56%
	Persentase SMK Terakreditasi Minimal B	64,74%	29,00%	44,79%	45,40%	54,19%	119,89%

Sesuai dengan Target Perjanjian, pada tahun 2018 Dinas Pendidikan mentargetkan persentase SMA terakreditasi minimal B sebesar 95,00%, terealisasi sebesar 81,49%, dengan capaian kinerja sebesar 86,56%. Jika dibandingkan dengan realisasi persentase tahun 2017 maka persentase SMA terakreditasi mengalami Penurunan sebesar 25,74%. Sedangkan Target Persentase SMK terakreditasi minimal B sebesar 44,79%, terealisasi sebesar 54,19%, dengan capaian kinerja sebesar 119,89%. Jika dibandingkan dengan realisasi persentase tahun 2017 maka persentase SMK terakeditasi mengalami kenaikan sebesar 75,10%.

Data dalam grafik dibawah ini menggambarkan bahwa sebagian besar 12% SMA di Provinsi Riau belum terakreditasi dari jumlah sekolah SMA yang

diakreditasi oleh BAN yaitu 439 sekolah dan juga karena sekolah yang akreditasinya masa berlakunya selama 5 tahun telah habis sehingga di himbau kepada Sekolah untuk memperbarui penilaian akreditasinya. Sekolah SMA terakreditasi A sebesar 49,89%, berakreditasi nilai B sebesar 31,60%, dan berakreditasi C sebesar 6,32%.

Grafik 2.6
Persentase Nilai Akreditasi SMA Provinsi Riau
Tahun 2018



Tabel 2.16
Persentase Nilai Akreditasi SMA se Provinsi Riau
Tahun 2018

JENJANG SEKOLAH	NILAI AKREDITASI								Jumlah Sekolah yang diakreditasi
	A	A	B	B	C	C	TT	TT	
SMA	49,89%	221	31,60%	140	6,32%	28	11,29%	50	439

Sumber: Data Referensi Pendidikan (BAN-SM)

Tabel 2.17
Perkembangan Persentase Nilai Akreditasi SMA se Provinsi Riau
Tahun 2015-2018

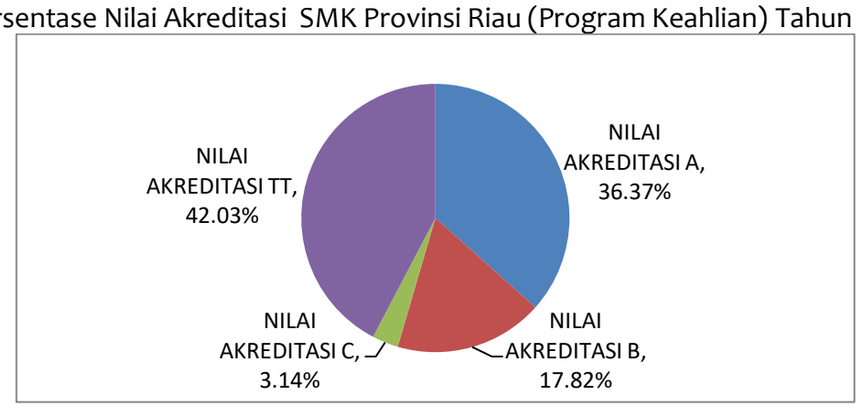
NO	TAHUN	JENJANG SEKOLAH	NILAI AKREDITASI				Nilai Akreditasi Minimal B (A+B)
			A	B	C	TT	
1	2015	SMA	37,2%	29,7%	12,4%	20,7%	66,90%
2	2016	SMA	28,3%	26,6%	10,2%	34,9%	54,90%
3	2017	SMA	45,50%	27,20%	5,50%	21,7%	72,70%
4	2018	SMA	49,89%	31,60%	6,32%	11,29%	81,49%

Sumber: Data Referensi Pendidikan (BAN-SM) (Updating data bulan Maret 2019)

Tabel 2.17 diatas menggambarkan bahwa persentase SMA terakreditasi minimal B dari tahun 2014 sampai tahun 2018 berfluktuasi tiap tahunnya. Pada Tahun 2015 Persentase SMA terakreditasi minimal B sebesar 66,90% sedangkan di tahun 2016 sebesar 54,90% mengalami penurunan yaitu sebesar 12%. Pada Tahun 2017 Persentase SMA terakreditasi minimal B sebesar 72,70% jika dibandingkan dari tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 17,80%. Pada tahun 2018 Persentase SMA

terakreditasi minimal B sebesar 81,49% jika dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 8,79%.

Grafik 2.7
Persentase Nilai Akreditasi SMK Provinsi Riau (Program Keahlian) Tahun 2018



Tabel 2.18
Persentase Nilai Akreditasi SMK se Provinsi Riau Tahun 2018

JENJANG SEKOLAH	NILAI AKREDITASI								Jumlah Program keahlian yang diakreditasi
	A	A	B	B	C	C	TT	TT	
SMK	36,37%	347	17,82 %	170	3,14%	30	42,0 3%	401	948

Sumber: Data Referensi Pendidikan (BAN-SM)

Data tabel 3.11 ini menggambarkan bahwa sebagian besar yaitu 42,03% SMK (menurut program keahlian) di Provinsi Riau belum terakreditasi dari jumlah sekolah SMK berdasarkan program keahlian yang diakreditasi oleh BAN yaitu 948 dan juga karena program keahlian SMK yang akreditasinya masa berlakunya selama 5 tahun telah habis sehingga di himbau kepada Sekolah untuk memperbarui penilaian akreditasinya. Sekolah SMK terakreditasi A (program keahlian) sebesar 36,37%, berakreditasi nilai B sebesar 17,82%, dan berakreditasi C sebesar 3,14%.

Tabel 2.19
Perkembangan Persentase Nilai Akreditasi SMK (Program Keahlian)
se Provinsi Riau Tahun 2015 - 2018

NO	TAHUN	JENJANG SEKOLAH	NILAI AKREDITASI				Nilai Akreditasi Minimal B (A+B)
			A	B	C	TT	
1	2015	SMK	25,0%	16,9%	6,9%	51,2%	41,90%
2	2016	SMK	60,8%	34,0%	5,3%	0	94,80%
3	2017	SMK	18,80%	10,20%	1,80%	69,2%	29,00%
4	2018	SMK	36,37%	17,82%	3,14%	42,03%	54,19%

Sumber: Data Referensi Pendidikan (BAN-SM) (Updating data bulan Maret 2019)

Tabel 2.19 diatas menggambarkan bahwa persentase SMK terakreditasi minimal B (program keahlian) dari tahun 2014 sampai tahun 2018 berfluktuasi tiap tahunnya. Pada Tahun 2015 Persentase SMK terakreditasi minimal B sebesar 41,90% sedangkan di tahun 2016 sebesar 94,80% mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 52,90%. Pada Tahun 2017 Persentase SMK terakreditasi minimal B sebesar 29,00% jika dibandingkan dari tahun 2017 mengalami penurunan kembali yang sangat signifikan sebesar 65,80%. Pada tahun 2018 Persentase SMA terakreditasi minimal B sebesar 54,19% jika dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 25,19%.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU Sekolah yang terakreditasi minimal B adalah sebagai berikut.

1) Banyak sekolah/madrasah di daerah terpencil yang belum siap untuk diakreditasi.
2) Partisipasi pengelola program/lembaga pendidikan masih rendah karena belum melihat kepentingan (*urgency*) akreditasi sekolah dan belum jelas *civileffect*-nya.
3) Sinergi antara BAN Sekolah Madrasah, BAP sebagai lembaga akreditasi/penjaminan mutu dengan Dinas Pendidikan belum optimal.
4) Keterlambatan penyelesaian administrasi akreditasi dari satuan pendidikan.
5) Masa berlakunya Akreditasi yang sudah habis, tetapi belum diakreditasi kembali oleh BAN-SM
6) Kompetensi staf pada tingkat satuan pendidikan dalam membuat evaluasi diri sekolah (EDS) masih kurang
7) Kemampuan sekolah dalam memenuhi 8 standar nasional pendidikan masih kurang Melihat beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi tersebut di atas, beberapa langkah antisipasi yang akan dilakukan di masa datang adalah sebagai berikut:
    1) Mengusahakan keberlangsungan dukungan dana dari APBD Provinsi dan pihak terkait lainnya untuk membantu sekolah memenuhi 8 standar nasional pendidikan.
    2) Menyusun jadwal dan rencana kegiatan dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait Program/kegiatan akreditasi
    3) Meningkatkan sosialisasi menyeluruh kepada seluruh unit terkait di propinsi dan kabupaten/kota mengenai pentingnya penjaminan mutu pendidikan melalui akreditasi sesuai dengan amanat Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.

4) Meningkatkan koordinasi untuk bersinergi antara BAN S/M, BAP dengan Dinas Pendidikan provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan melalui pemenuhan 8 SNP, terutama dalam meningkatkan:
   (1) Kemampuan sekolah untuk beradaptasi dengan perubahan
   (2) Kemampuan sekolah dalam pengorganisasian programsekolah
   (3) Kemampuan Tim Pengembang Sekolah
   (4) Kemampuan Sekolah dalam Pengembangan nuansa akademik
   (5) Kemampuan Sekolah dalam Pencapaian PrestasiAkademik
   (6) Kemampuan Sekolah dalam Pencapaian Prestasi NonAkademik
   (7) Kemampuan Sekolah dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Karakter
   (8) Kemampuan Sekolah dalam Mengembangkan BudayaSekolah.

2.3.1.4Kualifikasi Pendidik

Pendidikan adalah masalah yang berhubungan dengan hidup serta kehidupan. Untuk itulah proses pendidikan semakin berkembang sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia. Pada hakikatnya kedua proses tersebut menjadi satu dalam proses kehidupan manusia dimana keduanya tidak terpisahkan.

Proses pendidikan bisa berjalan dengan adanya sarana prasarana, adanya peserta didik, dan tersedianya tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota di dalam masyarakat yang mengabdikan diri mereka dan diangkat untuk menunjang proses pendidikan. Yang masuk kedalam tenaga kependidikan ada tiga kelompok besar, yaitu kepala satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan yang lain.

Kualifikasi didefinisikan sebagai keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan sesuatu, atau menduduki suatu jabatan tertentu. Dalam definisi yang lain, kualifikasi berarti sebagai hal-hal yang menjadi syarat baik secara akademis serta teknis untuk mengisi jenjang kerja.

Adanya kualifikasi akan mendorong seseorang untuk mempunyai suatu keahlian atau kecakapan secara khusus. Kualifikasi di dalam dunia pendidikan dimengerti sebagai keahlian atau kecakapan khusus di bidang pendidikan.

Keahlian ini adalah sebagai pengajar mata pelajaran, sebagai administrasi pendidikan dan lain sebagainya.

Kualifikasi guru terkadang bisa dilihat dari segi lulusannya. Kualifikasi untuk guru akan berbeda contohnya untuk guru SD, guru SMP atau guru SMA. Tentu berbeda sesuai dengan jenjang dan tingkatan. Demikian juga untuk guru yang mengajar di bangku kuliah maka akan dibutuhkan kualifikasi yang juga berbeda.

Meningkatnya Persentase kualifikasi guru dihitung dengan menggunakan rumus sebagaiberikut:

$$\frac{\text{Jumlah Guru Berkualifikasi S1 pada jenjang tertentu}}{\text{Jumlah Seluruh Guru pada jenjang tertentu}} \text{ X } 100\%$$

Persentase guru berkualifikasi S1 adalah merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya mutu pendidikan. Adapun capaian pada masing-masing jenjang dijelaskan sebagai berikut:

Untuk memberikan layanan dalam peningkatan kualifikasi akademik bagi Guru SMA/SMK diperlukan peran serta pemerintah dan pemerintah provinsi dalam pemberian bantuan studi peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang sedang melanjutkan studi ke jenjang S1 atau D-4. Tabel berikut adalah data kualifikasi guru pada jenjang sekolah menengah (SMA/SMK) :

Tabel 2.20
Data Kualifikasi Guru SMA/SMK Provinsi Riau
Tahun 2018

NO	Kab/Kota	Jumlah Guru	SMA/SMK Guru berkualisifikasi S1 / D IV	%
1	2	3	4	5
1	Kab. Bengkalis	1.721	1.637	95.12
2	Kab. Indragiri Hilir	1.133	1.043	92.06
3	Kab. Indragiri Hulu	1.044	1.008	96.55
4	Kab. Kampar	1.856	1.786	96.23
5	Kab. Kep.Meranti	525	475	90.48
6	Kab. Kuantan Singingi	1.088	1.065	97.89
7	Kab. Pelalawan	932	908	97.42
8	Kab. Rokan Hilir	1.578	1.480	93.79
9	Kab. Rokan Hulu	1.410	1.341	95.11
10	Kab. Siak	1.297	1.254	96.68
11	Kota Dumai	805	743	92.30
12	Kota Pekan Baru	3.476	3.338	96.03
	Provinsi Riau	16.865	16.078	95.33

Sumber Data: Neraca pendidikan Daerah Tahun 2018

Dengan demikian capaian indikator kinerja meningkatnya persentase guru berkualifikasi S1/D IV pada Pendidikan Menengah (SMA/SMK) adalah :

Tabel 2.21
Capaian Indakator Kinerja Persentase Guru SMA/SMK
Provinsi Riau Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	Persentase Guru SMA/SMK Berkualifikasi S1 / D IV	94.52%	95.29%	100.81%	95.00%	95.33%	100.35%

Pada Tahun 2018 sesuai dengan perjanjian kinerja, Dinas Pendidikan mentargetkan 94,52% guru SMA/SMK/SLB berkualifikasi S1/DIV. Dari target tersebut telah terealisasi sebesar 95,33% dengan capaian kinerja sebesar 100,35%.

Jika kita bandingkan dengan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu sebesar 95,29% untuk realisasi dan 100,81% untuk capaian kinerja, maka baik realisasi maupun capaian kinerja tahun 2018mengalami penurunan sebesar 0,47% ditahun 2017.

Kualifikasi Guru SMA dan SMK di Kabupaten Kota se Provinsi Riau tergambar pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2.22
Kualifikasi Guru SMA di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2018

NO	Kab/Kota	SMA		
		Jumlah Guru	Guru berkualisifikasi S1 / D IV	%
1	2	3	4	5
1	Kab. Bengkalis	1.156	1.121	96.97
2	Kab. Indragiri Hilir	727	655	90.10
3	Kab. Indragiri Hulu	563	545	96.80
4	Kab. Kampar	1317	1.280	97.19
5	Kab. Kep.Meranti	399	370	92.73
6	Kab. Kuantan Singingi	633	621	98.10
7	Kab. Pelalawan	541	534	98.71
8	Kab. Rokan Hilir	1131	1.075	95.05
9	Kab. Rokan Hulu	691	545	96.67
10	Kab. Siak	780	763	97.82
11	Kota Dumai	360	336	93.33
12	Kota Pekan Baru	1629	1.600	98.22
	Provinsi Riau	9.927	**9.568**	**96.38**

Sumber : Neraca pendidikan Daerah Tahun 2018

Tabel 2.23
Kualifikasi Guru SMK di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2018

NO	Kab/Kota	SMK		
		Jumlah Guru	Guru berkualisifikasi S1 / D IV	%
1	2	3	4	5
1	Kab. Bengkalis	565	516	91.33
2	Kab. Indragiri Hilir	406	388	95.57
3	Kab. Indragiri Hulu	481	463	96.26
4	Kab. Kampar	539	506	93.88
5	Kab. Kep.Meranti	126	105	83.33
6	Kab. Kuantan Singingi	455	444	97.58
7	Kab. Pelalawan	391	374	95.65
8	Kab. Rokan Hilir	447	405	90.60
9	Kab. Rokan Hulu	719	673	93.60
10	Kab. Siak	517	491	94.97
11	Kota Dumai	445	407	91.46
12	Kota Pekan Baru	1.847	1.738	94.10
	Provinsi Riau	6.938	6.510	93.83

Sumber : Neraca pendidikan Daerah Tahun 2018

Dari data tersebut diatas, persentase jumlah guru SMA berkualifikasi S1/DIV terendah adalah di Kabupaten Indragiri Hilir (90,10%), tertinggi di Kabupaten Pelalawan (98,71%), sedangkan persentase jumlah guru SMK berkualifikasi S1/D IV terendah di Kabupaten Kepulauan Meranti (83,33%), dan tertinggi di Kabupaten Kuantan Singingi (97,58%).

Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dapat dilihat pada Tabel T-C.23 dan tabel TC.-24 adalah sebagai berikut :

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan Dinas Pendidikan

Pencapaian visi, misi dan perwujudan program unggulan dari Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang pendidikan sebagaimana tersebut diatas akan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Berdasarkan pada identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan, maka yang menjadi Tantangan dan peluang dalam pencapaian visi, misi dan perwujudan program unggulan Gubernur Riau bidang pembangunan pendidikan antara lain adalah:

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Pendidikan

Tantangan Pengembangan Pelayanan Pendidikan di Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Di era globalisasi ini, Provinsi Riau menghadapi berbagai tantangan dan peluang di bidang pendidikan karena harus bersaing dan dituntut agar output penidikan dapat mengikuti perkembangan.
2. Tantangan yang dihadapi oleh pendidik dan tenaga kependidikan adalah menuntut manusia yang mandiri sehingga peserta didik harus dibekali dengan kecakapan hidup (lifeskill) melalui proses belajar dan aktifitas yang memadai, proses pembelajaran, seorang guru atau pendidik yang dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif terutama dalam menentukan model dan metode yang tepat agar pembentukan kecakapan hidup siswa berhasil, pembentukan kecakapan hidup tentu saya diarahkan dan berlandaskan potensi hidup dan budaya provinsi riau, memanfaatkan peluang-peluang yang ada dan diharapkan mampu mencapai keberhasilan pendidik sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Riau.
3. Tantangan selanjutnya yaitu mana yang belum terpenuhinya kualifikasi tenaga pendidik, pemenuhan sarana dan prasarana dasar sesuai dengan SPM wajib pelayanan dasar bidang pendidikan pada semua jenjang pendidikan, program wajib belajar 12 tahun yang belum berjalan secara maksimal dan fleksibilitas anggaran dana pemerintah daerah untuk pendidikan relatif terbatas untuk pembangunan pendidikan.

2. Peluang Pengembangan Pelayanan Pendidikan

Sekalipun dalam upaya pencapaian pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau dihadapkan pada hambatan dan tantangan di atas, namun dalam pelaksanaannya juga terdapat kondisi yang merupakan peluang dan faktor pendorong bagi upaya pencapaian pelayanan. Peluang tersebut diantaranya adalah :

1. Diterbitkannya berbagai regulasi bidang pendidikan yang memberikan daya dukung bagi pelaksanaan kebijakan pendidikan.
2. Menguatnya komitmen Pemerintah dan DPRD terhadap dukungan alokasi pembiayaan pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD.
3. Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi pembangunan pendidikan
4. Meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil
5. Munculnya organisasi-organisasi baru di bidang pendidikan yang dapat menjadi mitra dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan.
6. Meningkatnya peran serta pelaku usaha melalui program *Corporate Social Responbility* (CSR) untuk pendidikan.
7. Meningkatnya Partisipasi Potensi Dunia Usaha dan Industri di Provinsi Riau dalam proses Pengembangan Pendidikan Kejuruan.

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pendidikan

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 47 Tahun 2018 Tentang kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau terkait dengan pencapaian layanan pendidikan, melihat hasil pencapaian tahun sebelumnya diidentifkasi permasalahan sebagai berikut :

1. Aksesibilitas Pendidikan
2. Kualitas Tenaga Pendidikan
3. Mutu Pendidikan dan Relevansi Pendidikan

Identifikasi permasalahan Pendidikan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat pada tabel T-B.35 sebagai berikut :

TABEL T-B.35

NO	MASALAH POKOK (Tujuan & Sasaran)		MASALAH (Strategi)		AKAR MASALAH (Arah Kebijakan)
1	Belum Terwujudnya Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun				
1.1	Masih Rendahnya Aksesibilitas terhadap Pelayanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1.	Masih Rendahnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	-	Masih kurangnya Sarana dan prasarana Pendidikan
				-	Sarana dan prasarana Pendidikan yang tidak merata
				-	Masih Banyaknya Sarana prasarana Pendidikan dalam kondisi rusak
				-	Masih terbatasanya jangkauan terhadap layanan pendidikan
		2.	Keterjangkauan dalam mendapatkan layananan pendidikan masih sulit	-	Belum terpenuhinya kebutuhan operasional penyelenggaran Pendidikan
				-	Masih Adanya Siswa Miskin yang tidak dapat

					melanjutkan Sekolah
				-	Masih adanya Biaya-biaya Lain pada Sekolah (yang dibebankan kepada Peserta Didik)
				-	Jarak Sekolah dengan Pemukiman yang relatif jauh
1.2	Masih Rendahnya Kualitas tenaga Pendidik dan Kependidikan	1.	Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan masih Rendah	-	Kualifikasi Guru dibawah D-IV / S-1
				-	Rendahnya Kualitas / Kompetensi Tenaga Pendidik
1.3	Masih rendahnya Mutu dan Relevansi Pendidikan bagi peserta didik	a.	Keterbatasan Penyediaan Fasilitas Belajar siswa	-	Media Pembelajaran Siswa yang masih belum terpenuhi
				-	Alat Praktek dan Alat labor yang masih belum terpenuhi
		b.	Rendahnya Kompetensi Dasar yang dimiliki oleh peserta Didik	-	Rendahnya kemampuan pemahaman akademik bagi peserta didik
		c.	Ketidaksesuaian Pendidikan Kejuruan dengan Ketersediaan Lapangan Kerja	-	Kurangnya / tidak ada sikronisasi kurikulum SMK dengan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri)
				-	Payung Hukum / sangsi terhadap perusahaan yang tidak respon baik dengan pihak SMK / Pemerintah
				-	Kurang terpenuhinya sertifikasi profesi bagi peserta didik SMK dari Lembaga Sertifikasi Profesi

3.2.Telaah Visi, Misi Program Kepala Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Gubernur Riau tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Riau berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban terhadap upaya pencapaian misi ke 1 yaitu Mewujudkan Sumber Daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.

Pada misi ke 1 ini Dinas Pendidikan Provinsi Riau bertanggung jawab terhadap pencapaian pembangunan bidang pendidikan yang berkeadilan khususnya pada sasaran meningkatnya angka rata-rata lama sekolah, meningkatnya angka harapan lama sekolah, meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pendidikan bermutu, kesesuaian dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan Menengah dan PKPLK.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong Pelayanan Pendidikan yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini :

TABEL 3.2

FAKTOR PENGHAMBAT DAN FAKTOR PENDORONG PELAYANAN PENDIDIKAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENCAPAIAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

NO	Misi/Program Kdh sesuai Tusi PD	Permasalahan Pelayanan PD		Faktor			
				Penghambat		Pendorong	
1	**Misi Kdh**						
	Mewujudkan Sumber Daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya	1.	**Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan**	1.	Akses dan daya tampung yang masih belum maksimal	1.	Diterbitkannya Perda Wajib Belajar 12 Tahun
				2.	Kondisi sarana dan prasarana belajar yang mengalami kerusakan	2.	Tersedianya pendanaan untuk Penyediaan layanan pendidikan, sejalan dengan komitmen pemerintah provinsi riau untuk mengalokasikan 20% dari APBD ditambah

							dengan pendanaan bersumber dari APBN
				3.	Masih terdapat usia sekolah pada jenjang pendidikan disabilitas yang belum atau tidak bersekolah	3.	Tersedianya pendanaan untuk Penyediaan layanan pendidikan, sejalan dengan komitmen pemerintah provinsi riau untuk mengalokasikan 20% dari APBD ditambah dengan
				4.	Ketersediaan ruang kelas dan peralatan pendidikan yang masih kurang	4.	Tersedianya pendanaan untuk Penyediaan layanan pendidikan, sejalan dengan komitmen pemerintah provinsi riau untuk mengalokasikan 20% dari APBD ditambah dengan
				5.	Masih rendahnya motivasi orang tua dan siswa terhadap Pendidikan		Adanya Dukungan Masyarakat, Organisasi, Perusahaan terhadap pendidikan
				6.	Tingkat Perekonomian Masyarakat / kemiskinan penduduk		Adanya Dukungan Masyarakat, Organisasi, Perusahaan terhadap pendidikan

					7.	Faktor geografi (Jarak sekolah yang jauh)		Adanya Dukungan Masyarakat, Organisasi, Perusahaan terhadap pendidikan
			2	**Masih Rendahnya Kualitas / Mutu Pendidikan**	1.	Kualitas Tenaga Pendidik yang masih Rendah	1.	Tersedianya Pendanaan Untuk Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik.
					2.	Penyediaan Fasilitas Belajar siswa masih belum maksimal	2.	Tersedianya Pendanaan untuk Peningkatan Mutu Pembelajaran Siswa
					3.	Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang belum seluruhnya Sekolah melakukan UNBK	3.	Tersedianya pendanaan untuk penyediaan media pelaksanaan UNBK
			3	**Relevansi**	1.	Ketidaksesuaian Pendidikan Kejuruan dengan Ketersediaan Lapangan Kerja	1.	Adanya Dukungan Masyarakat, Organisasi, Perusahaan terhadap pendidikan

					2.	Ketidaksiapan kemampuan Kognitif dan Teknikal untuk melanjutkan Pendidikan		
3	**Program**							
	1.	Program Penyelenggaraan Menengah						
	2.	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus						
	3.	Program Bantuan Operasional Sekolah						
	4.	Program peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan						

3.3. Telaah Rencana Strategis KL dan Renstra Kabupaten/Kota

Faktor-faktor Penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari Pelayanan Pendidikan yang mempengaruhi permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrian Pendidikan Provinsi Riau ataupun Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab. Kuansing) dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini :

TABEL 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong dari Pelayanan Pendidikan ditinjau dari Renstra KL dan Renstra Kab/Kota

NO	Renstra KL dan Renstra Kab/Kota	Permasalahan Pelayanan PD		Faktor			
				Penghambat		**Pendorong**	
1	Sasaran jangka Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI	a.	Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas belum maksimal	1.	Pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun belum maksimal dan Berkualitas	1.	Penyediaan Pendidikan Gratis Pendidikan menengah SMA/SMK/SLB

	• Tujuan Strategis		b.	Belum seluruh penduduk memperoleh layanan akses pendidikan menengah yang berkualitas	-	pemenuhan hal terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas belum maksimal, masih ada permasalahan dari segi pemerataan baik sisi spasial maupun tingkat evaluasi.	2.	Tenaga Pendidik yang telah memiliki Kompetensi dan Distribusi Tenaga Pendidik yang merata.
	1.	Penguatan Peran siswa, Guru, Tenaga kependidikan, Orang Tua dan aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan.	c.	Relevansi Pendidikan menengah kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja belum maksimal	-	belum seluruh penduduk memperoleh layanan akses pendidikan menengah yang berkualitas karena masih banyaknya kecamatan yang belum memiliki SMA/MA/SMK menjadi penyebab kantung-kantung putus sekolah. Perbedaan kemampuan ekonomi sangat tinggi serta keterbatasan fisik masih menjadi kendala.	3.	Partisipasi Orang tua dalam proses penyelenggaraan pendidikan
	2.	Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam melestarikan Kebudayaan			-	relevansi pendidikan menengah kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja belum maksimal, ini dikarenakan tingkat pengangguran lulusan smk yang masih relatif lebih rendah dibandingkan kelulusan SMA. Jumlah rata rata penghasilan yang tidak terlalu berbeda antara kelulusan SMA dan SMK.	4.	Masyarakat yang sangat peduli

						Ketidakselarasan antara dunia kerja dan dan kualitas lulusan SMK merupakan faktor yang mendorong rendahnya penyerapan lulusan SMK pada dunia kerja		
	3.	Peningkatan Akses PAUD, Diskdas, Dikmen, Dikmas dan pendidikan Anak berkebutuhan Khusu			2.	lemahnya pelaksanaan kurikulum 2013 karena keterbatasan materi ajar serta masih masih rendahnya pemahaman pendidik, kepala sekolah dan orang tua	5.	Industri yang berperan penting
	4.	Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter.			3.	jumlah dan distribusi guru yang masih perlu tata secara lebih baik. Karena proses rekrutmen guru belum terintegrasi antar daerah sehingga banyak daerah yang kelebihan guru sementara daerah lainya mengalami kekurangan guru. Pemenuhan kekurangan guru didaerah 3T akan sulit terlaksana karena terbatasnya ketersediaan guru. keterbatasan distribusi guru antara lain disebabkan oleh terbatasnya dalam kapasitas pemerintah kab/kota dalam mengolah	6.	Organisasi Profesi yang berkontribusi besar

						perekrutan, penempatan,dan peningkatan,mutu guru secara efektif dan efisien, kurangnya komitmen untuk menegakkan peraturan dalam pengangkatan guru berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual kab/kota.		
	5.	Peningkatan Jati diri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi kebudayaan serta pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan			4.	pemanfaatan anggaran pendidikan belum efektif dan efisien, hal ini disebabkan penerapan anggaran 20% APBN belum dapat sepenuhnya dinikmati masyarakat. Proses pengguna anggaran pendidikan yang berasal dari APBN melalui mekanisme transfer daerah belum sepenuhnya transparan dan belum berdampak langsung pada peningkatan mutu layanan pendidikan didaerah. Masih terjadinya inefisiensi dalam pembiayaan pendidikan antara lain , pengelolaan dan distribusi guru yang kurang baik, rasio guru dan murid yang makin rendah, pemanfaatan BOS	7.	Pemerintah yang berperan Optimal, Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 IV (keempat) Tahun 2002 yaitu tentang pendidikan bentuk dukungan pemerintah telah dituangkan dalam pasal 31 ayat 1,2,3,4 dan 5. khusus untuk dukungan pendidikan secara eksplisit dituangkan pasal 31 ayat 4 berbunyi negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional.

						lebih banyak untuk guru dibandingkan dengan peningkatan kualitas pembelajaran, penggunaan belanja transfer kedaerah melalui DAU dan DAK untuk bidang pendidikan belum optimal dan pengeluaran untuk guru meningkat karena bertambahnya jumlah guru dan jenis pengeluaran (termasuk karena sertifikasi)		
	6.	Peningkatan Sistem Tata Kelola yang transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik.					8.	Bonus Demografi
		• Sasaran Strategis						
	1.	Meningkatkan Perilaku positif Siswa						
	2.	Meningkatkan partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan.						
	3.	Meningkatkan Kualitas sikap guru dan tenaga pendidikan dalam kepribadian, sprirtual dan sosial						

	4.	Meningkatan peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan						
	5.	Meningkatkan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh propinsi, kabupaten dan kota						
	6.	Meningkatkan angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah						
	7.	Meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan						
	8.	Meningkatkan mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah						
	9.	Meningkatkan Profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga pendidikan						
	10.	Meningkatkan lembaga/satuan pendidikan dan pemangku						

		kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga.						
2		Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab. Kuansing						
		Tujuan 1						
	1.	Meningkatnya Ketersediaan layanan pendidikan bagi anak usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan formal, non formal dan pendidikan masyarakat			1.	Masih terdapat beberapa gedung sekolah yang belum layak.	1.	Adanya Komitmen dan dukungan pimpinan daerah
	2.	Meningkatnya Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai pada setiap jenjang pendidikan formal, non formal dan pendidikan masyarakat			2.	APK, APM SMP/MTs belum optimal.	2.	Adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
	3.	Meningkatnya ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai dan merata pada setiap jenjang pendidikan			3.	Adanya sebagian pendidik yang belum layak mengajar, belum merata dan berkemampuan akademik yang sesuai dengan standar.	3.	Adanya dana, sarana, dan prasarana pendidikan.
	4.	Menurunnya jumlah anak usia sekolah yang tidak sekolah pada			4.	Ketersediaan Sarana dan prasarana penunjang mutu pendidikan belum	4.	Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan.

		setiap jenjang pendidikan				optimal.		
	5.	Meningkatnya jumlah anak usia sekolah yang melanjutkan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan			5.	Belum adanya TK Negeri Pembina di setiap kecamatan.	5.	Banyaknya penduduk usia sekolah.
		Tujuan 2			6.	Belum Optimalnya penyelenggaraan Sekolah Binaan Khusus dan pembinaan sekola biasa.	6.	Adanya trasportasi dan komunikasi.
	1.	Meningkatnya persentase kelulusan dan rerata nilai ujian Nasional serta ujian sekolah pada setiap jenjang pendidikan			7.	Rendahnya tingkat disiplin pengelola pendidikan.	7.	Adanya wewenang Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam menerbitkan Surat Izin Operasional bagi lembaga pendidikan baik formal maupun non formal.
	2.	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana penunjang mutu pendidikan yang memadai pada setiap jenjang pendidikan			8.	Manajemen pendidikan sebagian masih dipegang oleh aparatur yang belum layak dan kurang memiliki daya inovasi.	8.	Adanya wewenang Dinas Pendidikan untuk menindak pelanggaran peraturan bagi aparat pendidikan.
	3.	Meningkatnya Kompetensi guru dan tenaga kependidika yang berkualitas pada setiap jenjang			9.	Kurangnya minat belajar siswa.	9.	Adanya lahan untuk pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas dan ruang penunjang lainnya.

		pendidikan						
	4.	Meningkatnya pelaksanaan pengelolaan dan penataan guru yang merata pada setiap jenjang pendidikan			10.	Masih kurangnya fasilitas sarana olahraga bagi siswa dan masyarakat umum	10.	Adanya Badan Akredasi Sekolah (BAS)
	5.	Meningkatkan pemasyarakatan nilai-nilai budaya melayu melalui kurikulum muatan lokal pada setiap jenjang pendidikan			11.	Wadah-wadah pendidik dan tenaga kependidikan belum optimal (MGMP, KKG, K3S dan MKKS) serta organisasi kepemudaan dan klub olahraga.		
	6.	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional			12.	Ketersediaan Sistem Informasi Layanan Pendidikan berbasis Teknologi Informasi yang belum optimal		
		Tujuan 3						
	1.	Meningkatnya Jumlah sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)						
	2.	Meningkatnya sistem informasi pelayanan pendidikan yang efektif dan efisien						
	3.	Meningkatkan peran serta masyarakat, Dunia Usaha dan Industri dalam						

		penyelenggaraan pendidikan						
		Tujuan 4						
	1.	Mengoptimalkan pengelolaan organisasi kepemudaan yang berkualitas						
	2.	Meningkatkan kegiatan pengembangan keterampilan pemuda yang kreatif dan produktif						
	3.	Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam pembinaan pemuda dan olahraga						
		Tujuan 5						
	1.	Meningkatkan prestasi olahraga daerah baik ditingkat daerah, nasional maupun internasional						
	2.	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai						
	3.	Meningkatkan pembinaan cabang olahraga unggulan dan berprestasi						

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan dari program pembangunan daerah yang telah dijabarkan pada tabel 6.3 RPJMD untuk dinas pendidikan provinsi Riau tidak termasuk dalam kajian tata ruang wilayah dan juga kajian lingkungan hidup Strategis (KLHS). Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan kajian atas faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau, maka ditetapkan isu-isu strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Masih adanya Kesenjangan Aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat di daerah ataupun di perkotaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fasilitas pendidikan, kesulitan menjangkau lokasi pendidikan dan rendahnya kemampuan ekonomi orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Masih adanya Kesenjangan Kualitas pendidikan antara perkotaan dengan di daerah. Hal ini disebabkan perbedaan ketersediaan fasilitas pendidikan dan belum meratanya penyebaran guru dan Penerapan kurikulum 2013 yang belum maksimal
3. Belum terdapatnya kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.
4. Rendahnya kuantitas dan kualitas sarpras pendidikan menengah terutama kejuruan
5. Belum optimalnya pendataan semua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia sekolah berkesempatan menikmati layanan pendidikan yang sesuai
6. Terbatasnya jumlah tenaga pendidik pada pendidikan khusus dan layanan khusus

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
						2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar 12 tahun			1	Rata-rata Lama Sekolah	8,97	9,04	9,11	9,18	9,24
				2	Harapan Lama Sekolah	13,57	13,74	13,92	14,10	14,28
		1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1	APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	85,26	85,56	85,86	86,16	86,46
				2	APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	62,09	62,59	63,09	63,09	64,09
				3	Angka Putus Sekolah	1,01	1,00	0,9	0,8	0,7
		2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1	95,44	95,94	96,44	96,94	97,44
		3	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik	1	Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B	82,63	82,83	83,03	83,23	83,43
				2	Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B	54,83	55,03	55,23	55,43	55,63

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan misi Kepala Daerah, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2019-2024 yang lebih jelas guna menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi Kepala Daerah.

4.1.1 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan strategis Dinas Pendidikan tahun 2019-2024 adalah **"Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar 12 tahun"**.

Adapun Indikator program Sasaran/kinerja adalah sebagai berikut :

- Rata-Rata Lama Sekolah
- Harapan Lama Sekolah

4.1.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Riau (2019—2024)

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikandiperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024. **Sasaran strategis** adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK).
   - Adapun Indikator Sasaran/kinerja adalah sebagai berikuit:
     1) APK SMA/MA/SMALB/Paket C (%)
     2) APM SMA/MA/SMALB/Paket C (%)
     3) Angka Putus Sekolah

2. Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK).
   - Adapun Indikator Sasaran/ kinerja adalah sebagai berikut :
     - Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1

3. Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik.
   - Adapun Indikator Sasaran/kinerja adalah sebagai berikut:
     1) Persentase sekolah SMA yang berakreditasi minimal B
     2) Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta indikator kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagai berikut :

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Tahun 2019 – 2024 dirumuskan pada tujuan dan dan sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Pemerintah Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Riau dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 – 2024 dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan sampai tahun 2018.Pada bagian ini akan disajikan beberapa hal terkait dengan strategi dan arah kebijakan

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Tahun 2019-2024 dirumuskan berdasarkan pada misi ke-satu Gubernur terpilih, tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Pemerintah Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Riau dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikandan Kebudayaan Tahun 2019-2024 dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan sampai Tahun 2018. Strategi danarah kebijakan ini juga memperhatikan komitmen Kemendiknas dan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kualitas/mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, mensukseskan pelaksanaan pendidikan universal serta memperkuat dan memperluas pemanfaatan TIK untuk pendidikan.

Strategi dan arah kebijakan pendidikan disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi pengelolaan pendidikan terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis.Telaah terhadap sasaran-sasaranstrategis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan di Provinsi Riau. Kebutuhan tersebut mencakup , sarana dan prasarana, , SDM dan pemanfaatan.

5.1.1 Strategi

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan strategis tersebut.Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis. Komponen-komponen tersebut antara lain meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana, serta sistem dan prosedur yang bermutu. Dalam pemilihan strategi juga mempertimbangkan disparitas antar wilayah, gender, sosial ekonomi,

serta antar satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat, strategi Dinas Pendidikan Provinsi Riau adalah :

1. **Sasaran** :
    1) Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan layanan khusus.
        - **Strategi :**
            - ❖ meningkatnya sarana dan prasarana untuk pemenuhan akses pendidikan.
            - ❖ Peningkatan akses Pendidikan bagi masyarakat miskin
    2) Meningkatkan kualitas Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
        - **Strategi :**
            - ❖ Meningkatkan kualifikasi Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
            - ❖ Meningkatkan kompetensi Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
    3) Meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa / peserta didik.
        - **Strategi :**
            - ❖ Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu sesuai standar nasional Pendidikan serta peningkatan mutu siswa
            - ❖ Optimalisasi terhadap implementasi regulasi Pendidikan
            - ❖ Peningkatan kemampuan guru agar proses pembelajaran berkualitas
            - ❖ Meningkatkan relevansi Pendidikan Kejuruan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

5.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Tahun 2019 - 2024

Strategi sebagaimana dirumuskan pada bagian sebelumnya dipergunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan pendidikan periode lima tahunyang akan datang. Berikut ini akan diuraikan beberapa arah kebijakan bidang pendidikan sesuai dengan RPJMD adalah :

- **Strategi :**
    1) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pemenuhan akses pendidikan.
        - Adapun arah kebijakannya adalah sebagai berikut:
            a. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).
            b. Revitalisasi sekolah.

c. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).
d. Rehabilitasi Sekolah SMA dan SMK pada Wilayah I,II,III dan IV.
e. Pengadaan perlengkapan Meubiler dan Media Pembelajaran pada wilayah I,II,III dan IV.
f. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung pada Wilayah I,II,III dan IV.
g. Peningkatan pusat layanan Autis.

2) Peningkatan Partisipasi Sekolah.
   - Adapun arah kebijakannya adalah sebagai berikut :
     a. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional dan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
     b. Pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin yang tidak mampu.

- **Strategi:**
  1) Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
     - Adapun arah kebijakannyaadalah sebagai berikut:
       a. Pemberian beasiswa pendidikan bagi tenaga pendidikan .
       b. Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi Tenaga Pendidikan dan Guru Produktif pada Pendidikan SMK.
       c. Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
       d. Penyediaan Tenaga Pendidikan untuk PKLK (Guru SLB dan Guru Sekolah Inklusi yang berkompeten.
       e. Peningkatan kesejahteraan Guru Marjinal.

- **Strategi :**
  1) Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk peningkatan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan dan peningkatan mutu siswa.
     - Adapun arah kebijakannya adalah sebagai berikut :
       a. Pembangunan Ruang Perpustakaan, Pembangunan Laboratorium kimia,fisika, biologi, Ruang komputer, Ruang Praktek dan Ruang Multimedia.
       b. Penyediaan sarana pendukung pembelajaran, penyediaan komputer untuk penyiapan UNBK dan penyediaan media pembelajaran berbaris teknologi informasi, penyediaan alat praktek bagi siswa SMK.

c. Kegiatan siswa dalam beragam jenis serta mengembangkan kegiatan olimpiade dan festival berjenjang hingga ke tingkat nasional bahkan Internasional

2) Meningkatkan Relevansi Pendidikan Kejuruan dengan dunia kerja.

- Adapun arah kebijakannya adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya Pendidikan Vokasi

b. Meningkatnya lulusan SMK untuk Masuk di Dunia Keja.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk tahun 2019-2024 dapat dilihat dari Tabel T-C.26 sebagai berikut :

Tabel TC-26
Tujuan, Sasaran, Startegi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)						
MISI I : Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.						
Tujuan	**Sasaran**		**Strategi**		**Arah Kebijakan**	
Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun	1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1	Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pemenuhan akses pendidikan	a.	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan
			2	Peningkatan Akses Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin	a.	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Beasiswa Bagi Siswa Miskin Yang Kurang Mampu
	2	Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	1	Meningkatkan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a.	Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Bagi Tenaga Pendidik
	3	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik	1	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan serta peningkatan mutu siswa	a.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Untuk Peningkatan Mutu sesuai Standar Mutu Pendiidkan dan Standar Pelayanan Minimal
			2	Optimalisasi terhadap implementasi regulasi pendidikan	a.	Meningkatkan proses pembelajaran
					b.	Meningkatkan Kompetisi / Daya Saing Peserta Didik
			3	Peningkatan kemampuan guru agar proses pembelajaran berkualitas	a.	Optimalisasi kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
					b.	Menyusun regulasi penyelenggaraan SMK dan Pembentukan Tim Revitalisasi SMK
			4	Meningkatkan Relevansi Pendidikan Kejuruan dengan Dunia Kerja	a.	Optimalisasi Kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi dan Meningkatkan Keahlian Peserta Didik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka memberikan layanan dasar di Bidang Pendidikan sebagaimana Dinas Pendidikan Provinsi Riau menyelenggarakan program – program pembangunan bidang pendidikan yang diorientasikan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan program Gubernur, programtersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah

Program ini dilakukan untuk mendukung sasaran:

- meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.
- Meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/ peserta didik. Adapun indikator program adalah sebagai berikut:
  a. APK SMA Sederajat
  b. APM SMA Sederajat
  c. Akreditasi sekolah SMA Sederajat dengan nilai minimal B
  d. Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B

2. Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Program ini dilakukan untuk mendukung sasaran meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Adapun indikator program adalah sebagai berikut:

a. Persentase anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan akses pendidikan.

3. Program Bantuan Operasional Sekolah

Program ini dilakukan untuk mendukung sasaran meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Adapun indikator program adalah sebagai berikut:

a. Menurunnya angka putus sekolah.

5. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Program ini dilakukan untuk mendukung misi kelima gubernur Riau Menwujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi dengan tujuan Meningkatkan kinerja ASN dan dan Pelayanan Publik. Adapun indikator program adalah sebagai berikut:

a. kualifikasi guru SMA/SMK dengan tingkat kependidikan > D4/S1
b. Jumlah siswa miskin yang dibantu
c. Jumlah siswa dan mahasiswa yang diberikan beasiswa

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilakukan untuk mendukung misi kelima gubernur Riau Menwujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi dengan tujuan Meningkatkan kinerja ASN dan dan Pelayanan Publik.Adapun indikator program adalah sebagai berikut:

a. Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan Administrasi Perkantoran.

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilakukan untuk mendukung misi kelima gubernur Riau Menwujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi dengan tujuan Meningkatkan kinerja ASN dan dan Pelayanan Publik.Adapun indikator program adalah sebagai berikut:

a. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dengan adanya 7 (Tujuh) program tersebut dengan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) masing-masing diharapkan dapat mendukung Tujuan dan Sasaran Provinsi Riau lima tahun kedepan. Indikator kinerja adalah suatu ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif dan kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baikkinerja input, output, outcome, benefit dan impact sesuai dengan sasaran rencana. Selain itu indicator kinerja juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on–going), atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditujukan. Adapun rencana program dan kegiatan, indiKator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disajikan pada Tabel T-C27 berikut ini.

Tabel T-C 27

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian	Target Kinerja Program dan Kerangka											
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Meningkatkan Kualitas SDM yang Beriman dan Berdaya Saing	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan**	**0.0.00.01.**	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	100 Persen	100 Persen	**16.673.313.849,00**	100 Persen	**17.595.362.712,50**	100 Persen	**18.805.425.077,23**	100 Persen	**20.195.157.239,07**	100 Persen	**21.626.831.921,73**	100 Persen	**94.896.090.799,53**
		00.01.001.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	-	9000 Surat	150.000.000,00	9000 Surat	165.000.000,00	9000 Surat	181.500.000,00	9000 Surat	199.650.000,00	9000 Surat	219.615.000,30	45000 Surat	915.765.000,30
		00.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	12	12 Rekening	1.999.965.000,00	12 Rekening	2.100.000.000,00	12 Rekening	2.310.000.000,00	12 Rekening	2.541.000.000,00	12 Rekening	2.795.100.000,00	60 Rekening	11.746.065.000,00
		00.01.003.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	54 Unit	578.160.000,00	54 Unit	600.000.000,00	54 Unit	660.000.000,00	54 Unit	725.000.000,00	54 Unit	797.500.000,00	270 Unit	3.360.660.000,00
		00.01.004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12	12 Bulan	969.012.000,00	12 Bulan	1.065.913.200,00	12 Bulan	1.172.504.520,00	12 Bulan	1.289.754.972,00	12 Bulan	1.418.830.469,00	60 Bulan	5.916.015.161,00
		00.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-	16 Unit	300.000.000,00	16 Unit	330.000.000,00	16 Unit	363.000.000,00	16 Unit	399.300.000,00	16 Unit	440.230.000,30	80 Unit	1.832.530.000,30
		00.01.007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	12	35 Jenis	1.200.000.000,00	35 Jenis	1.200.000.000,00	35 Jenis	1.320.000.000,00	35 Jenis	1.452.000.000,00	35 Jenis	1.597.200.000,30	175 Jenis	6.769.200.000,30
		00.01.008.	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	12	17 Jenis	1.174.650.050,00	17 Jenis	1.174.650.100,00	17 Jenis	1.292.115.110,00	17 Jenis	1.421.326.621,00	17 Jenis	1.563.459.283,10	85 Jenis	6.626.201.164,10
		00.01.009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	9 Jenis	100.000.000,00	9 Jenis	119.463.933,00	9 Jenis	131.410.326,23	9 Jenis	144.551.358,85	9 Jenis	159.006.494,74	45 Jenis	654.432.112,82
		00.01.010.	Penyediaaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	12	1887 Porsi	1.328.086.799,00	1887 Porsi	1.460.895.479,50	1887 Porsi	1.606.985.027,00	1887 Porsi	1.698.217.184,00	1887 Porsi	1.868.038.902,40	9435 Porsi	7.962.223.391,90
		00.01.011.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12	418 Kali	1.800.000.000,00	418 Kali	1.980.000.000,00	418 Kali	2.193.870.094,00	418 Kali	2.413.257.103,22	418 Kali	2.488.085.771,30	2090 Kali	10.875.212.968,52
		00.01.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	-	235 OB	4.213.440.000,00	235 OB	4.213.440.000,00	235 OB	4.213.440.000,00	235 OB	4.213.440.000,00	235 OB	4.213.440.000,29	1175 OB	21.067.200.000,29
		00.01.013.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediaka	-	23 OB	360.000.000,00	23 OB	396.000.000,00	23 OB	435.600.000,00	23 OB	480.160.000,00	23 OB	527.076.000,00	115 OB	2.198.836.000,00
		00.01.021.	Penyelenggaraan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau Wilayah Regional I	Terselenggaranya cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau	-	12 Bulan	500.000.000,00	12 Bulan	560.000.000,00	12 Bulan	580.000.000,00	12 Bulan	638.000.000,00	12 Bulan	701.800.000,00	60 Bulan	2.979.800.000,00
		00.01.022.	Penyelenggaraan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau Wilayah Regional II	Terselenggaranya cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau	-	12 Bulan	500.000.000,00	12 Bulan	560.000.000,00	12 Bulan	580.000.000,00	12 Bulan	638.000.000,00	12 Bulan	701.800.000,00	60 Bulan	2.979.800.000,00
		00.01.023.	Penyelenggaraan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau Wilayah Regional III	Terselenggaranya cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau	-	12 Bulan	500.000.000,00	12 Bulan	560.000.000,00	12 Bulan	580.000.000,00	12 Bulan	638.000.000,00	12 Bulan	701.800.000,00	60 Bulan	2.979.800.000,00
		00.01.024.	Penyelenggaraan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau Wilayah Regional IV	Terselenggaranya cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau	-	12 Bulan	500.000.000,00	12 Bulan	560.000.000,00	12 Bulan	580.000.000,00	12 Bulan	638.000.000,00	12 Bulan	701.800.000,00	60 Bulan	2.979.800.000,00
		00.01.037.	Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	-	80 Persen	500.000.000,00	80 Persen	550.000.000,00	80 Persen	605.000.000,00	80 Persen	665.500.000,00	80 Persen	732.050.000,00	400 Persen	3.052.550.000,00
Meningkatkan Kualitas SDM yang Beriman dan Berdaya Saing	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan**	**0.0.00.02.**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur**	100 Persen	100 Persen	**1.820.000.000,00**	100 Persen	**1.920.647.594,52**	100 Persen	**2.052.733.724,71**	100 Persen	**2.204.431.974,83**	100 Persen	**2.360.708.522,25**	100 Persen	**10.358.521.816,31**
		00.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-	18 Unit	220.000.000,00	18 Unit	231.000.000,00	18 Unit	247.484.036,71	18 Unit	264.807.919,00	18 Unit	283.344.473,30	90 Unit	1.246.636.429,01
		00.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	-	6 Unit	250.000.000,00	6 Unit	262.500.000,00	6 Unit	280.875.000,00	6 Unit	300.536.250,00	6 Unit	321.573.787,50	30 Unit	1.415.485.037,50
		00.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	12	15 Ruang	500.000.000,00	15 Ruang	534.647.594,52	15 Ruang	569.399.688,00	15 Ruang	609.257.665,65	15 Ruang	651.905.702,25	75 Ruang	2.865.210.650,42
		00.02.013.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	-	5 Unit	200.000.000,00	5 Unit	210.000.000,00	5 Unit	224.700.000,00	5 Unit	240.429.000,00	5 Unit	257.259.030,00	25 Unit	1.132.388.030,00
		00.02.014.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	15	12 Unit	400.000.000,00	12 Unit	420.000.000,00	12 Unit	449.400.000,00	12 Unit	480.858.000,00	12 Unit	514.518.060,00	60 Unit	2.264.776.060,00
		00.02.016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	20	45 Unit	250.000.000,00	45 Unit	262.500.000,00	45 Unit	280.875.000,00	45 Unit	308.543.140,18	45 Unit	332.107.469,20	225 Unit	1.434.025.609,38
Meningkatkan Kualitas SDM yang Beriman dan Berdaya Saing	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan**	**1.1.01.15.**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH**	**APK SMA Sederajat** **APM SMA Sederajat** **Akreditasi sekolah SMA Sederajat dengan nilai minimal B**	83,87 Persen; 63,81 Persen; 81,49 Persen;	85,26 Persen; 67,17 Persen; 82,63 Persen;	**309.434.262.403,00**	85,56 Persen; 69,32 Persen; 82,83 Persen;	**326.546.248.212,25**	85,86 Persen; 71,51 Persen; 83,03 Persen;	**349.003.376.931,95**	86,16 Persen; 73,68 Persen; 83,23 Persen;	**374.794.935.246,74**	86,46 Persen; 75,55 Persen; 83,43 Persen;	**401.364.890.292,34**	86,46 Persen; 75,55 Persen; 83,43 Persen;	**1.761.143.713.086,28**
		01.15.002.	Revitalisasi SMA Wilayah II	Jumlah Ruang SMA yang di Revitalisasi	-	2 Ruang	0	2 Ruang	1.800.000.000,00	2 Ruang	1.836.000.000,00	2 Ruang	1.872.720.000,00	2 Ruang	1.910.174.400,00	10 Ruang	7.418.894.400,00
		01.15.003.	Revitalisasi SMA Wilayah III	Jumlah Ruang SMA yang di Revitalisasi	-	2 Ruang	0	2 Ruang	1.800.000.000,00	2 Ruang	1.836.000.000,00	2 Ruang	1.872.720.000,00	2 Ruang	1.910.174.400,00	10 Ruang	7.418.894.400,00
		01.15.004.	Revitalisasi SMA Wilayah IV	Jumlah Ruang SMA yang di Revitalisasi	-	2 Ruang	0	2 Ruang	1.873.719.069,00	2 Ruang	1.911.193.450,15	2 Ruang	1.949.417.319,00	2 Ruang	1.988.405.665,00	10 Ruang	7.722.735.503,15
		01.15.006.	Rehabilitasi SMA Wilayah I	Jumlah Ruang Kelas SMA yang di Rehabilitasi	-	180 Ruang	6.490.814.850,00	180 Ruang	6.490.814.850,00	180 Ruang	6.620.631.147,00	180 Ruang	6.753.043.769,94	180 Ruang	6.888.104.645,34	900 Ruang	33.243.409.262,28
		01.15.007.	Rehabilitasi SMA Wilayah II	Jumlah Ruang Kelas SMA yang di Rehabilitasi	-	300 Ruang	11.718.734.800,00	300 Ruang	11.718.734.800,00	300 Ruang	12.890.608.280,00	300 Ruang	15.948.059.653,79	300 Ruang	17.727.973.087,20	1500 Ruang	70.004.110.620,99
		01.15.008.	Rehabilitasi SMA Wilayah III	Jumlah Ruang Kelas SMA yang di Rehabilitasi	-	90 Ruang	2.728.385.000,00	90 Ruang	2.782.952.700,00	90 Ruang	2.838.611.754,00	90 Ruang	2.895.383.989,08	90 Ruang	2.953.291.668,86	450 Ruang	14.198.625.111,94
		01.15.009.	Rehabilitasi SMA Wilayah IV	Jumlah Ruang Kelas SMA yang di Rehabilitasi	-	120 Ruang	3.540.290.000,00	120 Ruang	3.540.290.000,00	120 Ruang	3.611.095.800,00	120 Ruang	3.683.317.716,00	120 Ruang	3.756.984.070,44	600 Ruang	18.131.977.586,44
		01.15.010.	Rehabilitasi SMA Kota Pekanbaru	Jumlah Ruang Kelas SMA yang di Rehabilitasi	-	70 Ruang	1.895.877.360,00	70 Ruang	1.895.877.360,00	70 Ruang	1.933.794.907,00	70 Ruang	1.972.470.805,14	70 Ruang	2.011.920.221,24	350 Ruang	9.709.940.653,38
		01.15.013.	Pembangunan USB SMA Wilayah III	Jumlah Unit Sekolah Baru SMA yang dibangun	-	1 Sekolah	3.488.000.000,00	1 Sekolah	3.488.000.000,00	1 Sekolah	3.836.800.000,00	1 Sekolah	4.220.480.000,00	1 Sekolah	4.642.595.377,00	5 Sekolah	19.675.875.377,00
		01.15.014.	Pembangunan USB SMA Wilayah IV	Jumlah Unit Sekolah Baru SMA yang dibangun	-	1 Sekolah	3.465.638.750,00	1 Sekolah	3.465.638.750,00	1 Sekolah	3.812.202.625,00	1 Sekolah	4.193.422.887,50	1 Sekolah	4.612.765.176,25	5 Sekolah	19.549.668.188,75
		01.15.016.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Wilayah I	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	-	12 Ruang	3.915.000.000,00	39 Ruang	3.915.000.000,00	39 Ruang	4.306.500.000,00	39 Ruang	4.737.150.000,00	39 Ruang	5.210.865.000,00	168 Ruang	22.084.515.000,00
		01.15.017.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Wilayah II	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	-	16 Ruang	5.035.000.000,00	16 Ruang	5.035.000.000,00	16 Ruang	5.538.500.000,00	16 Ruang	6.092.350.000,00	16 Ruang	6.701.585.000,00	80 Ruang	28.402.435.000,00
		01.15.018.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Wilayah III	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	-	6 Ruang	1.890.000.000,00	6 Ruang	1.890.000.000,00	6 Ruang	1.927.800.000,00	6 Ruang	1.966.356.000,00	6 Ruang	2.005.683.120,00	30 Ruang	9.679.839.120,00
		01.15.019.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Wilayah IV	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	-	10 Ruang	5.867.434.500,00	10 Ruang	5.867.434.500,00	10 Ruang	6.454.177.950,00	10 Ruang	7.099.595.745,34	10 Ruang	7.809.555.319,87	50 Ruang	33.098.198.015,21
		01.15.020.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Kota Pekanbaru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	-	4 Ruang	624.400.000,00	4 Ruang	624.400.000,00	4 Ruang	636.888.000,00	4 Ruang	649.625.760,00	4 Ruang	662.618.275,20	20 Ruang	3.197.932.035,20

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian	Target Kinerja Program dan Kerangka												
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		01.15.021.	Pengadaan Media Pembelajaran SMA Wilayah I	Jenis media pembelajaran yang di penuhi / Jumlah Sekolah yang terpenuhi alat bantu proses belajar mengajar	-	13 Sekolah	2.597.790.000,00	13 Sekolah	2.597.790.000,00	13 Sekolah	2.857.569.000,00	13 Sekolah	3.143.325.900,00	13 Sekolah	3.457.658.490,00	65	Sekolah	14.654.133.390,00
		01.15.022.	Pengadaan Media Pembelajaran SMA Wilayah II	Jenis media pembelajaran yang di penuhi / Jumlah Sekolah yang terpenuhi alat bantu proses belajar mengajar	-	21 Sekolah	4.181.100.000,00	21 Sekolah	4.181.100.000,00	21 Sekolah	4.599.210.000,00	21 Sekolah	5.059.131.000,00	21 Sekolah	5.565.044.100,00	105	Sekolah	23.585.585.100,00
		01.15.023.	Pengadaan Media Pembelajaran SMA Wilayah III	Jenis media pembelajaran yang di penuhi / Jumlah Sekolah yang terpenuhi alat bantu proses belajar mengajar	-	14 Sekolah	2.784.600.000,00	14 Sekolah	2.784.600.000,00	14 Sekolah	3.063.060.000,00	14 Sekolah	3.369.366.000,00	14 Sekolah	3.706.302.600,00	70	Sekolah	15.707.928.600,00
		01.15.024.	Pengadaan Media Pembelajaran SMA Wilayah IV	Jenis media pembelajaran yang di penuhi / Jumlah Sekolah yang terpenuhi alat bantu proses belajar mengajar	-	16 Sekolah	3.198.400.000,00	16 Sekolah	3.198.400.000,00	16 Sekolah	3.518.240.000,00	16 Sekolah	3.870.064.000,00	16 Sekolah	4.257.070.400,00	80	Sekolah	18.042.174.400,00
		01.15.025.	Pengadaan Media Pembelajaran SMA Kota Pekanbaru	Jenis media pembelajaran yang di penuhi / Jumlah Sekolah yang terpenuhi alat bantu proses belajar mengajar	-	11 Sekolah	2.194.500.000,00	11 Sekolah	2.194.500.000,00	11 Sekolah	2.413.950.000,00	11 Sekolah	2.655.345.000,00	11 Sekolah	2.920.879.500,00	55	Sekolah	12.379.174.500,00
		01.15.027.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung SMA Wilayah I	Jenis infrastruktur Pendukung yang di Bangun/ Jumlah Sekolah yang memadai infrastrukturnya	-	13 Sekolah	1.495.000.000,00	13 Sekolah	1.495.000.000,00	13 Sekolah	1.644.500.000,00	13 Sekolah	1.808.950.000,00	13 Sekolah	1.989.845.000,00	65	Sekolah	8.433.295.000,00
		01.15.028.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung SMA Wilayah II	Jenis infrastruktur Pendukung yang di Bangun/ Jumlah Sekolah yang memadai infrastrukturnya	-	21 Sekolah	2.410.000.000,00	21 Sekolah	2.410.000.000,00	21 Sekolah	2.651.000.000,00	21 Sekolah	2.916.100.000,00	21 Sekolah	3.207.710.000,00	105	Sekolah	13.594.810.000,00
		01.15.029.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung SMA Wilayah III	Jenis infrastruktur Pendukung yang di Bangun/ Jumlah Sekolah yang memadai infrastrukturnya	-	14 Sekolah	1.600.000.000,00	14 Sekolah	1.600.000.000,00	14 Sekolah	2.310.000.000,00	14 Sekolah	2.541.000.000,00	14 Sekolah	2.795.100.000,00	70	Sekolah	10.846.100.000,00
		01.15.030.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung SMA Wilayah IV	Jenis infrastruktur Pendukung yang di Bangun/ Jumlah Sekolah yang memadai infrastrukturnya	-	16 Sekolah	1.842.000.000,00	16 Sekolah	1.842.000.000,00	16 Sekolah	2.026.200.000,00	16 Sekolah	2.228.820.000,00	16 Sekolah	2.451.702.000,00	80	Sekolah	10.390.722.000,00
		01.15.031.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung SMA Kota Pekanbaru	Jenis infrastruktur Pendukung yang di Bangun/ Jumlah Sekolah yang memadai infrastrukturnya	-	11 Sekolah	1.244.100.000,00	11 Sekolah	1.244.100.000,00	11 Sekolah	1.368.510.000,00	11 Sekolah	1.505.361.000,00	11 Sekolah	1.655.897.100,00	55	Sekolah	7.017.968.100,00
		01.15.032.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor IPA SMA	Jenis Sarana dan Prasarana Labor IPA / Jumlah Sekolah SMA yang terpenuhi Sarana dan Prasarana Labor IPA	-	105 Sekolah	6.650.000.000,00	105 Sekolah	6.650.000.000,00	105 Sekolah	7.315.000.000,00	105 Sekolah	8.046.500.000,00	105 Sekolah	8.851.150.000,00	525	Sekolah	37.512.650.000,00
		01.15.033.	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMA Wilayah I	Jenis Meubeler Sekolah yang di penuhi / (Jumlah Ruang yang terpenuhi meubilliernya)	-	30 Ruang	3.105.000.000,00	30 Ruang	3.105.000.000,00	30 Ruang	3.415.500.000,00	30 Ruang	3.757.050.000,00	30 Ruang	4.132.755.000,00	150	Ruang	17.515.305.000,00
		01.15.034.	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMA Wilayah II	Jenis Meubeler Sekolah yang di penuhi / (Jumlah Ruang yang terpenuhi meubilliernya)	-	30 Ruang	3.100.000.000,00	30 Ruang	3.100.000.000,00	30 Ruang	3.410.000.000,00	30 Ruang	3.751.000.000,00	30 Ruang	4.126.100.000,00	150	Ruang	17.487.100.000,00
		01.15.035.	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMA Wilayah III	Jenis Meubeler Sekolah yang di penuhi / (Jumlah Ruang yang terpenuhi meubilliernya)	-	5 Ruang	530.000.000,00	5 Ruang	530.000.000,00	5 Ruang	583.000.000,00	5 Ruang	641.300.000,00	5 Ruang	705.430.000,00	25	Ruang	2.989.730.000,00
		01.15.036.	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMA Wilayah IV	Jenis Meubeler Sekolah yang di penuhi / (Jumlah Ruang yang terpenuhi meubilliernya)	-	26 Ruang	2.717.600.000,00	26 Ruang	2.717.600.000,00	26 Ruang	2.989.360.000,00	26 Ruang	3.288.296.000,00	26 Ruang	3.617.125.600,00	130	Ruang	15.329.981.600,00
		01.15.037.	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMA Kota Pekanbaru	Jenis Meubeler Sekolah yang di penuhi / (Jumlah Ruang yang terpenuhi meubilliernya)	-	5 Ruang	513.000.000,00	13 Ruang	513.000.000,00	13 Ruang	564.300.000,00	13 Ruang	620.730.000,00	13 Ruang	682.803.000,00	57	Ruang	2.893.833.000,00
		01.15.038.	Pembangunan Perpustakaan SMA Wilayah I	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	-	2 Ruang	940.000.000,00	2 Ruang	940.000.000,00	2 Ruang	1.034.000.000,00	2 Ruang	1.137.400.000,00	2 Ruang	1.251.140.000,00	10	Ruang	5.302.540.000,00
		01.15.039.	Pembangunan Perpustakaan SMA Wilayah II	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	-	6 Ruang	2.550.000.000,00	6 Ruang	2.550.000.000,00	6 Ruang	2.805.000.000,00	6 Ruang	3.085.500.000,00	6 Ruang	3.394.050.000,00	30	Ruang	14.384.550.000,00
		01.15.040.	Pembangunan Perpustakaan SMA Wilayah III	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	-	1 Ruang	430.000.000,00	1 Ruang	430.000.000,00	1 Ruang	473.000.000,00	1 Ruang	520.300.000,00	1 Ruang	572.330.000,00	5	Ruang	2.425.630.000,00
		01.15.041.	Pembangunan Perpustakaan SMA Wilayah IV	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	-	2 Ruang	810.450.000,00	2 Ruang	810.450.000,00	2 Ruang	891.495.000,00	2 Ruang	980.644.500,00	2 Ruang	1.078.708.950,00	10	Ruang	4.571.748.450,00
		01.15.042.	Pembangunan Perpustakaan SMA Kota Pekanbaru	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	-	0 Ruang	0	1 Ruang	470.000.000,00	1 Ruang	479.400.000,00	1 Ruang	498.767.000,00	1 Ruang	508.742.000,00	4	Ruang	1.956.909.000,00
		01.15.043.	Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Plus Provinsi Riau	Jumlah Siswa SMA Plus yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	300	450 Siswa	6.944.170.000,00	450 Siswa	6.944.170.000,00	450 Siswa	7.638.587.000,00	450 Siswa	8.402.445.700,00	450 Siswa	9.242.690.270,00	2250	Siswa	39.172.062.970,00
		01.15.044.	Penyelenggaraan SMA Pintar	Jumlah Siswa SMA Pintar yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	216	250 Siswa	5.363.616.000,00	250 Siswa	5.363.616.000,00	250 Siswa	5.899.977.600,00	250 Siswa	6.489.975.360,00	250 Siswa	7.138.972.896,00	1250	Siswa	30.256.157.856,00
		01.15.045.	Sistem Informasi Aplikasi Peningkatan dan Monitoring Kemampuan Siswa SMAN Berbasis IT	Jumlah Sekolah yang Mendapat Sistem Aplikasi Peningkatan dan Monitoring Kemampuan Siswa SMAN Berbasis IT	10	15 Sekolah	2.257.750.000,00	15 Sekolah	2.257.750.000,00	15 Sekolah	2.483.525.000,00	15 Sekolah	2.731.877.500,00	15 Sekolah	3.005.065.250,00	75	Sekolah	12.735.967.750,00
		01.15.046.	Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak	Jumlah sekolah yang melaksanakan ramah anak	-	100 Sekolah	200.000.000,00	100 Sekolah	200.000.000,00	100 Sekolah	220.000.000,00	100 Sekolah	242.000.000,00	100 Sekolah	266.200.000,00	500	Sekolah	1.128.200.000,00
		01.15.047.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Monitoring Penyelenggaran SMA	JUMLAH DOKUMEN HASIL KOORDINASI , SINKRONISASI DAN MONITORING PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMA DI 12 KAB/KOTA	-	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	275.000.000,00	1 Dokumen	302.500.000,00	1 Dokumen	332.750.000,00	5	Dokumen	1.410.250.000,00
		01.15.048.	Sertifikasi Keahlian Bagi Siswa Tidak Mampu	Jumlah Siswa Tidak Mampu Yang Mendapatkan Sertifikasi Keahlian	-	100 Siswa	2.018.383.000,00	100 Siswa	2.018.383.000,00	100 Siswa	2.220.221.300,00	100 Siswa	2.442.243.430,00	100 Siswa	2.686.467.773,23	500	Siswa	11.385.698.503,23
		01.15.049.	Lomba Kompetensi Siswa SMK (LKS)	Jumlah Siswa SMK Yang Mengikuti Kompetensi	-	10 Kompetensi Keahlian	2.132.140.000,00	10 Kompetensi Keahlian	2.132.140.000,00	10 Kompetensi Keahlian	2.345.354.000,00	10 Kompetensi Keahlian	2.579.889.400,00	Kompetensi Keal	2.837.878.340,00	50	Kompetensi Keahlian	12.027.401.740,00
		01.15.050.	Penyelenggaraan Pendidikan SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau	Jumlah Siswa SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau	400	400 Siswa	9.337.577.200,00	400 Siswa	9.337.577.200,00	400 Siswa	10.271.334.920,00	400 Siswa	11.298.468.412,00	400 Siswa	12.428.315.253,20	2000	Siswa	52.673.272.985,20
		01.15.051.	Penyelenggaraan Pendidikan SMK Perikanan Provinsi Riau	Jumlah Siswa SMK Perikanan Provinsi Riau	160	120 Siswa	4.759.581.000,00	120 Siswa	4.759.581.000,00	120 Siswa	5.235.539.100,00	120 Siswa	5.759.093.010,00	120 Siswa	6.335.002.311,00	600	Siswa	26.848.796.421,00
		01.15.052.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Monitoring Penyelenggaran SMK	JUMLAH DOKUMEN HASIL KOORDINASI, SINKRONISASI DAN MONITORING PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMK DI 12 KAB/KOTA	-	1 Dokumen	350.000.000,00	1 Dokumen	350.000.000,00	1 Dokumen	385.000.000,00	1 Dokumen	423.500.000,00	1 Dokumen	465.850.000,00	5	Dokumen	1.974.350.000,00
		01.15.058.	Pengadaan Media Pembelajaran SMK Wilayah I	Jenis media pembelajaran yang di penuhi	-	23 Set	3.300.000.000,00	23 Set	3.300.000.000,00	23 Set	3.630.000.000,00	23 Set	3.993.000.000,00	23 Set	4.392.300.000,00	115	Set	18.615.300.000,00
		01.15.059.	Pengadaan Media Pembelajaran SMK Wilayah II	Jenis media pembelajaran yang di penuhi	-	26 Set	2.750.000.000,00	26 Set	2.750.000.000,00	26 Set	3.025.000.000,00	26 Set	3.327.500.000,00	26 Set	3.660.250.000,00	130	Set	15.512.750.000,00
		01.15.060.	Pengadaan Media Pembelajaran SMK Wilayah III	Jenis media pembelajaran yang di penuhi	-	14 Set	1.650.000.000,00	14 Set	1.650.000.000,00	14 Set	1.815.000.000,00	14 Set	1.996.500.000,00	14 Set	2.196.150.000,00	70	Set	9.307.650.000,00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian	Target Kinerja Program dan Kerangka											
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		01.15.061.	Pengadaan Media Pembelajaran SMK Wilayah IV	Jenis media pembelajaran yang di penuhi	-	31 Set	2.200.000.000,00	31 Set	2.200.000.000,00	31 Set	2.420.000.000,00	31 Set	2.662.000.000,00	31 Set	2.928.200.000,00	155 Set	12.410.200.000,00
		01.15.062.	Penyelenggaraan SMK 4 Tahun	Jumlah Siswa yang Melaksanakan Magang di Perusahaan	-	65 Siswa	1.642.790.800,00	65 Siswa	1.642.790.800,00	65 Siswa	1.807.069.880,00	65 Siswa	1.987.776.868,00	65 Siswa	2.186.554.554,80	325 Siswa	9.266.982.902,80
		01.15.063.	Penyediaan biaya Penyelenggaraan Ujian Kompetensi SMK	Jumlah Siswa yang mengikuti ujian kompetensi SMK	-	5000 Siswa	270.000.000,00	5000 Siswa	270.000.000,00	5000 Siswa	763.395.981,00	5000 Siswa	839.735.579,10	5000 Siswa	923.709.137,01	25000 Siswa	3.066.840.697,11
		01.15.064.	Sertifikasi ANT IV dan ATT IV Siswa Nautika dan Teknika	Jumlah siswa yang mendapar sertifika	-	120 Orang	2.400.000.000,00	120 Orang	2.400.000.000,00	120 Orang	2.640.000.000,00	120 Orang	2.904.000.000,00	120 Orang	3.194.400.000,00	600 Orang	13.538.400.000,00
		01.15.065.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung SMK Wilayah I	Jenis infrastruktur Pendukung yang di Bangun	-	3 Sekolah	731.100.000,00	3 Sekolah	731.100.000,00	3 Sekolah	804.210.000,00	3 Sekolah	884.631.000,00	3 Sekolah	973.094.100,00	15 Sekolah	4.124.135.100,00
		01.15.066.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung SMK Wilayah II	Jenis infrastruttur Pendukung yang di Bangun	-	4 Sekolah	989.100.000,00	4 Sekolah	989.100.000,00	4 Sekolah	1.088.010.000,00	4 Sekolah	1.196.811.000,00	4 Sekolah	1.316.492.100,00	20 Sekolah	5.579.513.100,00
		01.15.067.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung SMK Wilayah III	Jenis infrastruttur Pendukung yang di Bangun	-	4 Sekolah	979.100.000,00	4 Sekolah	979.100.000,00	4 Sekolah	1.077.010.000,00	4 Sekolah	1.184.711.000,00	4 Sekolah	1.303.182.100,00	20 Sekolah	5.523.103.100,00
		01.15.068.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung SMK Wilayah IV	Jenis infrastruttur Pendukung yang di Bangun	-	4 Sekolah	989.100.000,00	4 Sekolah	989.100.000,00	4 Sekolah	1.088.010.000,00	4 Sekolah	1.196.811.000,00	4 Sekolah	1.316.492.100,00	20 Sekolah	5.579.513.100,00
		01.15.069.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung SMK Kota pekanbaru	Jenis infrastruttur Pendukung yang di Bangun	-	3 Sekolah	742.100.000,00	3 Sekolah	742.100.000,00	3 Sekolah	816.310.000,00	3 Sekolah	897.941.000,00	3 Sekolah	987.735.100,00	15 Sekolah	4.186.186.100,00
		01.15.070.	Pembangunan Perpustakaan SMK Wilayah I	Jumlah Perpustakaan yang dibangun	-	2 Unit	1.018.700.000,00	2 Unit	1.018.700.000,00	2 Unit	1.120.570.000,00	2 Unit	1.232.627.000,00	2 Unit	1.355.889.700,00	10 Unit	5.746.486.700,00
		01.15.071.	Pembangunan Perpustakaan SMK Wilayah II	Jumlah Perpustakaan yang dibangun	-	3 Unit	1.098.800.000,00	3 Unit	1.098.800.000,00	3 Unit	1.208.680.000,00	3 Unit	1.329.548.000,00	3 Unit	1.462.502.800,00	15 Unit	6.198.330.800,00
		01.15.072.	Pembangunan Perpustakaan SMK Wilayah IV	Jumlah Perpustakaan yang dibangun	-	3 Unit	1.069.100.000,00	3 Unit	1.069.100.000,00	3 Unit	1.176.010.000,00	3 Unit	1.293.611.000,00	3 Unit	1.422.972.100,00	15 Unit	6.030.793.100,00
		01.15.073.	Pembangunan Perpustakaan SMK Wilayah III	Jumlah Perpustakaan yang dibangun	-	2 Unit	1.078.700.000,00	2 Unit	1.078.700.000,00	2 Unit	1.186.570.000,00	2 Unit	1.305.227.000,00	2 Unit	1.435.749.700,00	10 Unit	6.084.946.700,00
		01.15.074.	Pembangunan Perpustakaan SMK Kota Pekanbaru	Jumlah Perpustakaan yang dibangun	-	1 Unit	438.650.000,00	1 Unit	438.650.000,00	1 Unit	482.515.000,00	1 Unit	530.766.500,00	1 Unit	583.843.150,00	5 Unit	2.474.424.650,00
		01.15.075.	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMK Wilayah I	Jenis Meubeler Sekolah yang di penuhi	-	3 Ruang	509.000.000,00	3 Ruang	509.000.000,00	3 Ruang	559.900.000,00	3 Ruang	615.890.000,00	3 Ruang	677.479.000,00	15 Ruang	2.871.269.000,00
		01.15.076.	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMK Wilayah II	Jenis Meubeler Sekolah yang di penuhi	-	8 Ruang	514.000.000,00	8 Ruang	514.000.000,00	8 Ruang	565.400.000,00	8 Ruang	621.940.000,00	8 Ruang	684.134.000,00	40 Ruang	2.899.474.000,00
		01.15.077.	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMK Wilayah III	Jenis Meubeler Sekolah yang di penuhi	-	4 Ruang	289.900.000,00	4 Ruang	289.900.000,00	4 Ruang	318.890.000,00	4 Ruang	350.779.000,00	4 Ruang	385.856.900,00	20 Ruang	1.635.325.900,00
		01.15.078.	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMK Wilayah IV	Jenis Meubeler Sekolah yang di penuhi	-	8 Ruang	554.250.000,00	8 Ruang	554.250.000,00	8 Ruang	609.675.000,00	8 Ruang	670.642.500,00	8 Ruang	737.706.750,00	40 Ruang	3.126.524.250,00
		01.15.079.	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMK Kota Pekanbaru	Jenis Meubeler Sekolah yang di penuhi	-	2 Ruang	129.900.000,00	2 Ruang	129.900.000,00	2 Ruang	142.890.000,00	2 Ruang	157.179.000,00	2 Ruang	172.896.900,00	10 Ruang	732.765.900,00
		01.15.080.	Pengadaan Sarana Prasarana,Alat Labor dan Alat Praktek Wilayan I	Jenis Sarana dan Prasarana Labor yang di Penuhi	-	6 Set	3.429.186.800,00	6 Set	3.429.186.800,00	6 Set	3.772.105.480,00	6 Set	4.149.316.028,00	6 Set	4.564.247.630,80	30 Set	19.344.042.738,80
		01.15.081.	Pengadaan Sarana Prasarana,Alat Labor dan Alat Praktek Wilayan II	Jenis Sarana dan Prasarana Labor yang di Penuhi	-	3 Set	1.722.900.000,00	3 Set	1.722.900.000,00	3 Set	1.895.190.000,00	3 Set	2.084.709.000,00	3 Set	2.293.179.900,00	15 Set	9.718.878.900,00
		01.15.082.	Pengadaan Sarana Prasarana,Alat Labor dan Alat Praktek Wilayan III	Jenis Sarana dan Prasarana Labor yang di Penuhi	-	1 Set	785.800.000,00	1 Set	785.800.000,00	1 Set	864.380.000,00	1 Set	950.818.000,00	1 Set	1.045.899.800,00	5 Set	4.432.697.800,00
		01.15.083.	Pengadaan Sarana Prasarana,Alat Labor dan Alat Praktek Wilayan IV	Jenis Sarana dan Prasarana Labor yang di Penuhi	-	6 Set	2.650.000.000,00	6 Set	2.650.000.000,00	6 Set	2.915.000.000,00	6 Set	3.206.500.000,00	6 Set	3.527.150.000,00	30 Set	14.948.650.000,00
		01.15.084.	Pengadaan Sarana Prasarana,Alat Labor dan Alat Praktek Kota Pekanbaru	Jenis Sarana dan Prasarana Labor yang di Penuhi	-	1 Set	478.600.000,00	1 Set	478.600.000,00	1 Set	526.460.000,00	1 Set	579.106.000,00	1 Set	637.016.600,00	5 Set	2.699.782.600,00
		01.15.085.	Rehabilitasi SMK Wilayah I	Jumlah Ruang Kelas yang di Rehabilitasi	-	6 Ruang	1.251.650.000,00	6 Ruang	1.251.650.000,00	6 Ruang	1.376.815.000,00	6 Ruang	1.514.496.500,00	6 Ruang	1.665.946.150,00	30 Ruang	7.060.557.650,00
		01.15.086.	Rehabilitasi SMK Wilayah II	Jumlah Ruang Kelas yang di Rehabilitasi	-	4 Ruang	1.451.650.000,00	4 Ruang	1.451.650.000,00	4 Ruang	1.596.815.000,00	4 Ruang	1.756.496.500,00	4 Ruang	1.932.146.150,00	20 Ruang	8.188.757.650,00
		01.15.087.	Rehabilitasi SMK Wilayah III	Jumlah Ruang Kelas yang di Rehabilitasi	-	8 Ruang	1.661.650.000,00	8 Ruang	1.661.650.000,00	8 Ruang	1.827.815.000,00	8 Ruang	2.010.596.500,00	8 Ruang	2.211.656.150,00	40 Ruang	9.373.367.650,00
		01.15.088.	Rehabilitasi SMK Wilayah IV	Jumlah Ruang Kelas yang di Rehabilitasi	-	10 Ruang	2.081.650.000,00	10 Ruang	2.081.650.000,00	10 Ruang	2.289.815.000,00	10 Ruang	2.518.796.500,00	10 Ruang	2.770.676.150,00	50 Ruang	11.742.587.650,00
		01.15.089.	Rehabilitasi SMK Kota Pekanbaru	Jumlah Ruang Kelas yang di Rehabilitasi	-	0 Ruang	0	18 Ruang	1.000.000.000,00	18 Ruang	2.163.444.319,00	18 Ruang	2.206.713.205,00	18 Ruang	3.250.847.469,00	90 Ruang	8.621.004.993,00
		01.15.090.	Revitalisasi SMK Wilayah I	Jumlah Ruang Kelas yang di Revitalisasi	-	0 Ruang	0	17 Ruang	1.500.000.000,00	17 Ruang	1.530.000.000,00	17 Ruang	2.060.600.000,00	17 Ruang	2.601.812.000,00	85 Ruang	7.692.412.000,00
		01.15.091.	Revitalisasi SMK Wilayah II	Jumlah Ruang Kelas yang di Revitalisasi	-	0 Ruang	0	18 Ruang	1.500.000.000,00	18 Ruang	1.530.000.000,00	18 Ruang	2.060.600.000,00	18 Ruang	2.601.812.000,00	90 Ruang	7.692.412.000,00
		01.15.092.	Revitalisasi SMK Wilayah III	Jumlah Ruang Kelas yang di Revitalisasi	-	0 Ruang	0	20 Ruang	1.500.000.000,00	20 Ruang	1.530.000.000,00	20 Ruang	2.060.600.000,00	20 Ruang	2.601.812.000,00	100 Ruang	7.692.412.000,00
		01.15.093.	Revitalisasi SMK Wilayah IV	Jumlah Ruang Kelas yang di Revitalisasi	-	0 Ruang	0	26 Ruang	1.500.000.000,00	26 Ruang	1.530.000.000,00	26 Ruang	2.060.600.000,00	26 Ruang	2.618.879.965,00	130 Ruang	7.709.479.965,00
		01.15.094.	Revitalisasi SMK Kota Pekanbaru	Jumlah Ruang Kelas yang di Revitalisasi	-	0 Ruang	0	3 Ruang	1.500.000.000,00	3 Ruang	1.530.000.000,00	3 Ruang	2.293.609.751,00	3 Ruang	2.339.481.946,00	15 Ruang	7.663.091.697,00
		01.15.095.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Wilayah I	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	-	6 Ruang	2.008.244.300,00	6 Ruang	2.008.244.300,00	6 Ruang	2.209.068.730,00	6 Ruang	2.429.975.603,00	6 Ruang	2.672.973.163,30	30 Ruang	11.328.506.096,30
		01.15.096.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Wilayah II	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	-	9 Ruang	2.429.200.259,00	9 Ruang	2.429.200.259,00	9 Ruang	2.672.120.285,00	9 Ruang	2.939.332.313,86	9 Ruang	3.233.265.544,73	45 Ruang	13.703.118.661,59
		01.15.097.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Wilayah III	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	-	4 Ruang	1.213.134.396,00	4 Ruang	1.213.134.396,00	4 Ruang	1.334.447.836,00	4 Ruang	1.467.892.619,16	4 Ruang	1.614.681.881,08	20 Ruang	6.843.291.128,24
		01.15.098.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Wilayah IV	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	-	6 Ruang	1.572.821.388,00	6 Ruang	1.572.821.388,25	6 Ruang	1.730.103.527,00	6 Ruang	1.903.113.879,81	6 Ruang	2.093.425.267,79	30 Ruang	8.872.285.450,85
		01.15.099.	Pengadaan Media Pembelajaran SMK Kota pekanbaru	Jenis media pembelajaran yang di penuhi	-	108 Set	1.502.200.000,00	108 Set	1.502.200.000,00	108 Set	1.652.420.000,00	108 Set	1.817.662.000,00	108 Set	1.999.428.200,00	540 Set	8.473.910.200,00
		01.15.100.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Kota Pekanbaru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	-	3 Ruang	0	3 Ruang	0	3 Ruang	840.000.000,00	3 Ruang	856.800.000,00	3 Ruang	873.936.000,00	15 Ruang	2.570.736.000,00
		01.15.101.	Penyelenggaraan Pendidikan SMA (DAK)	Jumlah Sekolah SMA Yang Mendapat Bantuan DAK	-	195 Sekolah	31.040.483.000,00	195 Sekolah	31.661.292.660,00	195 Sekolah	32.294.518.513,20	195 Sekolah	32.940.408.885,02	195 Sekolah	33.599.217.062,00	975 Sekolah	161.535.920.120,22
		01.15.102.	Penyelenggaraan Pendidikan SMK (DAK)	Jumlah Sekolah SMK Yang Mendapat Bantuan DAK	-	46 Sekolah	99.644.469.000,00	40 Sekolah	101.637.358.380,00	42 Sekolah	103.670.105.547,60	43 Sekolah	105.743.507.657,00	44 Sekolah	107.858.377.811,00	215 Sekolah	518.553.818.395,60
Meningkatkan Kualitas SDM yang Beriman dan Berdaya Saing	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan**	**1.1.01.16.**	**PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS**	**Persentase anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan akses pendidikan**	88,08 Persen	88,62 Persen	**181.315.372.782,00**	89,32 Persen	**191.342.271.749,00**	90,02 Persen	**204.501.198.087,04**	90,72 Persen	**219.613.958.949,91**	91,42 Persen	**235.182.827.330,81**	91,42 Persen	**1.031.955.628.898,76**
		01.16.001.	Pelaksanaan Ujian Sekolah SDLB, Ujian Nasional SMPLB dan SMALB	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ujian Sekolah dan Ujian Nasional	1	200 Siswa	602.340.000,00	200 Siswa	614.386.800,00	200 Siswa	737.264.160,00	200 Siswa	958.443.408,50	200 Siswa	1.150.132.090,00	1000 Siswa	4.062.566.458,50

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian	Target Kinerja Program dan Kerangka											
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		01.16.002.	Penelusuran Minat Bakat dan Kreatifitas PKPLK	Jenis Lomba Yang Diikuti	860	44 Cabang Lomba	2.677.677.000,00	44 Cabang Lomba	2.731.230.540,00	44 Cabang Lomba	3.277.476.648,00	44 Cabang Lomba	3.605.224.313,38	44 Cabang Lomba	4.526.269.175,93	220 Cabang Lomba	16.817.877.677,31
		01.16.003.	Peningkatan Penyelenggaraan pusat layanan autis	Jumlah Siswa Pusat Layanan Autis	2	46 Siswa	2.177.458.100,00	46 Siswa	2.221.007.262,00	46 Siswa	2.665.208.714,44	46 Siswa	2.931.729.585,88	46 Siswa	3.518.075.503,06	230 Siswa	13.513.479.165,38
		01.16.004.	Rehabilitasi PKPLK Wilayah Pekanbaru	Jumlah Sekolah PKPLK yang di Rehabilitasi	-	3 Sekolah	417.122.100,00	3 Sekolah	776.056.053,00	3 Sekolah	931.267.263,60	3 Sekolah	1.024.393.989,96	3 Sekolah	1.326.833.388,96	15 Sekolah	4.475.672.795,52
		01.16.005.	Rehabilitasi PKPLK Wilayah I	Jumlah sekolah PKPLK Wilayah I yang di Rehabilitasi	-	1 Sekolah	138.551.194,00	1 Sekolah	491.322.217,88	1 Sekolah	589.586.661,46	1 Sekolah	648.545.327,60	1 Sekolah	913.399.860,36	5 Sekolah	2.781.405.261,30
		01.16.006.	Rehabilitasi PKPLK Wilayah II	Jumlah Sekolah PKPLK WILAYAH II yang di Rehabilitasi	-	3 Sekolah	714.800.200,00	3 Sekolah	729.096.204,00	3 Sekolah	968.011.036,80	3 Sekolah	1.064.812.140,48	3 Sekolah	1.371.293.354,53	15 Sekolah	4.848.012.935,81
		01.16.007.	Rehabilitasi PKPLK Wilayah III	Jumlah Sekolah PKPLK wilayah III yang di Rehabilitasi	-	1 Sekolah	135.355.600,00	1 Sekolah	388.062.712,00	1 Sekolah	585.675.254,35	1 Sekolah	644.242.779,84	1 Sekolah	908.667.057,59	5 Sekolah	2.662.003.403,78
		01.16.008.	Rehabilitasi PKPLK Wilayah IV	Jumlah Sekolah PKPLK wilayah IV yang di Rehabilitasi	-	1 Sekolah	139.288.400,00	1 Sekolah	390.103.866,00	1 Sekolah	590.489.001,60	1 Sekolah	649.537.901,76	1 Sekolah	914.491.691,94	5 Sekolah	2.683.910.861,30
		01.16.010.	RKB PKPLK Wilayah I	Sekolah yang mendapat RKB	-	1 Sekolah	731.520.900,00	1 Sekolah	746.151.318,00	1 Sekolah	895.381.581,60	1 Sekolah	984.919.739,76	1 Sekolah	1.083.411.713,74	5 Sekolah	4.441.385.253,10
		01.16.014.	Pengadaan Media Pembelajaran PKPLK Wilayah Pekanbaru	Jenis media pembelajaran yang di penuhi	-	2 Sekolah	194.852.200,00	2 Sekolah	198.749.244,00	2 Sekolah	238.499.092,80	2 Sekolah	302.349.002,08	2 Sekolah	582.583.902,29	10 Sekolah	1.517.033.441,17
		01.16.015.	Pengadaan Media Pembelajaran PKPLK Wilayah I	Jenis media pembelajaran yang di penuhi	-	2 Sekolah	195.846.100,00	2 Sekolah	199.763.022,00	2 Sekolah	239.715.626,40	2 Sekolah	303.687.189,04	2 Sekolah	584.055.907,94	10 Sekolah	1.523.067.845,38
		01.16.016.	Pengadaan Media Pembelajaran PKPLK Wilayah II	Jenis media pembelajaran yang di penuhi	-	2 Sekolah	195.631.900,00	2 Sekolah	199.544.538,00	2 Sekolah	239.453.445,83	2 Sekolah	303.398.790,41	2 Sekolah	583.738.669,45	10 Sekolah	1.521.767.343,69
		01.16.017.	Pengadaan Media Pembelajaran PKPLK Wilayah III	Jenis media pembelajaran yang di penuhi	-	2 Sekolah	194.969.500,00	2 Sekolah	198.868.890,00	2 Sekolah	238.642.668,00	2 Sekolah	302.506.934,80	2 Sekolah	582.757.628,28	10 Sekolah	1.517.745.621,08
		01.16.018.	Pengadaan Media Pembelajaran PKPLK Wilayah IV	Jenis media pembelajaran yang di penuhi	-	2 Sekolah	194.989.900,00	2 Sekolah	198.889.698,00	2 Sekolah	238.667.637,60	2 Sekolah	302.534.401,36	2 Sekolah	582.787.841,50	10 Sekolah	1.517.869.478,46
		01.16.019.	Pengadaan Mebeuler PKPLK Wilayah Pekanbaru	Jenis Meubeler Sekolah PKPLK yang dipenuhi	-	2 Ruang	195.349.900,00	2 Ruang	199.256.898,00	2 Ruang	239.108.277,60	2 Ruang	274.063.360,09	2 Ruang	551.469.696,10	10 Ruang	1.459.248.131,79
		01.16.020.	Pengadaan Mebeuler PKPLK Wilayah I	Jenis Meubeler Sekolah PKPLK wilayah I yang di penuhi	-	2 Ruang	196.189.900,00	2 Ruang	200.113.698,00	2 Ruang	240.136.437,60	2 Ruang	264.150.081,36	2 Ruang	540.565.089,50	10 Ruang	1.441.155.206,46
		01.16.021.	Pengadaan Mebeuler PKPLK Wilayah II	Jenis Meubeler Sekolah PKPLK wilayah II yang di penuhi	-	2 Ruang	198.010.100,00	2 Ruang	201.970.302,00	2 Ruang	242.364.362,40	2 Ruang	266.600.798,64	2 Ruang	328.928.378,50	10 Ruang	1.237.873.941,54
		01.16.022.	Pengadaan Mebeuler PKPLK Wilayah III	Jenis Meubeler Sekolah PKPLK wilayah III yang di penuhi	-	1 Ruang	0	2 Ruang	201.970.302,00	2 Ruang	206.009.708,04	2 Ruang	210.129.902,20	2 Ruang	214.332.500,24	9 Ruang	832.442.412,48
		01.16.023.	Pengadaan Mebeuler PKPLK Wilayah IV	Jenis Meubeler Sekolah PKPLK WILAYAH IV yang di penuhi	-	1 Ruang	95.949.897,00	1 Ruang	97.868.894,94	1 Ruang	117.442.673,93	1 Ruang	129.186.941,32	1 Ruang	142.105.635,45	5 Ruang	582.554.042,64
		01.16.024.	Penyelengaraan Pendidikan SMA Olahraga Provinsi Riau	Jumlah Siswa SMA olahraga Provinsi Riau	300	300 Siswa	8.000.000.000,00	300 Siswa	8.160.000.000,00	300 Siswa	9.792.000.000,00	300 Siswa	10.561.070.097,80	300 Siswa	11.945.320.000,00	1500 Siswa	48.458.390.097,80
		01.16.025.	Festival Inovasi Dan Kreatifitas PKPLK	Jumlah siswa yang mengikuti Festival inovasi dan kreatifitas PKPLK	1	150 Siswa	844.707.700,00	150 Siswa	861.601.854,00	150 Siswa	1.033.922.224,80	150 Siswa	1.137.314.447,28	150 Siswa	1.251.045.892,01	750 Siswa	5.128.592.118,09
		01.16.026.	Persiapan dan Penyelenggaraan Sekolah Terbuka Pendidikan Jarak Jauh	Jumlah Siswa sekolah Terbuka pendidikan jarak jauh	-	200 Siswa	750.000.000,00	200 Siswa	765.000.000,00	200 Siswa	918.000.000,00	200 Siswa	1.009.800.000,00	200 Siswa	1.610.780.000,00	1000 Siswa	5.053.580.000,00
		01.16.027.	Penyelenggaraan Penunjang Layanan Asrama SLBN Pembina Wilayah Pekanbaru	Jumlah Siswa SLB yang tinggal diasrama Pekanbaru	-	30 Siswa	670.000.000,00	30 Siswa	683.400.000,00	30 Siswa	820.080.000,00	30 Siswa	1.202.088.000,00	30 Siswa	1.322.296.800,00	150 Siswa	4.697.864.800,00
		01.16.028.	Penyelenggaraan Penunjang Layanan Asrama SLB Wilayah I	Jumlah Siswa SLB yang tinggal diasrama	-	40 Siswa	904.774.850,00	40 Siswa	922.870.347,00	40 Siswa	1.107.444.416,40	40 Siswa	1.518.188.858,04	40 Siswa	1.870.007.743,84	200 Siswa	6.323.286.215,28
		01.16.029.	Penyelenggaraan Penunjang Layanan Asrama SLB Wilayah II	Jumlah Siswa SLB yang tinggal diasrama	-	70 Siswa	1.448.597.900,00	70 Siswa	1.477.569.858,00	70 Siswa	1.773.083.829,60	70 Siswa	2.250.392.212,56	70 Siswa	2.675.431.433,82	350 Siswa	9.625.075.233,98
		01.16.030.	Penyelenggaraan Penunjang Layanan Asrama SLB Wilayah III	Jumlah Siswa SLB yang tinggal diasrama	-	68 Siswa	1.318.090.000,00	68 Siswa	1.344.451.800,00	68 Siswa	1.613.342.160,00	68 Siswa	2.074.676.376,00	68 Siswa	2.482.144.013,60	340 Siswa	8.832.704.349,60
		01.16.031.	Penyelenggaraan Penunjang Layanan Asrama SLB Wilayah IV	Jumlah Siswa SLB yang tinggal diasrama	-	49 Siswa	966.538.500,00	49 Siswa	985.869.270,00	49 Siswa	1.183.043.124,00	49 Siswa	1.601.347.436,40	49 Siswa	1.961.482.180,04	245 Siswa	6.698.280.510,44
		01.16.032.	Peningkatan Kesejahteraan Guru Marginal	Jumlah Guru Marginal	-	251 Orang	6.292.467.500,00	251 Orang	6.418.316.850,00	251 Orang	7.701.980.220,00	251 Orang	8.472.178.242,00	251 Orang	9.319.396.066,20	1255 Orang	38.204.338.878,20
		01.16.033.	Pendampingan Kegiatan ADEM dan ADIK bagi daerah 3T dan KAT	Jumlah siswa yg mendapatkan Program ADEM 3T dan ADIK dan KAT	-	75 Siswa	384.061.000,00	75 Siswa	391.742.220,00	75 Siswa	470.090.664,00	75 Siswa	517.099.730,40	75 Siswa	768.809.703,44	375 Siswa	2.531.803.317,84
		01.16.034.	Apresiasi GTK PAUD dan Gebyar Paud DIKMAS	JUMLAH GTK PAUD YANG BERPRESTASI	-	228 Orang	1.523.720.350,00	228 Orang	1.554.194.757,00	228 Orang	1.659.024.000,40	228 Orang	2.051.537.079,24	228 Orang	2.256.690.787,16	1140 Orang	9.045.166.973,80
		01.16.035.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Monitoring Penyelenggaran PKPLK	JUMLAH DOKUMEN HASIL KOORDINASI , SINKRONISASI DAN MONITORING PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PKPLK DI 12 KAB/KOTA	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	1 Dokumen	357.000.000,00	1 Dokumen	428.400.000,00	1 Dokumen	471.240.000,00	1 Dokumen	1.019.069.909,75	5 Dokumen	2.625.709.909,75
		01.16.036.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung PKPLK Wilayah I	Jenis infrastruktur Pendukung yang di Bangun	-	1 Sekolah	690.794.500,00	1 Sekolah	1.704.610.390,00	1 Sekolah	2.385.532.468,00	1 Sekolah	3.624.085.714,80	1 Sekolah	3.986.494.286,28	5 Sekolah	12.391.517.359,08
		01.16.037.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung PKPLK Wilayah II	Jenis infrastruktur Pendukung yang di Bangun	-	1 Sekolah	579.089.600,00	1 Sekolah	1.590.671.392,00	1 Sekolah	2.248.805.670,40	1 Sekolah	3.473.686.237,44	1 Sekolah	3.821.054.861,18	5 Sekolah	11.713.307.761,02
		01.16.038.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung PKPLK Wilayah III	Jenis infrastruktur Pendukung yang di Bangun	-	1 Sekolah	188.672.800,00	1 Sekolah	1.192.446.256,00	1 Sekolah	1.770.935.507,20	1 Sekolah	2.948.029.057,92	1 Sekolah	3.242.831.963,71	5 Sekolah	9.342.915.584,83
		01.16.039.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung PKPLK Wilayah IV	Jenis infrastruktur Pendukung yang di Bangun	-	1 Sekolah	283.440.000,00	1 Sekolah	1.289.108.800,00	1 Sekolah	1.886.930.560,00	1 Sekolah	3.075.623.616,00	1 Sekolah	3.383.185.977,60	5 Sekolah	9.918.288.953,60
		01.16.040.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung PKPLK Kota Pekanbaru	Jenis infrastruktur Pendukung yang di Bangun	-	1 Sekolah	196.064.191,00	1 Sekolah	1.199.985.475,18	1 Sekolah	1.779.982.569,79	1 Sekolah	2.957.980.826,76	1 Sekolah	3.253.778.909,44	5 Sekolah	9.387.791.972,17
		01.16.041.	Penyelenggaraan Pendidikan SLB (DAK)	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan bantuan DAK	-	10 Sekolah	146.528.451.000,00	10 Sekolah	149.459.020.020,00	10 Sekolah	152.448.200.420,40	10 Sekolah	155.497.164.428,81	10 Sekolah	158.607.107.717,38	50 Sekolah	762.539.943.586,59
Meningkatkan Kualitas SDM yang Beriman dan Berdaya Saing	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan**	**1.1.01.17.**	**PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**	**Menurunnya angka putus sekolah**	0.71 Persen	0.54 Persen	**686.722.570.000,00**	0.46 Persen	**724.698.929.765,31**	0.38 Persen	**774.537.680.747,36**	0.31 Persen	**831.776.478.651,29**	0.24 Persen	**890.742.760.122,51**	0.24 Persen	**3.908.478.419.286,47**
		01.17.001.	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Jumlah sekolah SMA/SMK/SLB yang mendapat DAK Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	-	455 Sekolah	208.196.772.000,00	455 Sekolah	212.360.707.440,00	455 Sekolah	216.607.921.588,00	455 Sekolah	220.940.080.019,00	455 Sekolah	225.358.881.619,00	2275 Sekolah	1.083.464.362.666,00
		01.17.002.	Biaya Operasional Peningkatan Mutu Pendidikan/BOS Daerah	Jumlah siswa mendapat bantuan BOS daerah dan guru yang mendapat Honor dan Gaji	220.609	518894 Orang	444.087.970.000,00	518894 Orang	477.211.637.765,31	518894 Orang	522.100.642.907,36	518894 Orang	574.290.700.054,29	518894 Orang	628.107.265.953,77	2594470 Orang	2.645.798.216.680,73
		01.17.003.	Penyelenggaraan Bos Kinerja	Jumlah sekolah yang mendapat bantuan DAK Kinerja	-	38 Sekolas	24.493.828.000,00	38 Sekolas	24.983.704.560,00	38 Sekolas	25.483.378.652,00	38 Sekolas	25.993.046.225,00	38 Sekolas	26.512.907.149,74	190 Sekolas	127.466.864.586,74
		01.17.004.	Penyelenggaraan Bos Afirmasi	Jumlah sekolah yang mendapat bantuan DAK Afirmasi	-	118 Sekolah	9.944.000.000,00	118 Sekolah	10.142.880.000,00	118 Sekolah	10.345.737.600,00	118 Sekolah	10.552.652.353,00	118 Sekolah	10.763.705.400,00	590 Sekolah	51.748.975.353,00
Meningkatkan Kualitas SDM yang Beriman dan Berdaya Saing	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan**	**1.1.01.18.**	**PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Kualifikasi guru SMA/SMK dengan tingkat pendidikan > D4/S1** **Jumlah siswa miskin yang dibantu**	753 Orang; 0 Siswa;	162 Orang; 1700 Siswa;	**139.748.881.500,00**	175 Orang; 2400 Siswa;	**147.477.117.082,30**	150 Orang; 2400 Siswa;	**157.619.363.761,48**	150 Orang; 2400 Siswa;	**169.267.529.024,90**	116 Orang; 2400 Siswa;	**181.267.239.303,56**	116 Orang; 2400 Siswa;	**795.380.130.672,24**
				Jumlah siswa dan mahasiswa yang diberikan beasiswa	2724 Siswa;	3635 Siswa;		3792 Siswa;		3808 Siswa;		3808 Siswa;		3808 Siswa;		3808 Siswa;	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian	Target Kinerja Program dan Kerangka													
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
		01.18.001.	MGMP Guru Mata Pelajaran Program Pendidikan Menengah	Jumlah guru SMA/SMK yang mengikuti MGMP	-	320 Orang	1.300.000.000,00	320 Orang	1.430.000.000,00	320 Orang	1.558.700.000,56	320 Orang	1.666.385.490,54	320 Orang	1.833.024.039,37	1600	Orang	7.788.109.530,47	
		01.18.002.	Pendidikan Alih Profesi Guru Adaptif menjadi Guru Produktif	Jumlah Guru Adaptif menjadi Guru Produktif	-	30 Orang	1.000.000.000,00	30 Orang	1.100.000.000,00	30 Orang	1.196.700.000,00	30 Orang	1.280.469.000,30	30 Orang	1.408.515.900,33	150	Orang	5.985.684.900,63	
		01.18.003.	Diklat Muatan Lokal Bagi Guru SMA/SMK se Provinsi Riau	Jumlah Guru Yang Mengikuti Diklat Muatan Lokal	-	415 Orang	700.000.000,00	415 Orang	770.000.000,00	415 Orang	831.600.000,00	415 Orang	889.812.000,00	415 Orang	978.793.200,00	2075	Orang	4.170.205.200,00	
		01.18.004.	Olimpiade Guru Nasional (OGN) Provinsi RIau	Jumlah Guru yang mengikuti Olimpiade Guru Nasional (OGN)	75	60 Orang	188.260.600,00	60 Orang	207.086.660,00	60 Orang	223.653.592,80	60 Orang	239.309.344,30	60 Orang	263.240.278,33	300	Orang	1.121.550.475,43	
		01.18.005.	Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Provinsi Riau	Jumlah Siswa di Kabupaten/Kota yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasinal (O2SN) SD, SMP, SMA DAN SMK	-	708 Orang	5.744.250.000,00	708 Orang	6.318.675.000,00	708 Orang	6.824.169.000,00	708 Orang	7.301.860.830,00	708 Orang	7.957.870.437,70	3540	Orang	34.146.825.267,70	
		01.18.006.	Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK	Jumlah Siswa di Kabupaten/Kota yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD, SMP, SMA dan SMK	-	624 Orang	7.000.000.000,00	624 Orang	7.700.000.000,00	624 Orang	8.393.000.000,00	624 Orang	8.980.510.000,00	624 Orang	9.788.755.900,00	3120	Orang	41.862.265.900,00	
		01.18.007.	Penyenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SD, SMP DAN SMA	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SD, SMP, dan SMA	-	588 Orang	4.270.068.400,00	588 Orang	4.697.075.240,00	588 Orang	5.072.841.259,20	588 Orang	5.427.940.147,34	588 Orang	5.862.175.359,13	2940	Orang	25.330.100.405,67	
		01.18.008.	Pemberian Beasiswa pada Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Provinsi Riau	Perguruan Tinggi dalam Provinsi; Perguruan Tinggi Nasional;	-	3310 Orang	57.583.627.000,00	3310 Orang ,	57.626.338.732,00	3310 Orang	60.507.655.668,60	3310 Orang	64.743.191.565,40	3310 Orang	67.980.351.143,67	16550	Orang	308.441.164.109,67	
						102 Orang		102 Orang		102 Orang		102 Orang		102 Orang		510	Orang		
		01.18.009.	Pengelolaan Data Pendidikan	Jumlah dokumen data pendidikan	12	1 Dokumen	1.383.611.400,00	1 Dokumen	1.521.972.540,00	1 Dokumen	1.643.730.343,20	1 Dokumen	1.758.791.467,22	1 Dokumen	1.899.494.784,60	5	Dokumen	8.207.600.535,02	
		01.18.010.	Peningkatan Kapasitas Dewan Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Anggota Dewan yang melaksanakan agenda kerja Pendidikan	1	13 Orang	1.172.389.000,00	13 Orang	1.289.627.900,00	13 Orang	1.392.798.132,00	13 Orang	1.490.294.001,24	13 Orang	1.624.420.461,35	65	Orang	6.969.529.494,59	
		01.18.011.	Festival Literasi Siswa (FLS) SD, SMP, SMA DAN SMK	Jumlah siswa di Kabupaten/Kota yang mengikuti Festival Literasi Siswa (FLS) SD, SMP, SMA dan SMK	-	12 Kabupaten/Kot a	2.194.200.000,00	12 Kabupaten/Kot a	2.413.620.000,00	12 Kabupaten/Kot a	2.606.709.600,00	12 Kabupaten/Kot a	2.789.179.272,00	12 Kabupaten/Kot a	3.012.313.613,76	60	Kabupaten/ Kota	13.016.022.485,76	
		01.18.012.	Sinkronisasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG) dan Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL)	Jumlah permasalahan terkait data guru dan tunjangan didaerah jenjang SMA. SMK dan SLB	-	12 Bulan	450.000.000,00	12 Bulan	495.000.000,00	12 Bulan	534.600.000,00	12 Bulan	572.022.000,00	12 Bulan	623.503.980,00	60	Bulan	2.675.125.980,00	
		01.18.013.	Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan SMA, SMK dan SLB	Jumlah guru yang mengikuti Pendidikan Profesi (PPG) dalam jabatan SMA, SMK dan SLB	-	165 Orang	1.800.000.000,00	165 Orang	1.800.000.000,00	165 Orang	1.944.000.000,00	165 Orang	2.080.080.000,00	165 Orang	2.267.287.200,00	825	Orang	9.891.367.200,00	
		01.18.014.	Diklat Calon Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Menengah SMA, SMK dan SLB	Jumlah Calon Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Menengah SMA, SMK dan SLB yang mengikuti Diklat	-	84 Orang	1.410.016.000,00	84 Orang	1.410.016.000,00	84 Orang	1.522.817.280,00	84 Orang	1.629.414.489,60	84 Orang	1.776.061.793,66	420	Orang	7.748.325.563,26	
		01.18.015.	Diklat Calon Pengawas dan Penguatan Pengawas Satuan Pendidikan Menengah	Jumlah Calon Pengawas Yang Mengikuti Diklat dan Mendapatkan Sertifikat Pengawas Sekolah	-	30 Orang	500.000.000,00	30 Orang	550.000.000,00	30 Orang	588.867.474,00	30 Orang	630.088.197,18	30 Orang	693.097.016,90	150	Orang	2.962.052.688,08	
		01.18.016.	Peningkatan Kompetensi Pendidik PNS dan GTT SMA, SMK dan SLB	Jumlah Pendidik PNS dan GTT SMA, SMK dan SLB yang kompetensinya meningkat	-	815 Orang	8.100.000.000,00	815 Orang	8.700.000.000,00	815 Orang	9.396.000.000,00	815 Orang	10.147.680.000,00	815 Orang	10.959.494.400,00	4075	Orang	47.303.174.400,00	
		01.18.017.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan SMA, SMK dan SLB	Jumlah Tenaga Kependidikan SMA, SMK dan SLB yang kompetensinya meningkat	-	1644 Orang	6.099.006.400,00	1644 Orang	6.708.907.040,00	1644 Orang	7.245.619.603,20	1644 Orang	7.825.269.171,46	1644 Orang	8.451.290.705,18	8220	Orang	36.330.092.919,84	
		01.18.018.	Peningkatan Pelaksanaan Kerja Pengawas SMA, SMK dan SLB	Jumlah Pengawas SMA, SMK dan SLB serta Peningkatan Mutu Kinerja Pengawas	-	40 Orang	200.000.000,00	40 Orang	220.000.000,00	40 Orang	237.600.000,00	40 Orang	254.232.000,00	40 Orang	278.484.530,00	200	Orang	1.190.316.530,00	
		01.18.019.	Pembinaan Sekolah Unggulan Satuan Pendidikan Menengah di Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Unggulan di Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Pembinaan	-	24 Sekolah	2.000.000.000,00	24 Sekolah	2.200.000.000,00	24 Sekolah	2.354.000.000,00	24 Sekolah	2.542.320.000,00	24 Sekolah	2.771.128.800,00	120	Sekolah	11.867.448.800,00	
		01.18.021.	PPDB On Line SMA/SMK	Jumlah Sekolah yang mengikuti PPDB Online	-	140 Sekolah	585.698.000,00	140 Sekolah	644.267.800,00	140 Sekolah	695.809.224,00	140 Sekolah	744.515.869,68	140 Sekolah	811.522.297,95	700	Sekolah	3.481.813.191,63	
		01.18.022.	Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA/SMK	Jumlah Siswa di Kabupaten/Kota yang mengikuti Ujian Nasional SMA/MA/SMK	12	8900 Siswa	1.173.356.000,00	8900 Siswa	1.290.691.600,00	8900 Siswa	1.393.946.928,00	8900 Siswa	1.505.462.682,24	8900 Siswa	1.640.954.323,64	44500	Siswa	7.004.411.533,88	
		01.18.023.	Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi seProvinsi Riau"	Jumlah siswa, tenaga pendidik dan kependidikan yang menerima penghargaan	-	175 Orang	750.000.000,00	183 Orang	825.000.000,00	184 Orang	891.000.000,00	186 Orang	962.280.000,00	188 Orang	1.048.885.200,00	916	Orang	4.477.165.200,00	
		01.18.024.	Pengembangan Minat dan Bakat Siswa SD, SMP, SMA, dan SMK	Jumlah Penghargaan Yang Diperoleh	-	496 Penghargaan	2.000.000.000,00	496 Penghargaan	2.200.000.000,00	496 Penghargaan	2.376.000.000,00	496 Penghargaan	2.563.872.188,00	496 Penghargaan	2.794.620.684,92	2480	Penghargaa n	11.934.492.872,92	
		01.18.026.	Beasiswa Bagi Tenaga Pendidik	Jumlah Guru Yang Menerima Beasiswa	-	162 Orang	6.078.068.700,00	162 Orang	6.685.875.570,30	162 Orang	7.220.745.615,92	162 Orang	7.798.405.265,20	162 Orang	8.422.277.686,42	810	Orang	36.205.372.837,84	
		01.18.027.	Pemberian Beasiswa Bidik Misi	Jumlah mahasiswa ekonomi kurang mampu yang mendapatkan beasiswa bidik misi	-	2400 Orang	26.066.330.000,00	2400 Orang	28.672.963.000,00	2400 Orang	30.966.800.040,00	2400 Orang	33.444.144.043,20	2400 Orang	36.119.675.566,65	12000	Orang	155.269.912.649,85	
				TOTAL			**1.335.714.400.534,00**		**1.409.580.577.115,88**		**1.506.519.778.329,77**		**1.617.852.491.086,74**		**1.732.545.257.493,20**			**7.602.212.504.559,59**	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung capaian sasaran dan RPJMD. Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi untuk mendukung capaian sasaran dan RPJMD adalah sebagai berikut:

(1) Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
(2) Harapan Lama Sekolah (HLS)
(3) APK SMA/MA/SMK/SMLB/Paket C
(4) APM SMA/MA/SMK/SMLB/Paket C
(5) Persentase Sekolah yang berakreditasi minimal B tingkat SMA
(6) Persentase program Keahlian yang berakreditasi minimal B tingkat SMK
(7) APK SD/MI/SDLB/Paket A
(8) APM SD/MI/SDLB/Paket A
(9) APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B
(10) APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B
(11) Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1
(12) Angka Putus Sekolah
(13) Persentase Kebutuhan khusus yang mendapatkan akses pendidikan

Indikator Kinerja RPJMD untuk mendukung program pendidikan adalah sebagai berikut:

1. APK SMA Sederajat
2. APM SMA Sederajat
3. Persentase Sekolah yang berakreditasi minimal B tingkat SMA
4. Persentase program Keahlian yang berakreditasi minimal B tingkat SMK
5. Persentase Kebutuhan khusus yang mendapatkan akses pendidikan
6. Menurunnya Angka Putus Sekolah
7. Kualifikasi guru SMA/SMK dengan tingkat Pendidikan >D4/S1
8. Jumlah Siswa Miskin yang dibantu
9. Jumlah siswa dan mahasiswa yang diberikan beasiswa

Berikut adalah tabel T.C 28 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pendidikan							
1	Rata - rata Lama Sekolah	8,92	8,97	9,04	9,11	9,18	9,24	9,24
2	Harapan Lama Sekolah	13,11	13,57	13,74	13,92	14,10	14,28	14,28
3	APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C (%)	84,96	85,26	85,56	85,86	86,16	86,46	86,46
4	APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C (%)	61,59	62,09	62,59	63,09	63,59	64,09	64,09
5	Persentase Sekolah yang berakreditasi minimal B	82,43	82,63	82,83	83,03	83,23	83,43	83,43
6	Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi	54,63	54,83	55,03	55,23	55,43	55,63	55,63
7	APK SD/MI/SDLB/Paket A	107,94	108,14	108,34	108,54	108,74	108,94	108,94
8	APM SD/MI/SDLB/Paket A	95,28	95,48	95,68	95,88	96,08	96,28	96,28
9	APK SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	96,66	96,86	97,06	97,26	97,46	97,66	97,66
10	APM SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	73,77	73,97	74,17	74,37	74,57	74,77	74,77
11	Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1	95,34	95,44	95,94	96,44	96,94	97,44	97,44
12	Angka Putus Sekolah	1,02	1,01	1,00	0,9	0,8	0,7	0,7
	APK SMA Sederajat	83,87	85,26	85,56	85,86	86,16	86,46	86,46
	APM SMA Sederajat	63,81	67,17	69,32	71,51	73,68	75,55	75,55
	Akreditasi sekolah SMA sederajat dengan nilai minimal b	81,49	82,63	82,83	83,03	83,23	83,43	83,43
	Persentase anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan akses pendidikan	88,08	88,62	89,32	90,02	90,72	91,42	91,42
	Angka Putus Sekolah	0,71	0,54	0,46	0,38	0,31	0,24	0,24
	Kualifikasi guru SMA/SMK dengan tingkat pendidikan > D4/S1	753	162	175	150	150	116	116,00
	Jumlah siswa miskin yang dibantu	-	1700	2400	2400	2400	2400	2400,00
	Jumlah siswa dan mahasiswa yang diberikan beasiswa	2724	3635	3792	3808	3808	3808	3808,00
13	Persentase anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan akses pendidikan	88,08	88,62	89,32	90,02	90,72	91,42	91,42

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi. Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitan ini diharapkan seluruh aparatur Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk melaksanakan program ini sehingga dapat berhasil dengan baik. Dengan demikian hasil pembangunan bidang Pendidikan dapat diterima secara lebih adil dan merata untuk masyarakat. Sangat dimungkinkan dapat terjadi perubahan pesat, tidak menentu yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah situasi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian.

Rencana Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2019-2024, merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau ditetapkan dengan peraturan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah setelah disahkan Gubernur Riau.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Pekanbaru,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

RUDYANTO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 199403 1 004